



BPMP
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Provinsi
Kepulauan Riau



LAPORAN KINERJA

2023

BPMP PROV. KEPULAUAN RIAU
JL. TATA BUMI, KM 20 CERUK IJUK, TOAPAYA, BINTAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Bintan, 31 Januari 2023



Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Warsita, S.S., M.Pd.



Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	7,15	1,96	2,14	3,92
	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	30	87,50	35
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A	A	A	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	98,91	84	96,40	85

Sasaran	Indikator	anggaran	Realisasi	% Kinerja Anggaran	Sisa
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	693.469.000	691.007.808	99,65	2.461.192
	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	7.528.594.000	7.175.683.194	94,87	350.449.614
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	375.000.000	374.625.814	99,90	374.186
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	9.675.536.000	9.675.224.889	100	311.111
TOTAL		17.579.130.000	17.225.533.897	97,99	353.596.103

Beberapa **permasalahan/kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Jaringan internet yang terbatas di Kabupaten/Kota;
2. Beberapa capaian target diukur melalui survei yang dilakukan pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Rendahnya tingkat partisipasi aktif dan keseriusan para responden dalam mengisi survei berdampak pada hasil capaian kinerja dan intervensi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
3. Keterlambatan pelaksanaan beberapa aktivitas dari jadwal yang telah direncanakan berdampak negatif pada optimalitas program, dengan rentang waktu yang singkat sulit untuk memastikan pencapaian objektif;
4. Kemendikbudristek telah menyediakan Sistem Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemda karena Pj. Kepala Daerah belum mendapatkan arahan dari Kemendagri;
5. Pelaksanaan kontrak konsultan pendidikan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

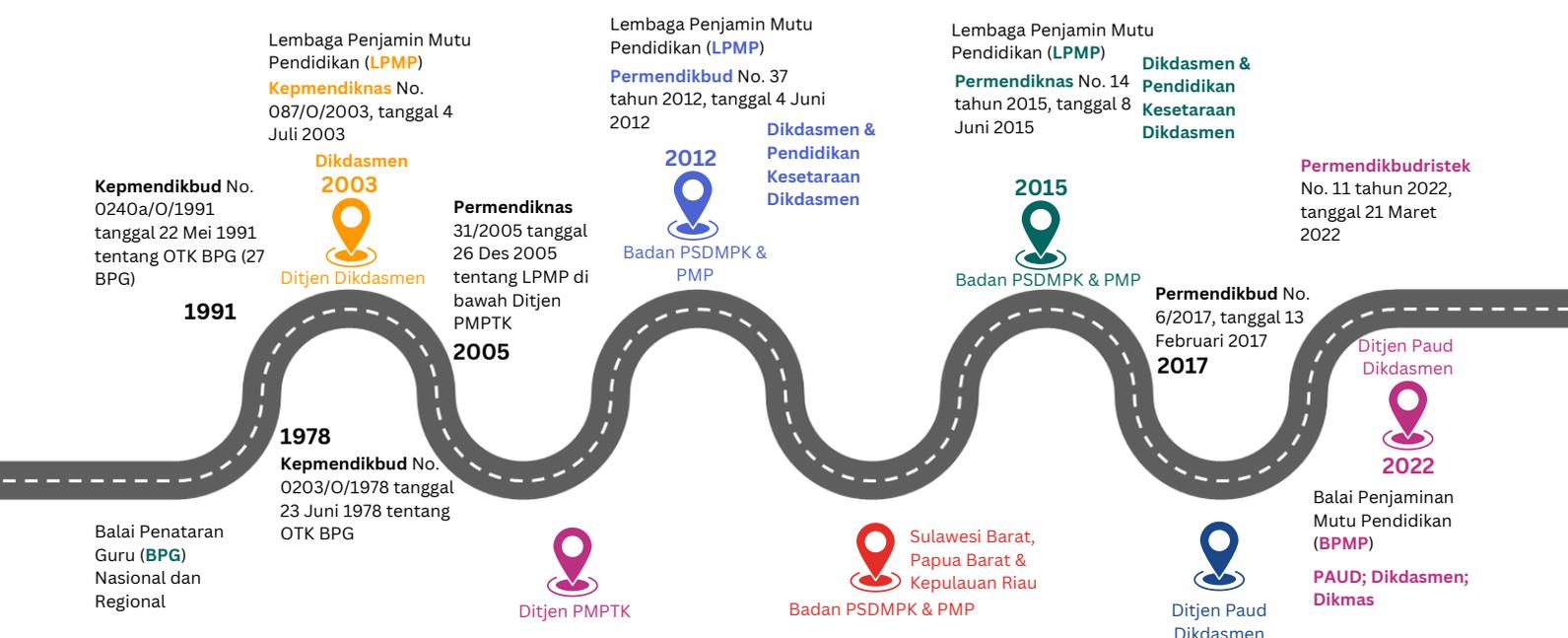
1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pemerataan akses internet, diantaranya Dinas Pendidikan dan DPRD;
2. Melakukan perencanaan kegiatan yang efisien dan berdasarkan prioritas;
3. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi dengan jangkauan yang lebih luas melalui berbagai media sosial dan kanal;
4. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada responden mengenai pentingnya survei, dampak positifnya terhadap perencanaan program, dan kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas hasil;
5. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan: Mendapatkan dukungan dan komitmen lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya survei sebagai alat evaluasi yang efektif;
6. Kolaborasi dan konsultasi: Melibatkan pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan survei, sehingga dapat memperoleh masukan dan dukungan yang lebih baik;
7. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja dalam kurun waktu yang ada;
8. Melaporkan sekaligus merekomendasikan kepada Eselon I agar Kemendikbudristek dan Kemendagri mengirimkan surat edaran bersama yang memudahkan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh Pj. kepala daerah dan hanya menggunakan sistem seleksi melalui aplikasi;
9. Melakukan manajemen risiko yang cermat;
10. Pemutusan kontrak sepihak pada tahun 2023 dan pemilihan ulang di tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pertama kali dibentuk pada 21 Maret 2022. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Warsita, S.S., M.Pd. dengan jumlah SDM sebanyak 59 orang, yang terdiri dari 32 PNS dan 27 PPNPN. Wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melingkupi Satuan Pendidikan jenjang PAUD Dikmas, SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Kepulauan Riau, melingkupi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kep. Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Linimasa: Transformasi BPMP



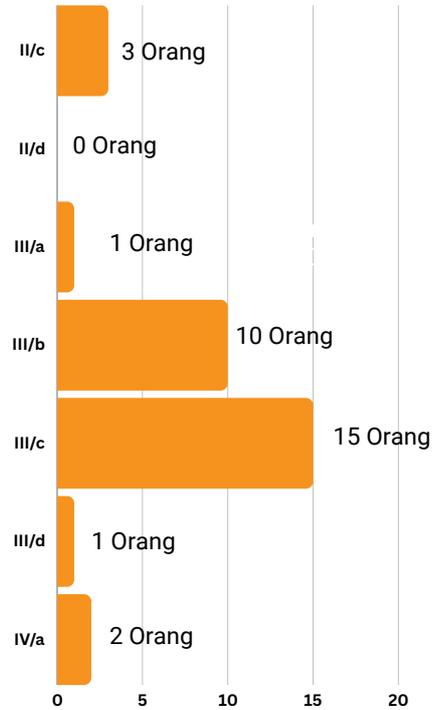
SDM BPMP Prov. Kepulauan Riau



Jumlah Pegawai



Pangkat/Golongan



Pendidikan



Kelas Jabatan



STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA

Strategi pencapaian kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau menggunakan pembagian sistem kerja berdasarkan kelompok kerja yang terdiri dari 4 Kelompok Kerja (Pokja) dan 12 PDM, mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No.19/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka seluruh satuan kerja/UPT perlu melakukan penyesuaian.

KELOMPOK KERJA

Perjanjian Kinerja 2023

KEPALA BPMP

PMO

SK. 01

Ka. Pokja

SK. 02

Ka. Subbag Umum



Pokja 01

PDM 05
PDM 07
PDM 10



Pokja 02

PDM 01
PDM 02
PDM 09



Pokja 03

PDM 04
PDM 06



Pokja 04

PDM 03
PDM 11
PDM 12

Pokja 01 yaitu Komunikasi, Kemitraan dan Pemberdayaan terdiri dari PDM 05 (Kemitraan Daerah), PDM 07 (Publikasi dan Komunikasi) dan PDM 10 (Pemulihan Pembelajaran);

Pokja 02 yaitu Inovasi dan Transformasi Pembelajaran terdiri dari PDM 01 (Program Sekolah Penggerak), PDM 02 (Implementasi Kurikulum Merdeka) dan PDM 09 (Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan);

Pokja 03 yaitu Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas PDM 04 (Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data) dan PDM 06 (Asesemen Nasional); dan

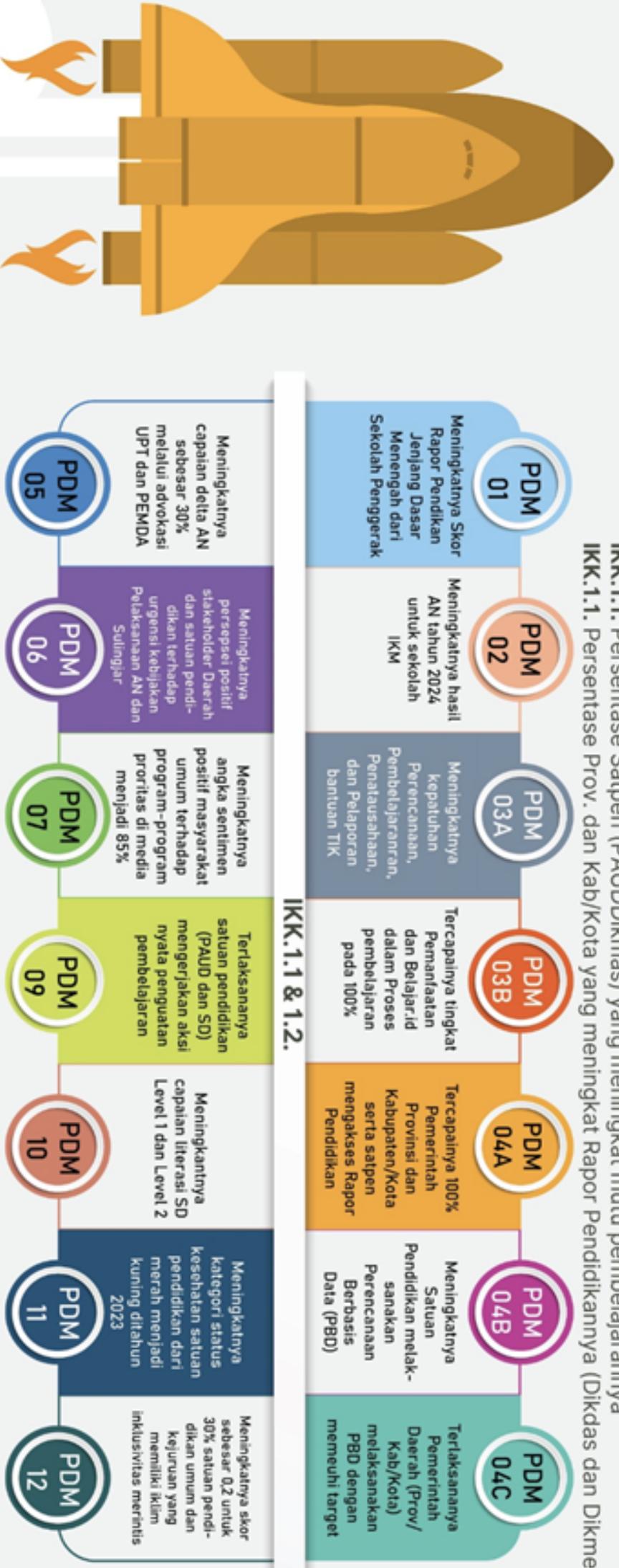
Pokja 04 yaitu Tata Kelola Satuan Pendidikan terdiri dari PDM 03 (Transformasi Digital), PDM 11 (Kampanye Sekolah Sehat), dan PDM 12 (Pendidikan Inklusif).

Peta Strategi Sasaran & Indikator Kinerja

SK 1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

IKK.1.1. Persentase Satpen (PAUDDikmas) yang meningkatkan mutu pembelajarannya

IKK.1.1. Persentase Prov. dan Kab/Kota yang meningkatkan Rapor Pendidikan (Dikdas dan Dikmen)



SK 2. Meningkatkan Tatakelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan Anggaran yang Akurat dan Akuntabel
- Persentase Capaian Kinerja anggaran dari hasil layanan Perencanaan

IKK.2.1.

Predikat SAKIP

BPMP Prov. Kepulauan Riau

IKK.2.2.

- Meningkatnya layanan Subbag Umum
- Persentase Capaian Kinerja tatakelola lembaga melalui hasil layanan urusan perencanaan

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

BPMP Prov Kepulauan Riau

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas :

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas : Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi

Fungsi :

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis di tahun 2023:

Isu-isu Strategis

Peran Strategis

1 Tindak lanjut pelaksanaan Program Sekolah Penggerak angkatan 1 oleh pemerintah daerah

Pendampingan dan advokasi penerbitan regulasi kepada pemangku kepentingan terkait kesinambungan pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan 1 dan pengimbasan program sekolah penggerak dalam rangka pelaksanaan supervisi penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu PAUD Dikmas dan Dikdasmen

2 Advokasi pengangkatan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah

Advokasi kepada Pemda untuk memprioritaskan Guru Penggerak diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, terutama di dalam mengisi kekosongan posisi kepala sekolah dan pengawas sekolah

3 Peningkatan pemanfaatan PMM dan aktivitas komunitas belajar dalam sekolah

Sosialisasi, pendampingan dan pemantauan serta advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan PMM dan aktivitas komunitas belajar dalam sekolah dalam rangka pelaksanaan supervisi penjaminan, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu PAUD Dikmas dan Dikdasmen

4 Miskonsepsi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Pendampingan dan penguatan pemahaman terkait Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam rangka pelaksanaan supervisi penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu PAUD Dikmas dan Dikdasmen

5 Pemanfaatan Chromebook dan akun belajar.id dalam pembelajaran serta Peningkatan Adopsi Platform SDS untuk pengelolaan keuangan satuan pendidikan

Sosialisasi, advokasi, dan pendampingan pemanfaatan Chromebook dan akun belajar.id serta Peningkatan Adopsi Platform SDS untuk pengelolaan keuangan satuan pendidikan dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan PAUD Dikmas dan Dikdasmen

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis di tahun 2023:

Isu-isu Strategis

Peran Strategis

6

Pemulihan dan transformasi pembelajaran pada satuan pendidikan dengan kategori rendah capaian literasi siswa berdasarkan hasil AN

Pendampingan dan fasilitasi kepada Pemda dengan satuan pendidikan sasaran di dalam melaksanakan program pemulihan dan transformasi pembelajaran, berupa Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui Penguatan Literasi; Pendampingan Komunitas Belajar Antar Sekolah; dan Refleksi Pemda

7

Dukungan Pemerintah daerah dalam upaya peningkatan indeks SPM pendidikan

Sosialisasi dan pendampingan penyusunan perencanaan program dan anggaran pendidikan di pemda berdasarkan indikator SPM pada rapor pendidikan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu PAUD Dikmas dan Dikdasmen

8

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain

Advokasi implementasi program/kebijakan merdeka belajar kepada pemangku kepentingan lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat

9

Partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar

Sosialisasi dan Advokasi kepada pemangku kepentingan serta melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar dalam rangka Pemetaan mutu pendidikan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan PAUD Dikmas dan Dikdasmen

10

Konsistensi dan keberlanjutan penerapan ZI/WBK

Pelaksanaan perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2023, peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan berkala, uji publik, perbaikan tata kelola lembaga, serta publikasi informasi dalam rangka pelaksanaan urusan administrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024 hasil reviu tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengemban amanat mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022-2024 adalah "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif."

Misi :

BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sepanjang 2022, terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga terjadi perubahan nomenklatur UPT di lingkungan PAUDDasmen, yaitu dari LPMP menjadi BPMP.

Sesuai dengan perubahan nomenklatur tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel Renstra Satker Periode LPMP (2020-2022)

	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	SK			
1.1	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	IKK	25	30	35
2.0	Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	SK			
2.1	Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	A	A	A
2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	83	84	85

Tabel Renstra Satker Periode BPMP (2022-2024)

	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	SK			
1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya di Provinsi Kepulauan Riau	IKK	0.98	1,96	3,92
1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	IKK	25	30	35
2.0	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	SK			
2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	A	A	A
2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	83	84	85

TUJUAN STRATEGIS

Sebelum Sesudah

Tujuan

Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

Terwujudnya tata Kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas

indikator kinerja tujuan

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Target 2024

25 %

A

Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran

Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran di Lingkungan BPMP Provinsi Kepulauan Riau

indikator kinerja tujuan

Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Target 2024

75 %

A

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	84

Pada tahun 2023 terjadi revisi PK dikarenakan perubahan anggaran dengan tidak mengubah sasaran dan indikator kinerja kegiatan, serta target perjanjian kinerja, sebagai berikut:

Kode dan Nama kegiatan	Anggaran pada Perjanjian Kinerja awal tertanggal 30 Januari 2023	Anggaran pada Perjanjian Kinerja akhir tertanggal 18 Desember 2023
6397.Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	10.995.190.000	10.050.536.000
2005.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	8.977.695.000	7.528.594.000
TOTAL	19.972.885.000	17.579.130.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	7,15	1,96	2,14	109,18
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	30	87,50	291,67
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A	A	A	100
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	98,91	84	96,40	115,28

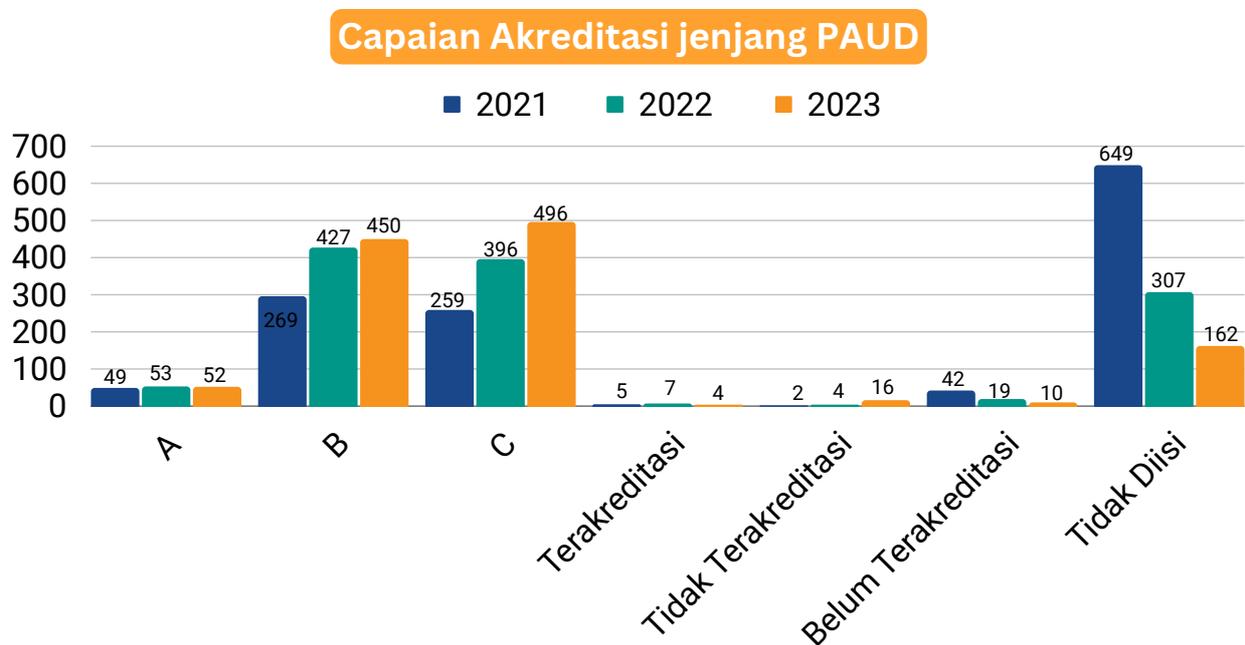
Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

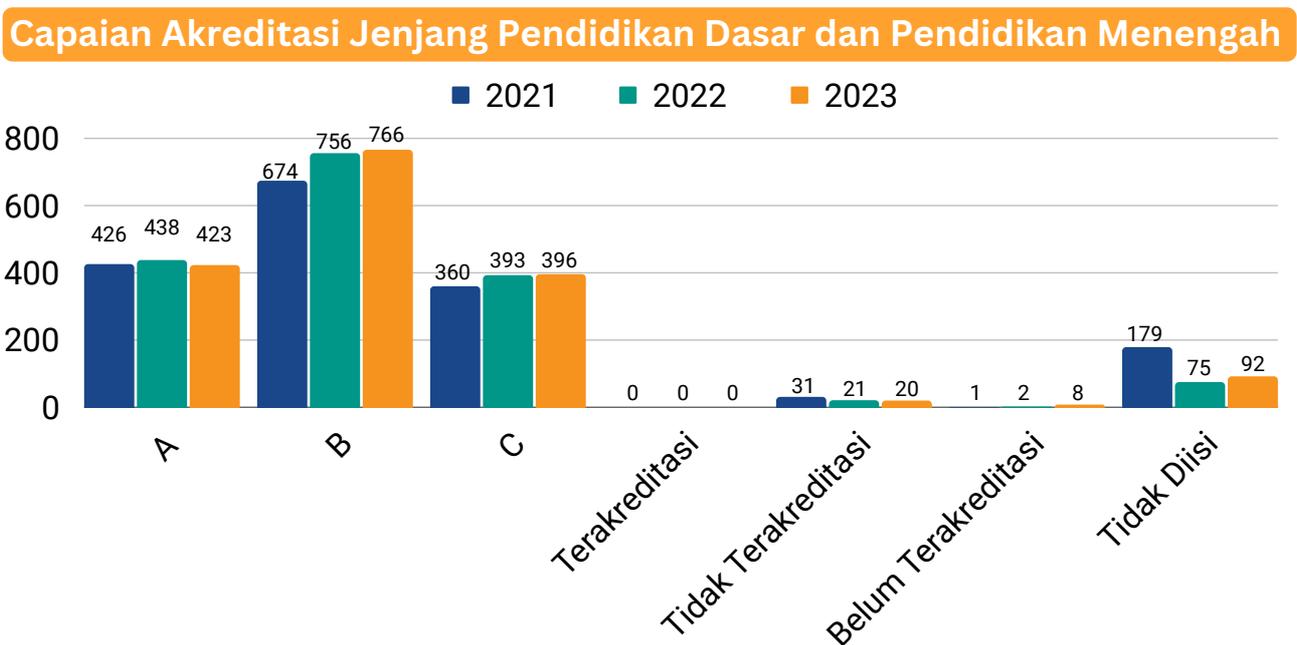
Salah satu alat ukur ketercapaian sasaran kinerja 1 (SK.1) Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen adalah melalui perbandingan nilai masing masing satuan pendidikan yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan mutu jenjang PAUD dan Pendidikan Masyarakat menggunakan data hasil akreditasi tahun 2021-2023 yang bersumber dari data Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Data akreditasi dijadikan dasar dalam pengukuran capaian kinerja karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu.

Peningkatan mutu jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan data hasil rapor pendidikan tahun 2021-2022 yang bersumber dari asesmen nasional yang diolah oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

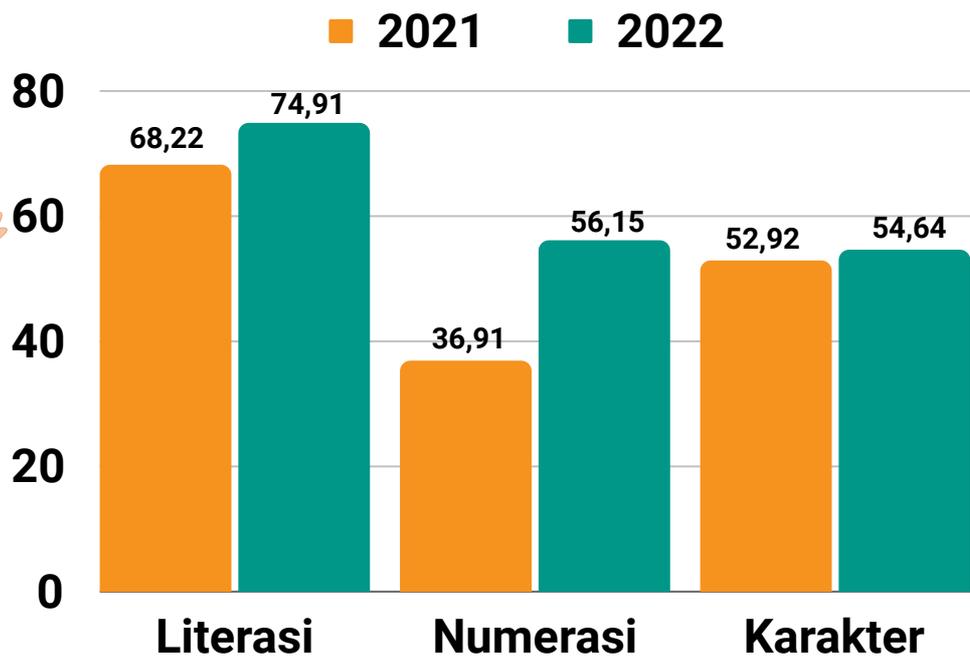


Sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember)



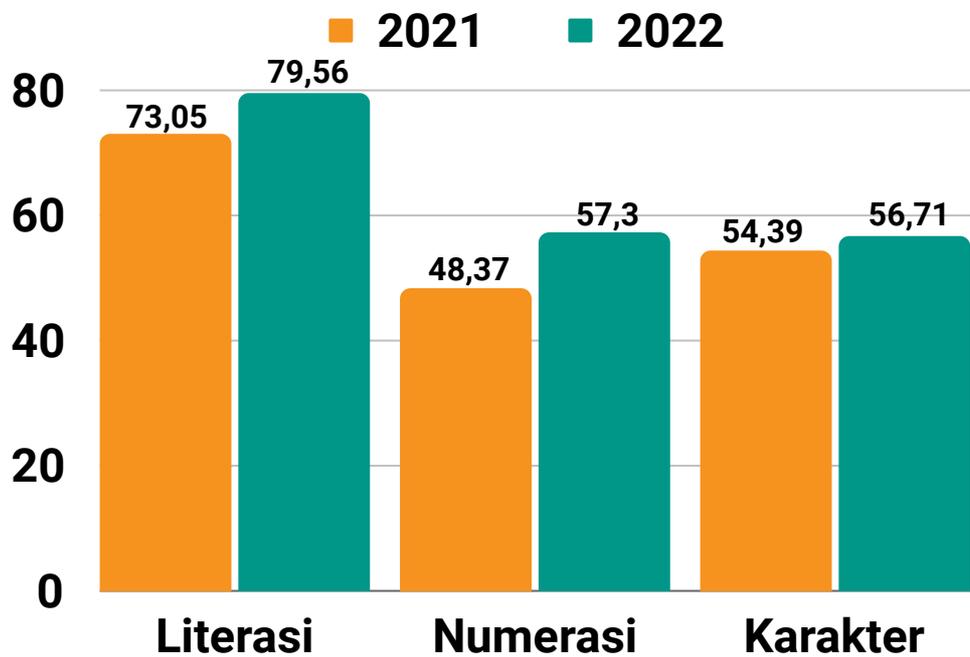
Sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember)

Capaian Literasi, Numerasi dan Karakter Jenjang SD



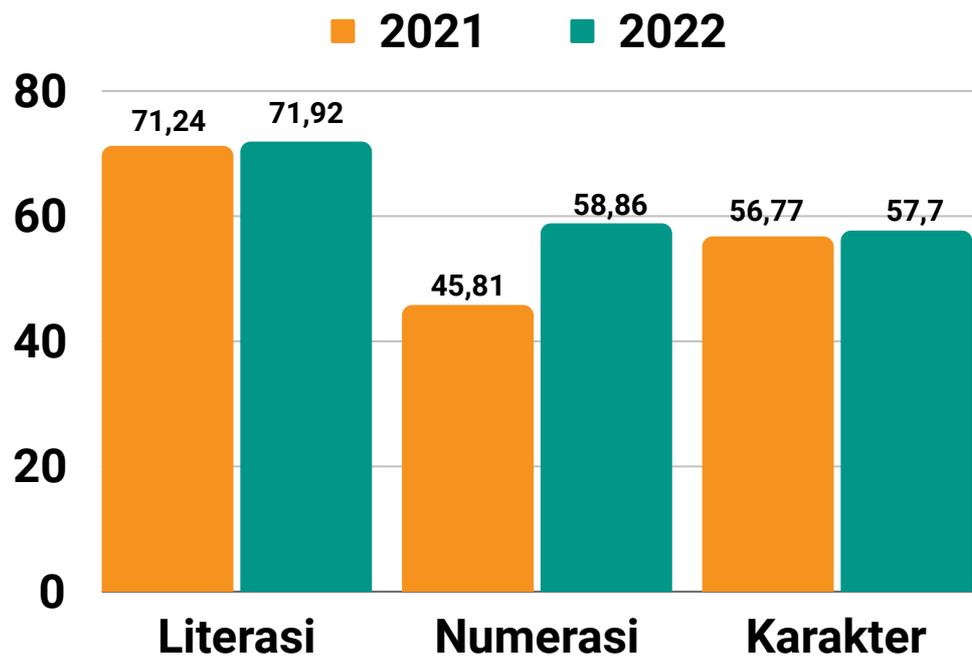
Sumber : Data Platform Rapor Pendidikan

Capaian Literasi, Numerasi dan Karakter Jenjang SMP



Sumber : Data Platform Rapor Pendidikan

Capaian Literasi, Numerasi dan Karakter Jenjang SMA



Sumber : Data Platform Rapor Pendidikan

Indikator Kegiatan 1.1

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja

$$IKK\ 2.2.7.11\ (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{total\ sekolah\ TA\ 2022} - \frac{(0,5 \times A_{21}) + (0,35 \times B_{21}) + (0,15 \times C_{21})}{total\ sekolah\ TA\ 2021}$$

Keterangan :

1. Δ : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang dilihat dari nilai akreditasi
2. A_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022
3. B_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022
4. C_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022
5. A_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2021
6. B_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2021
7. C_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2021

Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Nasional		2024	
	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
7,15	1,96	2,14	109,18	2,60	82,31	3,92	54,59

Dari grafik Capaian Akreditasi jenjang PAUD Tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat kenaikan jumlah sekolah yang memperoleh akreditasi A dan B, dan semakin berkurang satuan pendidikan yang tidak mengisi, artinya semakin banyak satuan pendidikan yang sadar akan pentingnya manajemen/tata kelola satuan pendidikan yang baik.

Indikator Kegiatan 1.2

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Persentase dari provinsi / kabupaten / kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor Pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja

$$IKK2.2.7.12 = \sum_{i=1}^n flag(\Delta_i)$$

Keterangan :

1. i : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP bersangkutan
2. $flag(\Delta_i)$: Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

Capaian Indeks SPM Tahun 2021 s.d. 2022 Kabupaten/Kota/Provinsi di Kepulauan Riau

Wilayah	Indeks SPM 2021	Indeks SPM 2022	Delta kenaikan
 Prov. Kepri	55,99	64,80	8,81
 Bintan	58,62	62,57	3,95
 Karimun	58,81	63,17	4,36
 Natuna	55,84	55,21	-0,63
 Lingga	55,15	58,58	3,43
 Kep. Anambas	57,31	60,34	3,03
 Batam	63,43	72,75	9,32
 Tanjungpinang	63,59	70,67	7,08

Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Nasional		2024	
	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
100	30	87,50	291,67	65,40	133,79	35	250

Capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 sebenarnya tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena menggunakan metode perhitungan dan sumber data yang berbeda. Pada tahun 2022 data rapor pendidikan belum dirilis oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) karena rapor pendidikan dihitung berdasarkan delta antara hasil asesmen nasional tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, sementara asesmen nasional baru mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Oleh karena itu, capaian tahun 2022 dihitung berdasarkan persentase dari wilayah-wilayah yang memiliki 25% (target 2022) kenaikan jenjang akreditasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan capaian tahun 2023 dihitung berdasarkan persentase wilayah yang memiliki kenaikan indeks SPM yang diperoleh dari nilai rapor pendidikan hasil asesmen nasional tahun 2021 dan 2022.



PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET IKK 1.1 DAN IKK 1.2



PDM 01
Program Sekolah Penggerak



PDM 02
Implementasi Kurikulum Merdeka



PDM 03
Transformasi Digital



PDM 04
Rapor Pendidikan dan PBD



PDM 05
Kemitraan Daerah



PDM 06
Asesmen Nasional



PDM 07
Publikasi dan Komunikasi



PDM 09
Transisi PAUD-SD



PDM 10
Pemulihan Pembelajaran



PDM 11
Kampanye Sekolah Sehat



PDM 12
**Transformasi Pendidikan
Kusus/Inklusif**

PDM 01

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Peran

1. Mengkoordinasi seluruh komponen program sekolah penggerak di daerahnya;
2. Mengelola kegiatan Dialog pemangku kepentingan daerah;
3. Mendampingi Pemda dalam menyusun kebijakan, perencanaan berbasis data, dan penganggaran Program Sekolah Penggerak di daerahnya;
4. Mendampingi Pemda dalam implementasi Program Sekolah Penggerak;
5. Mendampingi Pemda dalam evaluasi sistem pendidikan, dan proses monev PSP di daerahnya;
6. Melakukan pendampingan asimetris dan konsultatif kepada pemerintah daerah melalui penyelenggaraan PMO Level Daerah dalam upaya memprogress capaian program SP di daerahnya;
7. Memberikan rekomendasi intervensi tambahan (atau diferensiasi) yang diperlukan di daerahnya;
8. Melakukan kerjasama dengan Pusat dalam menyelesaikan isu yang masuk lewat Helpdesk.

Dampak

1. 89% satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak meningkat rapor pendidikannya pada tahun 2023;
2. 100% pemerintah daerah meningkat level komitmennya pada pelaksanaan program sekolah penggerak dibandingkan dengan tahun 2022;
3. Pemerintah daerah di provinsi Kepulauan Riau juga mendapatkan penghargaan dalam Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek dalam Kategori Pemda Transformatif dalam Transformasi Kebijakan dan Anggaran Tingkat Provinsi;
4. Kota Batam yang menjadi salah satu rujukan bagi daerah kabupaten/kota sebagai pusat studi tiru untuk program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka (Batam.go.id, 2023). Keberhasilan lainnya, berdasarkan 80 perwakilan daerah fokus belajar.id, Kota Batam berada di peringkat ke-5 kategori daerah fokus belajar.id.
5. Beberapa satuan pendidikan penyelenggara program sekolah penggerak mendapatkan apresiasi di tingkat nasional di antaranya:
 - a. Peringkat 5 Kategori Inovatif Tahun 2023 dari Direktorat KSPSTK: Zainuddin, SDN 002 Batu Ampar, Batam;
 - b. Kepala Sekolah Inspiratif Tahun 2023 dari Kemendikbudristek pada Anugerah Merdeka Belajar atas nama Zainuddin, SDN 002 Batu Ampar, Batam;
 - c. SDN 001 Batam Kota meraih Predikat Sekolah Ramah Anak yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
 - d. SLB Kartini Batam terpilih menjadi narasumber berbagi praktik baik pada implementasi Program Sekolah Penggerak di tingkat nasional pada jenjang Pendidikan Khusus;
 - e. Video Berbagi Praktik Baik pada SMPN 28 Batam terpilih sebagai 3 video terbaik di tingkat nasional pada jenjang SMP.

PDM 01

PROGRAM SEKOLAH PENGERAK

Kendala

1. Belum adanya informasi yang jelas mengenai Kesiambungan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan pelaksana di angkatan 1;
2. Belum adanya petunjuk teknis yang mengatur tentang pola pengimbasan;
3. Pendampingan yang dilakukan pada satuan pendidikan masih terbatas melalui kegiatan Forum Pemangku Kepentingan;
4. Belum adanya indikator yang baku dalam mengukur capaian tahapan implementasi program sekolah penggerak.

Solusi

1. Pendampingan dalam penyelenggaraan 5 intervensi PSP diperluas hingga ke tingkat satuan pendidikan;
2. Melakukan pemantauan progres capaian tahapan pelaksanaan sekolah penggerak secara berkala;
3. Penerbitan juknis/juklak kesinambungan PSP Angkatan 1 dan pengimbasan.



Fasilitasi Komunikasi Sekolah Penggerak kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Forum Pemangku Kepentingan



Advokasi Program Sekolah Penggerak pada Kabupaten Kepulauan Anambas

PDM 02

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Peran

Melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan dalam implementasi kurikulum merdeka dan pemanfaatan 6 strategi implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri (Platform Merdeka Mengajar, Komunitas Belajar, Narasumber Berbagi Praktik Baik, Seri Webinar, Helpdesk, dan Mitra Pembangunan). Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kolaborasi bersama mitra dan pemangku kepentingan antara lain:

1. Menyelenggarakan seri webinar Teh Obeng dengan tema: Belajar Bersama Komunitas Belajar;
2. Penyelenggaraan pelatihan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan di Kabupaten Bintan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga, dan Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia;
3. Membuat dasbor pemantauan aktivitas belajar komunitas belajar dalam sekolah;
4. Melakukan piloting komunitas belajar Ramah Guru dalam Sekolah pada Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Dampak

1. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar sebagai sumber belajar dan referensi guru sebanyak 99%;
2. Meningkatnya pemahaman komunitas belajar dalam sekolah di Kepulauan Riau yang berbasis pada murid sebanyak 74%;
3. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka jalur mandiri di Kepulauan Riau sebanyak 57% dan 61,8% secara keseluruhan.

Kendala

1. Jaringan internet tidak menjangkau seluruh daerah sehingga menyulitkan guru untuk mempelajari PMM.
2. Belum semua daerah memiliki anggaran khusus untuk penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop peningkatan kapasitas guru dalam implementasi kurikulum merdeka.
3. Tingkat kesadaran satuan pendidikan dalam pemanfaatan 6 strategi implementasi kurikulum merdeka yang beragam.

Solusi

1. Meningkatkan pelibatan dan keterikatan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi kurikulum merdeka melalui PMO;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target bersama baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
3. Advokasi pemerintah daerah melalui kunjungan kerja pimpinan kepada kepala daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

PDM 02

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA



Fasilitasi Komunikasi Sekolah Penggerak kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Forum Pemangku Kepentingan

PDM 03: TRANSFORMASI DIGITAL

PDM 03 A

PLATFORM SUMBER DAYA SEKOLAH (SDS)

Peran

Melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan terkait Penggunaan Platform Sumber Daya Sekolah untuk pengelolaan keuangan di satuan pendidikan

Dampak

1. Meningkatnya Adopsi Platform SDS (ARKAS, SIPLah) sebagai langkah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan pendidikan;
2. Meningkatnya kepatuhan dalam perencanaan, pembelanjaan, penatausahaan, dan pelaporan dana bantuan operasional satuan pendidikan;
3. Penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) tepat waktu.

Kendala

1. Dalam penggunaan SIPLah di beberapa wilayah kepulauan terkendala dengan keterbatasan penyedia, biaya kirim yang mahal, waktu pengiriman barang yang lama serta keterbatasan jaringan internet;
2. Adanya perbedaan pemahaman komponen penggunaan dana BOSP sehingga dana BOSP tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi

1. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mendorong UMKM di daerahnya untuk bergabung sebagai penyedia di SIPLah;
2. Melakukan pendampingan kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan dalam pengelolaan dana BOSP.

PDM 03: TRANSFORMASI DIGITAL

PDM 03 B

OPTIMALISASI CHROMEBOOK DAN BELAJAR.ID

Peran

Melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan terkait pemanfaatan chromebook dan belajar.id dalam transformasi pembelajaran

Dampak

Terjadinya tranformasi pembelajaran dengan pemanfaatan peralatan TIK (chromebook) dan *Google Workspace for Education* yang tersedia pada akun belajar.id

Kendala

1. Keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah sehingga tidak dapat memanfaatkan chromebook untuk proses pembelajaran;
2. Kemampuan SDM yang belum merata dalam memanfaatkan peralatan teknologi dan informasi.

Solusi

1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk penguatan dan pemerataan akses jaringan internet;
2. Melakukan pendampingan dan webinar untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pemanfaatan chromebook dan belajar.id.

PDM 03: TRANSFORMASI DIGITAL

PDM 03

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi kegiatan ToT Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Platform Sumber Daya Sekolah, Chromebook, dan belajar.id)

Dokumentasi kegiatan Bimtek Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Platform SDS)



Dokumentasi kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook dan belajar.id)

PDM 04

RAPOR PENDIDIKAN DAN PBD

Peran

Melakukan Sosialisasi, Bimtek, advokasi serta pendampingan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Pendampingan dilakukan mulai dari menyusun perencanaan hingga penentuan alokasi anggaran

Dampak

Terciptanya transformasi Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dengan mengembangkan budaya refleksi berbasis data atau kebutuhan.

Kendala

1. Jaringan internet belum merata sehingga ada beberapa satuan pendidikan yang terlambat dalam mengakses rapor pendidikan, hal ini berpengaruh dalam penyusunan perencanaannya
2. Kesadaran stakeholder terkait penggunaan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data belum merata.

Solusi

Berkoordinasi secara intens baik melalui jalur formal maupun informal dengan stakeholder terkait dengan pemanfaatan rapor pendidikan dalam perencanaan di satuan pendidikan dan daerah.



Dokumentasi Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data untuk Satuan Pendidikan Kab. Lingga

PDM 06

ASESMEN NASIONAL

Peran

Melakukan sosialisasi, rapat koordinasi dalam memetakan kesiapan satuan pendidikan baik dari segi sarpras atau kompetensi SDM guna melaksanakan AN di tingkat satuan pendidikan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN.

Dampak

AN dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan POS AN tahun 2023 dan pemahaman akan pentingnya AN dapat diterima oleh stakeholder sehingga hasil AN akan lebih objektif serta dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dan daerah.

Kendala

1. Jaringan internet belum merata sehingga pelaksanaan AN dengan moda online di beberapa daerah tidak dapat dilaksanakan di dalam ruang kelas, dikarenakan harus mencari sinyal yang lebih kuat;
2. Partisipasi siswa belum maksimal, hal ini dikarenakan kondisi wilayah kepulauan dimana siswa berangkat sekolah harus menyeberangi laut.

Solusi

Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar pada saat pelaksanaan AN jaringan internet dan listrik dapat digunakan secara maksimal



Dokumentasi Pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2023

PDM 07

PUBLIKASI

Peran

Melaksanakan penyebarluasan informasi secara terstruktur dan masif terkait kebijakan nasional pendidikan (KMB) agar pemangku kepentingan (terutama Pemda) memiliki persepsi positif, mengadopsi, dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Dampak

Meningkatnya pemahaman dan pengalaman positif pemda serta masyarakat/pemangku kepentingan di dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar.

Kendala

Terdapat kesenjangan pemahaman dan pengalaman berbeda pemangku kepentingan yang berada di wilayah daratan (*mainland*) dan wilayah pedalaman/pulau-pulau (*hinterland*), yang disebabkan terlambatnya penerimaan informasi

Solusi

Membuat jejaring penyampaian informasi berantai dan cepat dengan memanfaatkan berbagai media/kanal serta melakukan pengendalian secara periodik untuk memastikan informasi sampai kepada pemangku kepentingan di wilayah hinterland



Video Advokasi Bertamadun Melayu BPMP Provinsi Kepulauan Riau

PDM 09

TRANSISI PAUD-SD

Peran

1. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada dinas pendidikan untuk kegiatan advokasi dan sosialisasi pada penguatan transisi PAUD -SD. Peran itu meliputi koordinasi dengan pusat yang mencakup dua kegiatan yaitu menetapkan PIC UPT dari pokja inovasi dan transformasi pembelajaran pada keempat workstream transisi PAUD-SD, serta melakukan sinkronisasi rencana kerja UPT dengan rencana kerja PDM;
2. Melakukan sosialisasi dan advokasi yang mencakup dua kegiatan, yaitu mendampingi Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi SE Transisi PAUD-SD agar setiap satuan pendidikan mengetahui 3 perubahan teramat yang perlu dicapai pada tahun ajaran baru, serta mendampingi dinas pendidikan untuk dapat melaksanakan call to action, serta call to action untuk satuan pendidikan;
3. Melaksanakan pemantauan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Membangun kemitraan, yakni melakukan identifikasi mitra dan kegiatan yang akan dilakukan mitra;
5. Mendukung pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh pusat.

Dampak

1. Meningkatnya pemahaman guru terhadap 3 target perubahan gerakan transisi PAUD Ke SD yang menyenangkan diukur dari peningkatan Pemanfaatan Alat bantu gerakan transisi PAUD - SD;
2. Target perubahan pertama (tidak ada tes calistung PPDB) paling banyak diketahui dan diterapkan, namun rasional dari larangan tes calistung belum dipahami;
3. Seluruh pemerintah daerah telah menerbitkan SE gerakan transisi PAUD - SD namun belum dipahami oleh seluruh satuan pendidikan;
4. Seluruh daerah telah membentuk Forum Komunikasi PAUD-SD meskipun belum bergerak secara optimal.
5. Meningkatnya kolaborasi dan telah dilakukannya sinkronisasi program antara UPT, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan.



Sinkronisasi Program Transisi PAUD-SD bersama pemangku kepentingan daerah se-Kepulauan Riau dihadiri oleh Bunda PAUD Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPRD Provinsi Kepulauan Riau



Advokasi dan Penjaringan Mitra Transisi PAUD-SD di Kabupaten Natuna bersama tim PDM 09 Kemdikbudristek disambut oleh Wakil Bupati Natuna serta Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, Forkom, dan perwakilan kepala satpen

PDM 09

TRANSISI PAUD-SD

Kendala

1. Belum optimalnya peran dan fungsi Forum Komunikasi PAUD-SD;
2. Orangtua belum terpapar gerakan transisi PAUD-SD dan makna pengembangan kemampuan fondasi pada anak;
3. Kesulitan akses geografis dan keterbatasan internet;
4. Keterbatasan anggaran dan pergantian kepemimpinan di Dinas Pendidikan yang belum diimbangi dengan mekanisme transfer informasi.

Solusi

1. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan para mitra dan pemangku kepentingan pada gerakan transisi PAUD-SD;
2. Penguatan peran dan pelibatan bunda PAUD dalam kampanye 3 target perubahan transisi PAUD - SD di daerah;
3. Melakukan sinkronisasi program bersama Pokja Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, Himpaudi, IGTKI, para mitra, dan pemangku kepentingan di daerah.



Advokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kabupaten Natuna bersama PDM 09 Pusat disambut oleh Wakil Bupati Natuna



Aksi Nyata Bunda PAUD Kabupaten Bintan dalam Gerakan Transisi PAUD-SD dan Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati Bintan Para Pemangku Kepentingan, seluruh Bunda PAUD Bintan

PDM 10

PEMULIHAN PEMBELAJARAN

Peran

Melakukan advokasi kepada Pemda sekaligus melaksanakan program pemulihan dan transformasi pembelajaran kepada sekolah sasaran melalui bimbingan teknis penguatan literasi, pendampingan komunitas belajar antar sekolah, dan refleksi pemulihan pembelajaran.

Dampak

Meningkatnya kesadaran Pemda dan kemampuan sekolah dalam membenahi literasi melalui pembelajaran, asesmen, dan lingkungan belajar, serta berkembangnya komunitas belajar antar sekolah di sekolah sasaran.

Kendala

Terbatasnya sasaran advokasi kepada Pemda dan sekolah yang disebabkan belum proporsionalnya jumlah pemda/sekolah sasaran yang perlu diintervensi dengan sumber daya (anggaran) yang tersedia.

Solusi

Berkolaborasi dengan UPT Kemendikbudristek (BGP, Kantor Bahasa) dan mitra untuk melakukan intervensi pemulihan dan transformasi pembelajaran



Dokumentasi Bimbingan Teknis Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran di Kota Batam

PDM 11

KAMPANYE SEKOLAH SEHAT

Peran

1) Sosialisasi, advokasi, dan publikasi, 2) Optimalisasi peran Tim Pembina UKS, 3) Pembinaan dan pendampingan ke satuan pendidikan, 4) Kemitraan, 5) Monitoring dan evaluasi

Dampak

1. Terbitnya Surat Edaran (SE) tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat
2. Meningkatnya kategori status kesehatan pada sekolah binaan program kampanye sekolah sehat tahun 2023
3. Terjadinya pembudayaan pola hidup sehat di satuan pendidikan sehingga status kesehatan meningkat dan proses serta hasil belajar peserta didik meningkat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan mitra pemerintah (Tim Pembina UKS yang terdiri dari Biro Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) dalam dukungan implementasi program kampanye sekolah sehat di daerah

Kendala

1. Keterlambatan pelaksanaan beberapa aktivitas dan program oleh pusat dari jadwal yang telah direncanakan sehingga berdampak negatif pada optimalitas program
2. Peran tim pembina UKS di daerah belum berjalan optimal
3. Kurangnya dokumentasi/laporan mitra pemerintah dalam dukungan implementasi 3 sehat

Solusi

1. Memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan dan sekolah binaan dalam implementasi program KSS
2. Melakukan advokasi optimalisasi peran tim pembinaan UKS



Advokasi Optimalisasi Peran Tim Pembina UKS dalam Implementasi Kampanye Sekolah Sehat



Sosialisasi program Kampanye Sekolah Sehat kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan PMO Level Daerah Periode Mei 2023

PDM 12

PENDIDIKAN INKLUSIF

Peran

1. Melakukan analisa komitmen pemda dalam regulasi, anggaran dan kelembagaan terkait pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di daerah
2. Melakukan pendampingan dan advokasi terkait pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di daerah
3. Melakukan manajemen risiko dan isu
4. Menggalang mitra pembangunan di daerah terkait pendidikan khusus dan pendidikan inklusif
5. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, monitor, dan umpan balik pemda dan satuan pendidikan dalam program kerja Transformasi Pendidikan Khusus

Dampak

1. Terbentuknya tim pelayanan pendidikan inklusif di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Terbentuknya Rintisan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Terbentuknya pemahaman pentingnya kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.
4. Tersusunnya rancangan kebijakan pendidikan inklusif di daerah yang dituangkan dalam regulasi pendidikan daerah seperti dalam draf peraturan bupati pada kabupaten anambas dan kabupaten lingga
5. Meningkatkan level komitmen pemerintah daerah dalam imolementasi program pendidikan inklusif.

Kendala

1. Adanya miskonsepsi pendidikan inklusif di pemerintah daerah
2. Belum adanya kesadaran, komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait pentingnya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan reguler.
3. Belum tersedianya anggaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah, khususnya dalam ketersediaan AYL (Akomodasi Yang Layak) dan ULD di daerah.
4. Ketersediaan GPK (Guru Pembimbing Khusus) yang belum merata pada setiap daerah dalam mendukung program pendidikan inklusif.

Solusi

1. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah tentang konsep pendidikan inklusif
2. Pendampingan dan advokasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif kepada pemda melalui UPT.
3. Pendampingan kepada pemerintah daerah terkait AYL, ULD dan program kerja dan anggaran.

PDM 12

TRANSFORMASI PENDIDIKAN KHUSUS / INKLUSIF



Sosialisasi program Transformasi Pendidikan Khusus/Inklusif kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan PMO Level Daerah Periode Mei 2023



Pendampingan implementasi pend khusus/inklusif pada kab/kota dan provinsi di Kepulauan Riau

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ditandai dengan pencapaian predikat SAKIP BPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dan pencapaian nilai kinerja anggaran yang mencapai target. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut.

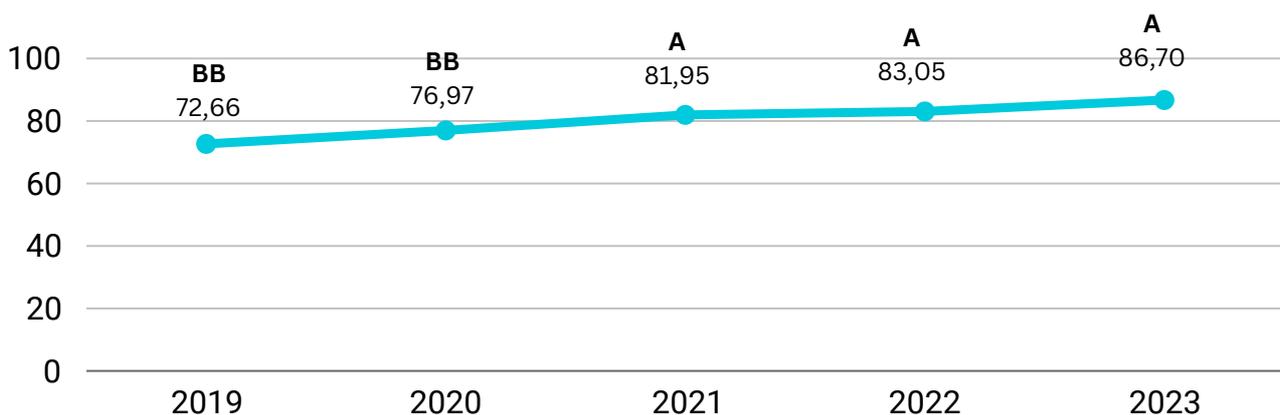
Indikator Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memantau ketercapaian target instansi dan memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam merancang program dan kegiatan. Implementasi SAKIP mendorong dan menjadi acuan instansi dalam pemberian reward dan punishment yang dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Sakip berasal dari nilai pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*oriented result government*).



Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			2024	
	Target	Realisasi	%	Target	%
A	A	A	100	A	100

Besaran anggaran untuk mencapai target SAKIP BPMP Provinsi Kepulauan Riau mengambil baseline anggaran layanan umum pada program dukungan manajemen dengan realisasi sebagai berikut:

PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
Rp 375.000.000	Rp 374.625.814	99,90

Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Laksana:

- **Penyusunan SKP yang merupakan cascading dari PK Kepala**

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai merupakan cascading dari Perjanjian Kinerja Kepala. Dalam penyusunannya dilaksanakan melalui dialog kinerja dari antara pimpinan dengan pegawainya masing-masing dan dilaksanakan dengan membagi habis seluruh peran hasil.



- **Pelaksanaan layanan kepegawaian**

Tahun 2023 pelaksanaan mutasi jabatan dilakukan baik secara lintas satker maupun di lingkungan internal. Pelaksanaan mutasi internal dalam rangka penyesuaian peta jabatan sesuai dengan Kepmendikbudristek 207/O/2023 tentang Kelas Jabatan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dimana kesempatan ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk pengembangan profesionalisme. Pelaksanaan mutasi eksternal pada tahun 2023 1 orang pegawai pelaksana yang promosi menjadi Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Papua

Dalam upaya peningkatan profesionalisme dan Core Value BerAKHLAK , salah satu upaya internalisasi ini adalah dengan memberikan reward dan punishment untuk pegawai dimana mekanismenya telah ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 090/C7.9/KP.04.01/2022 Tentang Perubahan Surat Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 090 /C7.9/KP.04.01/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang didasarkan melalui instrumen dan juga data penilaian kinerja individu dan data kehadiran pegawai. Pegawai yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan tata cara pemberian penghargaan maka akan diberikan reward sementara pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dilaksanakan pembinaan oleh atasan langsung



- **Workshop Jurnalistik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah menjadi landasan hukum yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan tentang pengelolaan dan penyediaan informasi yang baik. BPMP Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyediakan informasi tersebut dan menglorifikasi kebijakan Merdeka Belajar. Regulasi yang dibuat untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar harus disampaikan kepada seluruh stakeholders di bidang pendidikan, termasuk siswa, pendidik, dan masyarakat luas, agar mendapatkan informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, dan peluang belajar yang tersedia. Dengan demikian, Pemerintah Daerah, Sekolah, Guru dan Orang tua dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan.

Namun, untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program seperti merdeka belajar secara efektif, diperlukan kompetensi jurnalistik media massa yang memadai. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menyajikan informasi secara akurat, jelas, dan menarik, sambil memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Workshop Jurnalistik untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang publikasi dan komunikasi merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan ini. Pelatihan ini dapat membantu para profesional dan praktisi media dalam memahami prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, etika jurnalistik, serta teknik penyajian informasi yang efektif. Selain itu, pelatihan ini juga dapat membantu mereka dalam memahami konteks dan nuansa kebijakan Merdeka Belajar, sehingga mereka dapat mengkomunikasikan kebijakan ini kepada publik dengan cara yang membangun pemahaman dan dukungan.

Pelatihan pengembangan SDM dalam kompetensi jurnalistik media massa menjadi langkah strategis untuk menglorifikasi kebijakan ini, dengan memastikan bahwa informasi disampaikan secara efektif, akurat, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.

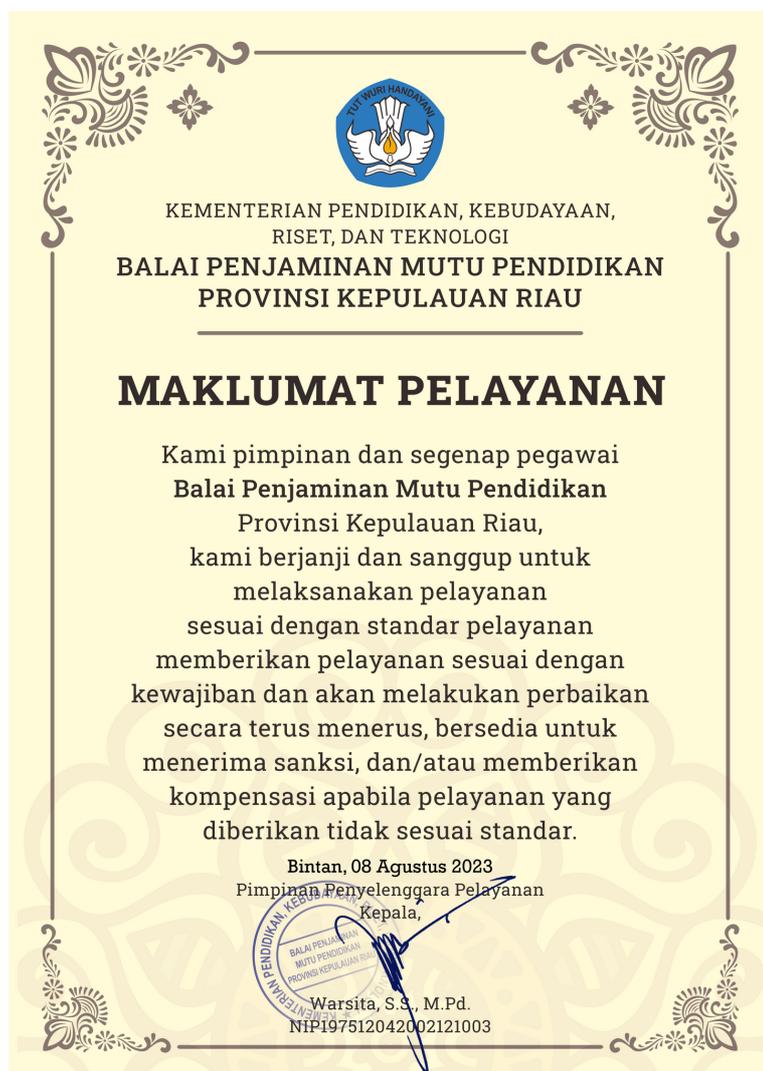


- **Pengelolaan Tatalaksana**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan penataan tatalaksana yaitu dengan penerapan prosedur operasional tetap (SOP) yang mengacu kepada proses bisnis lembaga dan telah dievaluasi. Terkait dengan prosedur kerja ini, BPMP Provinsi Kepulauan Riau juga telah memangkas langkah kerja. Hal tersebut merupakan dampak dari perubahan organisasi dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). dalam hal Pemanfaatan SPBE, BPMP Provinsi Kepulauan Riau juga telah membangun berbagai aplikasi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas lembaga. aplikasi terbaru yaitu terkait dengan pemantauan komunitas belajar guru.

BPMP Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan sebagai target layanannya melalui keterbukaan informasi publik, dengan bertanggungjawab secara transparan dan akuntabel. Standar Pelayanan juga telah dilakukan uji publik dan ditetapkan oleh kepala. Hal tersebut untuk memberikan kepastian kualitas layanan kepada seluruh stakeholder.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami pimpinan dan segenap pegawai
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau,
kami berjanji dan sanggup untuk
melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan
memberikan pelayanan sesuai dengan
kewajiban dan akan melakukan perbaikan
secara terus menerus, bersedia untuk
menerima sanksi, dan/atau memberikan
kompensasi apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai standar.

Bintan, 08 Agustus 2023
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
Kepala,


Warsita, S.S., M.Pd.
NIP197512042002121003

2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

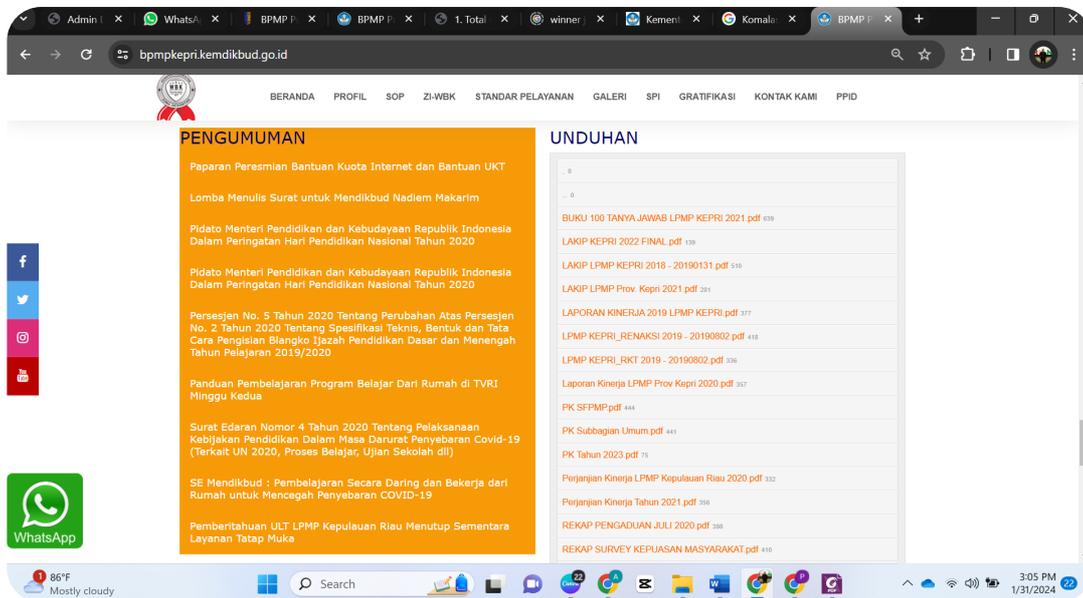
- Penyusunan laporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu
Laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 disusun setiap semester dan disampaikan kepada eselon I dan KPPN Tanjungpinang tepat waktu. Laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 disusun secara komprehensif dan menyeluruh termasuk laporan BMN tahun bersangkutan serta disusun secara akurat akuntabel dengan melakukan reviu/telaah laporan keuangan oleh tim SPI BPMP Provinsi Kepulauan Riau.



- Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Keuangan dan BMN
Kegiatan yang melibatkan Pegawai BPMP kepri dengan melibatkan Narasumber dari KPPN Tanjungpinang Bapak Saepuloh dan Bapak Royhul Akbar yang bertujuan meningkatkan Kapasitas SDM dalam memahami Perdirjen Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata cara monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian/lembaga. Pegawai memahami bagaimana mekanisme atau Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran sesuai PER-10/PB/2023 dan adanya sosialisasi terhadap mekanisme baru pembayaran kontraktual sesuai dengan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang belum diselesaikan Akhir tahun anggaran menggunakan RPATA (Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran).



- Publikasi rencana, berita, dan evaluasi kinerja lembaga pada laman dan media sosial resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Publikasi dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah menjadi landasan hukum yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan tentang pengelolaan dan penyediaan informasi yang baik.



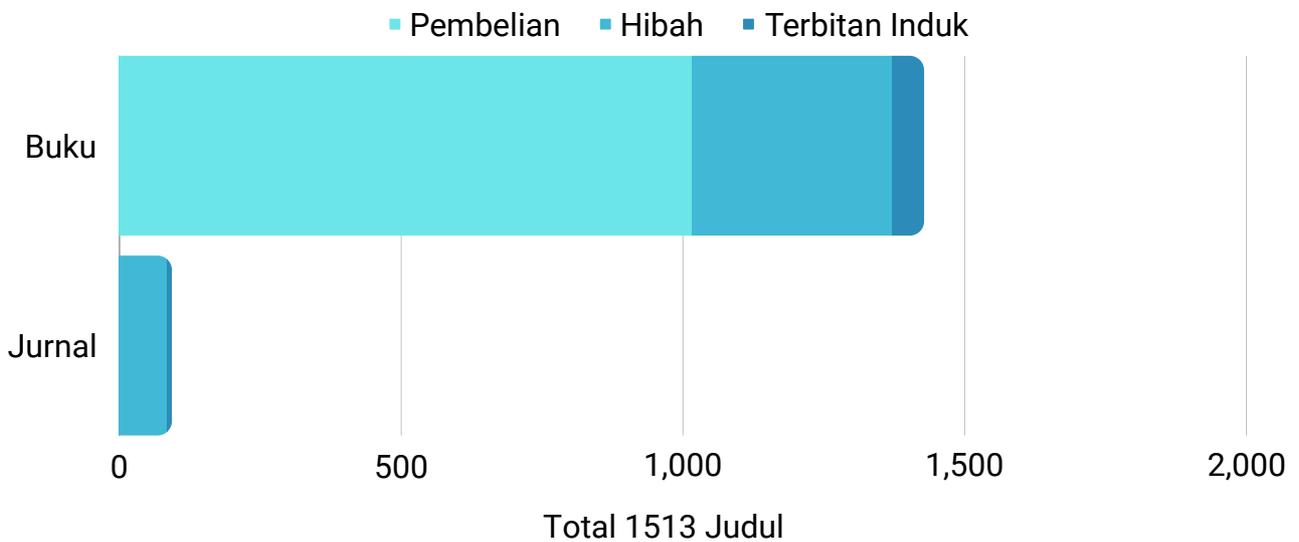
- Peningkatan fasilitas pengelolaan data dan informasi juga diperoleh melalui transfer masuk aset berupa Mini Komputer dengan merk Huweii HWY049 tahun perolehan 2023 dari Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 4482 /J1/LK.01.02/2023.



Serah terima mini komputer dari Pusdatin yang diterima oleh pengelola BMN BPMP Prov. Kepulauan Riau

- Pengelolaan perpustakaan

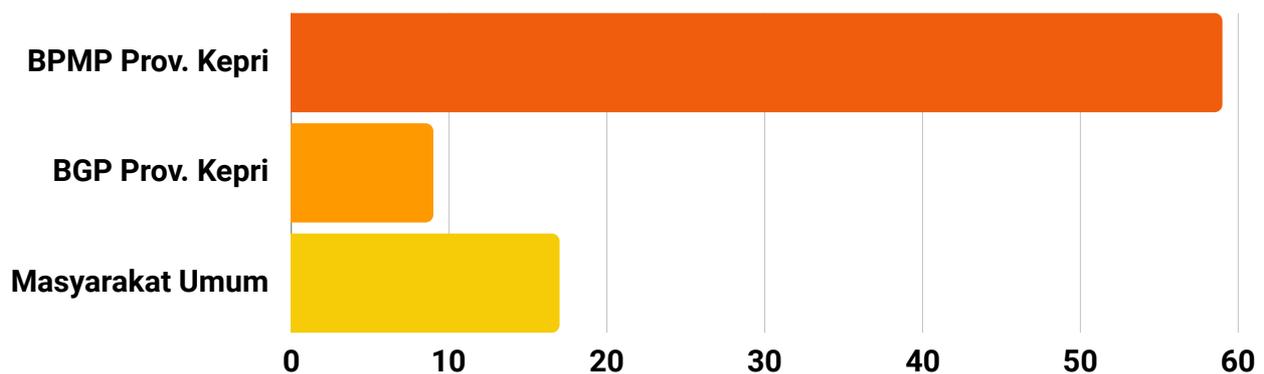
Saat ini koleksi perpustakaan BPMP Prov. Kepulauan Riau adalah 1513 judul dengan 3401 eksemplar, berikut rincian koleksi perpustakaan BPMP Prov. Kepulauan Riau.



Saat ini Penambahan koleksi hanya dari hibah dan baru satu kali dilakukan pengadaan koleksi yaitu tahun 2019, dengan total, 1309 judul.

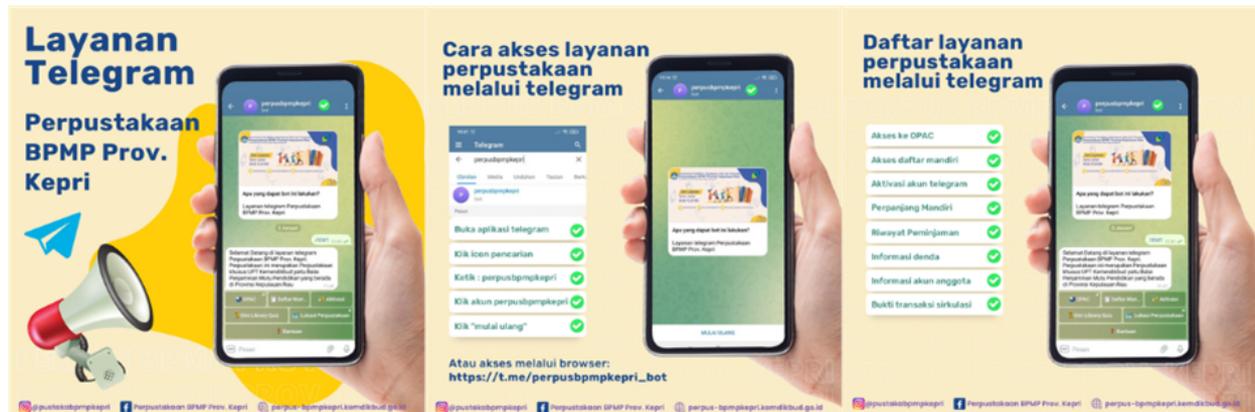
Pada akhir tahun 2023, perpustakaan BPMP Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan sumbangan modul kurikulum merdeka sejumlah 123 judul dengan 366 eksemplar.

Anggota perpustakaan BPMP Prov. Kepulauan Riau saat ini berjumlah 85 orang, anggota berasal dari kantor BPMP dan unit UPT Kemendikbudristek di lingkungan kantor BPMP serta masyarakat umum.



Total jumlah anggota perpustakaan 85 orang

Perpustakaan BPMP Prov. Kepulauan Riau, dalam pengelolaannya menggunakan sistem automasi perpustakaan SLiMS. Sistem sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti pengembangan fitur Bot Telegram untuk perpanjang masa pinjam koleksi secara mandiri oleh anggota perpustakaan, sehingga anggota perpustakaan tidak perlu datang ke untuk melakukan perpanjangan.



Tautan : https://t.me/perpusbpmpepri_bot

Melalui Bot Telegram tersebut, anggota perpustakaan juga bisa melihat riwayat peminjaman, denda, bukti transaksi pengembalian dan peminjaman. Selain itu, perpanjangan koleksi secara mandiri juga bisa dilakukan melalui laman web perpustakaan.

Selain itu, terdapat kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti:

a. Pencapaian Zona Integritas – WBK

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (BPMP Prov. Kepri) ditetapkan sebagai unit pelayanan berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2022 tertuang dalam piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1456/A.A6/HM.02.01/2023 tanggal 13 Januari 2023. Keberhasilan dalam membangun pelayanan di unit kerja baik internal maupun eksternal. BPMP Prov. Kepri berperan dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM), dimana salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan peningkatan kualitas dan pengelolaan segala aspek birokrasi di internal BPMP Provinsi Kepulauan Riau terhadap layanan mutu dan di wilayah (7 kab/kota dan Provinsi).

b. Layanan Fasilitas Gedung

Peningkatan pelayanan dalam penggunaan dan layanan fasilitas BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan sebagai kantor oleh BAN S/M, BAN PAUD, Kantor Bahasa, dan BGP Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pasal 23 ayat (2) berbunyi bahwa "BAN Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat".



Selain itu, UPT Kemendikbudristek yang lain (BGP Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Bahasa) juga belum memiliki gedung perkantoran, sehingga menggunakan sarana prasarana BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, BPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan transfer keluar aset BMN berupa gedung perkantoran dan peralatan mesin yang sebelumnya digunakan oleh BGP Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor BAST 1377/C7.9/LK.00.01/2023.

c. Fasilitasi Penanggulangan Bencana

Tim SPAB BPMP Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan misi kemanusiaan di bidang Pendidikan dengan Program Dukungan Psikologi Awal Untuk Peserta Didik Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor yang terjadi di Pulau Serasan Kab. Natuna, Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) BPMP Prov. Kepri berkolaborasi dengan BGP, dan Dinas Pendidikan Kab. Natuna untuk melaksanakan Program Dukungan Psikologi Awal (DPA) untuk peserta didik yang terdampak bencana. Tidak hanya melaksanakan Program DPA, Tim SPAB BPMP Prov. Kepri Juga melakukan pendataan terhadap warga sekolah yang menjadi korban dan terdampak langsung bencana tanah longsor di Serasan, Kab. Natuna.



d. PNBP

Jumlah Pendapatan (PNBP) tahun anggaran 2023 Rp. 101.719.895. Pendapatan tersebut terdiri dari sewa gedung/pemanfaatan BMN BPMP Provinsi Kepulauan Riau dan denda/pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, sebagai berikut:

Jenis PNBP	Jumlah
Sewa Lab Komputer Oleh KPU Kab. Bintan	6.000.000
Sewa Asrama dan Aula Oleh YPKI	10.050.000
Sewa Asrama Oleh BGP Prov Kepri	5.850.000
Sewa Asrama, Ruang Kelas, dan Ruang Makan Oleh Disperindag Provinsi Kepulauan Riau	4.300.000
Sewa Aula Oleh Baznas Provinsi Kepulauan Riau	1.500.000
Sewa Aula Oleh Dinkes Kab. Bintan	1.500.000
Sewa Kelas Oleh BPSDM Provinsi Kepulauan Riau Pada Penyelenggaraan PKA Tahun 2023 Tahap II	1.800.000
Sewa Kelas Oleh BPSDM Provinsi Kepulauan Riau Pada Penyelenggaraan PKA Tahun 2023 Tahap I	3.900.000
Sewa Asrama Oleh BPSDM Provinsi Kepulauan Riau Pada Penyelenggaraan PKA Tahun 2023 Tahap I dan II	42.000.000
Sewa Aula oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Bintan	3.000.000
Sewa Kelas oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Bintan	600.000
Sewa Aula oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Bintan	1.500.000
Sewa Asrama BPMP Provinsi Kepulauan Riau Oleh Forum Bela Negara	9.450.000
Sewa Kelas BPMP Provinsi Kepulauan Riau Oleh Forum Bela Negara	1.200.000
Denda belanja Pemeliharaan	3.683.395
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium SPK	5.386.500

e. Pemberian Reward dan Punishment kepada pegawai

- Reward



**Kemendikbudristek
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Reni Indra, S.Sos., M.Pd

sebagai

Pegawai Berprestasi
di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

Bintan, 01 Juni 2023
Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Warsita S.s.,M.Pd
NIP.197512042002121003



berAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Berkeadilan | Kompeten | Harmonis | Loyal | Sadar | Inovasi



**bangga
melayani
bangsa**



e. Pemberian Reward dan Punishment kepada pegawai

- Punishment



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan Tata Bumi Km 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29153
Telepon (0771) 4442196, Laman <https://bpmpepri.kemdikbud.go.id>

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

Nomor : 1486/C7.9/RT.04.03/2023

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : Irfaria Putra Irba
NIP : 419511 015
Jabatan : Pramubakti
Unit Kerja : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
untuk menghadap kepada
Nama : Hendri Putra, S.Pd.
NIP : 197502132002121002
Pangkat : Penata Tk. I/III/d
Jabatan : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
pada
Hari : Jumat ,
Tanggal : 15 Desember 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
atas hasil penilaian evaluasi penilaian Tahun Anggaran 2023

2. Demikian untuk dilaksanakan.

(Kepala)
Wanita, S.S., M.Pd.
NIP. 197512042002121003

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 249 Ayat 7, bahwa Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan proporsi pada tahun 2023 EKA:IKPA = 50:50, hal ini berbeda pada perhitungan NKA pada tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan proporsi EKA:IKPA = 60:40.

NKA
96,40

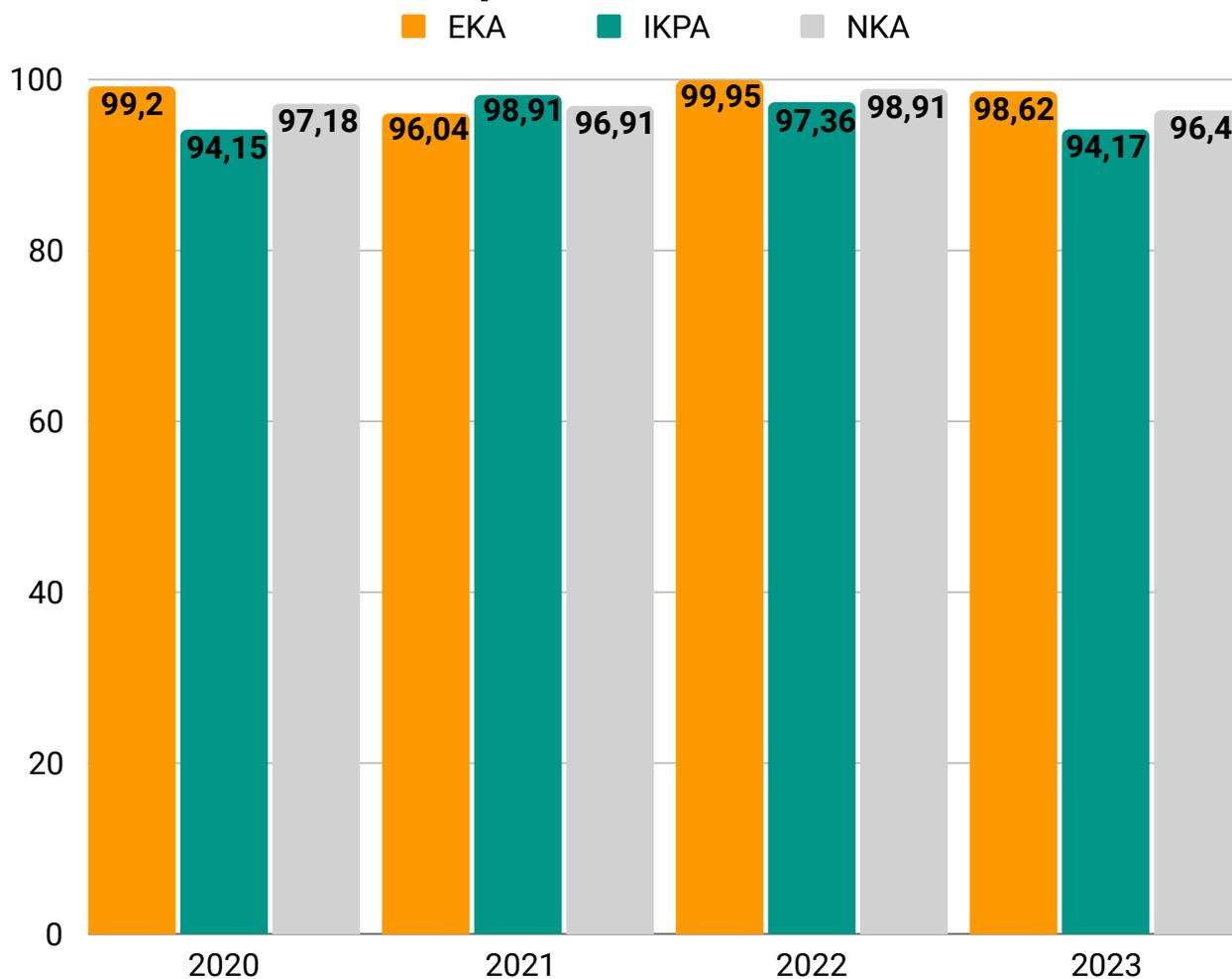
EKA: 98,62

- PMK No 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga.
- Diambil dari aplikasi Smart DJA
- proporsi penilaian 50%

IKPA: 94,17

- PMK No 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ lembaga
- Indikator yang ditetapkan Oleh Kemenkeu selaku BUN
- Diambil dari Aplikasi OM-SPAN
- proporsi penilaian 50%

Capaian NKA 2023



Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			2024	
	Target	Realisasi	%	Target	%
98,91	84	96,40	115,28	85	113,92

Besaran anggaran mengambil baseline anggaran layanan perkantoran dan layanan sarana internal pada program dukungan manajemen dengan realisasi sebagai berikut:

KETERANGAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
layanan perkantoran	9.625.536.000	9.625.224.889	100
layanan sarana internal	50.000.000	50.000.000	100
TOTAL	9.675.536.000	9.675.224.889	100

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nilai Kinerja tsb adalah:

1. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada tahun 2023:

Tanggal	Jumlah	Keterangan
30 November 2022	19.972.885.000	DIPA AWAL
29 Desember 2022	19.972.885.000	Revisi DJA terkait pembukaan blokir anggaran belanja barang untuk pengadaan konsultan
10 Maret 2023	19.972.885.000	Revisi DJA terkait penyesuaian/pergeseran Blokir Anggaran Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2023
17 April 2023	19.972.885.000	Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.
13 Juli 2023	19.972.885.000	Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.
18 Juli 2023	19.444.741.000	Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja pegawai terkait Surat Menteri Keuangan No S-557/MK.02/2023 tentang Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023 tanggal 7 Juli 2023
18 Agustus 2023	19.444.741.000	Revisi DJA Tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S254/MK.2/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Relaksasi Blokir untuk Kegiatan Prioritas (Pemulihan Pembelajaran)
26 September 2023	19.028.231.000	Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja pegawai untuk pemenuhan Belanja Operasional ke Ditjen Kebudayaan
10 Oktober 2023	17.579.130.000	Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja barang (realokasi anggaran blokir Automatic Adjustment (AA) ke BA BUN)
17 Oktober 2023	17.579.130.000	Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.
23 November 2023	17.579.130.000	Revisi Kanwil dengan pagu anggaran tetap, akan tetapi ada pergeseran pagu anggaran belanja pegawai ke belanja barang sebesar Rp 209.272.000
27 Desember 2023	17.579.130.000	Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.

2. Melakukan percepatan belanja,
3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,
4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ketidaksesuaian daya serap sesuai dengan peraturan keuangan, dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
2. Terdapat pagu blokir hingga akhir tahun yang mempengaruhi daya serap
3. Pelaksanaan kontrak konsultan yang tidak sesuai, sehingga terdapat anggaran kontrak yang tidak dapat dibayarkan.

Langkah antisipasi dan strategi yang dilakukan:

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinir;
2. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb;
3. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang berkelanjutan;
4. Pengelolaan keuangan dan Kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 17.579.130.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 17.225.533.897 dengan persentase daya serap sebesar 97,99%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran	Indikator	anggaran	Realisasi	% Kinerja Anggaran	Sisa
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	693.469.000	691.007.808	99,65	2.461.192
	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	7.528.594.000	7.175.683.194	94,87	350.449.614
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	375.000.000	374.625.814	99,90	374.186
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	9.675.536.000	9.675.224.889	100	311.111
TOTAL		17.579.130.000	17.225.533.897	97,99	353.596.103

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.1.482.354.909 atau sebesar 8,43% dari pagu anggaran Rp 17.579.130.000. Hasil efisiensi tersebut merupakan optimalisasi dari anggaran kegiatan untuk memfasilitasi sasaran diluar target awal, sehingga dengan melakukan efisiensi anggaran tersebut, BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melampaui target sasaran kegiatan sebagai berikut:

LEMBAGA	TARGET	REALISASI
PAUD	1.188	1.188
SD	985	985
SMP	419	419
SKB	5	5
PKBM	69	69
KESETARAAN	-	-
SMA	170	170
SLB	22	22
SMK	0	109
Madrasah (Kemenag)	0	30
Dinas Pendidikan	0	8
Kemenag	0	3
Bappeda	0	8
Dinkes	0	8
BPKAD	0	8
Dinsos	0	8
Bunda PAUD	0	8
DPRD	0	3
Biro Kesra	0	8
DP3KB	0	8
IGTKI, HIMPAUDI, dan Forkom PAUD	0	24
Puspaga (Pusat Pendidikan Keluarga)	0	8

Pada bulan Agustus 2023 BPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan tindak lanjut atas Relaksasi Blokir untuk Kegiatan Prioritas (Pemulihan Pembelajaran), akan tetapi pada bulan Juli, September, dan Oktober dilakukan refocussing anggaran dengan memindahkan anggaran ke BA BUN dengan total realokasi sebesar Rp 2.393.755.000.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2023, BPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan inovasi sebagai berikut:

a. Inovasi dalam pencapaian target:

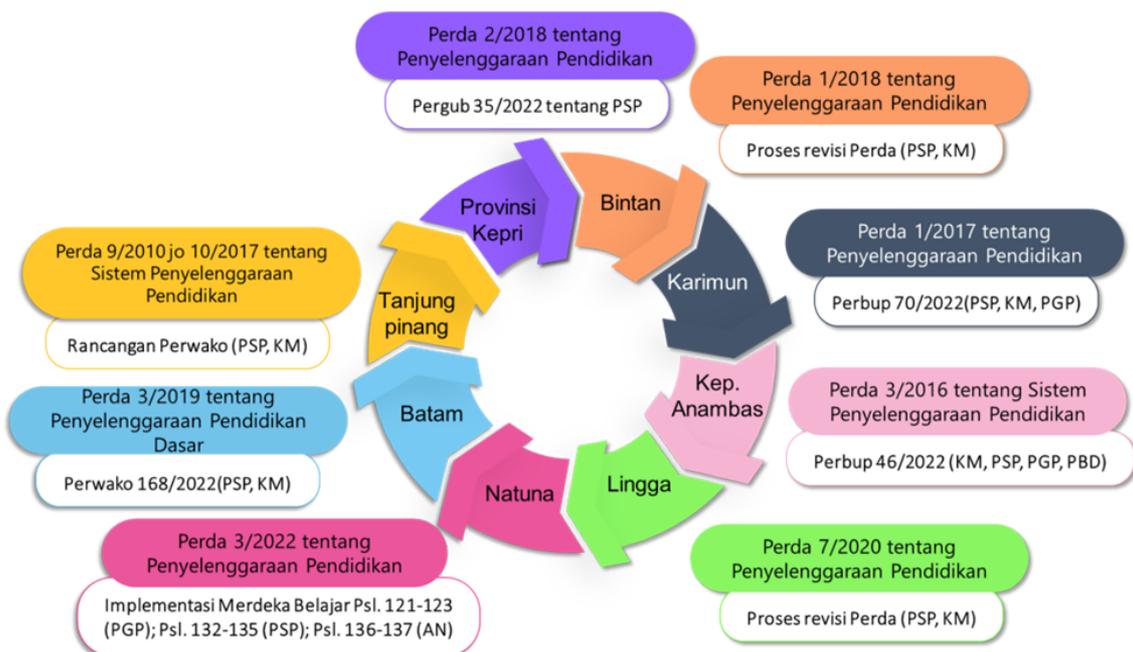
1). Strategi siput gonggong:



Strategi implementasi Siput Gonggong:

- PMO Periodik: Penyelenggaraan PMO Bulanan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan yang berkaitan
- Kunjungan kerja: Pelaksanaan Penyelarasan Program Kerja bersama Pemerintah Daerah
- Inovasi Pelayanan Pendidikan: Peningkatan Pelayanan Pendidikan Melalui Platform Digital
- Penguatan SDM: Peningkatan Pelayanan Pendidikan Melalui Platform Digital

Hasil advokasi Siput Gonggong



2. Dashboard Kombel Ramah Guru

BPMP Prov. Kepulauan Riau berinovasi dengan membuat sistem pemantauan atau Dashboard untuk memantau aktivitas komunitas belajar ramah guru dalam sekolah. Dashboard ini juga memudahkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota/ Provinsi untuk memantau kegiatan / aktivitas belajar komunitas belajar di satuan pendidikan daerahnya masing-masing. Data yang ditampilkan pada Dashboard ini adalah data yang diinput satuan pendidikan tentang aktivitas komunitas belajarnya baik terdaftar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun tidak terdaftar.



Informasi Komunitas Belajar Ramah Guru Prov. Kepulauan Riau

Oleh TIM POKJA 02 - ITP

Laman ini berisi informasi pemantauan aktivitas komunitas belajar ramah guru dalam sekolah di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengakses informasi di bawah pastikan Anda menggunakan akun belajar.id.

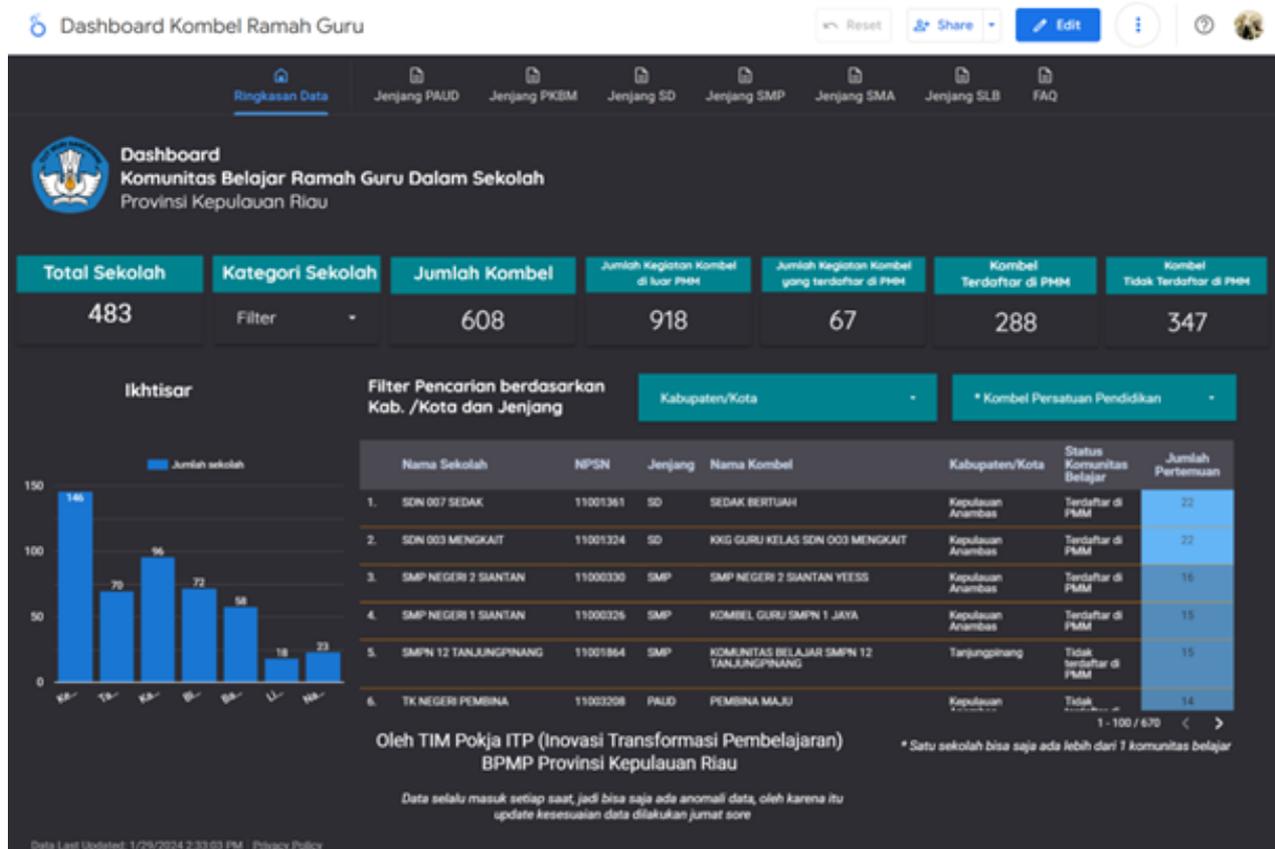
- Surat Edaran Dirjen GTK dan Edaran Provinsi/Kabupaten/Kota terkait Komunitas Belajar Dalam Sekolah.
- Mengenal apa itu komunitas belajar.
- Panduan pengisian formulir pemantauan aktivitas komunitas belajar.
- Formulir pemantauan aktivitas komunitas belajar (Pastikan menggunakan akun belajar id untuk membuka formulir).
- Nara Hubung
- Dashboard Aktivitas Komunitas Belajar Ramah Guru
- Dashboard pemantauan (Akses hanya untuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota, BGP Prov. Kepri dan BPMP Prov. Kepri).

Antarmuka menu panduan tentang komunitas belajar ramah guru

Tautan :

<https://s.id/infokombelramahgurukepri>

Sebelum akses ke Dashboard, terdapat beberapa menu/tautan untuk mempelajari tentang komunitas belajar, seperti Surat Edaran Dirjen GTK dan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi / Kota / Kabupaten tentang Komunitas Belajar dalam Sekolah, Panduan tentang Komunitas Belajar dari Dirjen GTK, Panduan pengisian formulir pemantauan aktivitas komunitas belajar, Narahubung dan Tautan Dashboard. Menu / tautan ini digunakan untuk referensi bagi pengguna sebelum pengisian formulir pemantauan aktivitas belajar komunitas belajar.



Antarmuka Dashboard Komunitas Belajar Ramah Guru dalam Sekolah
Tautan : <https://s.id/dashboardkombinekepri>

Tampilan beranda pada Dashboard menunjukkan data total sekolah yang sudah menginput, kategori sekolah (Sekolah Penggerak dan Sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka jalur Mandiri), Jumlah Komunitas Belajar, jumlah kegiatan komunitas belajar yang terdaftar maupun tidak terdaftar di PMM, dan jumlah komunitas belajar yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di PMM. Selain itu, terdapat juga data per Kabupaten / Kota dan data jumlah pertemuan atau jumlah aktivitas komunitas belajar melalui tabel. Data pada dashboard ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi baik Dinas Pendidikan maupun BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengadvokasi kebijakan merdeka belajar, khususnya pada Implementasi Kurikulum Merdeka.

Sebelumnya, data terkait kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan hanya berupa dokumentasi, nama kegiatan, serta waktu pelaksanaan yang dikirim melalui whatsapp. Hal ini mengakibatkan dinas pendidikan tidak dapat mengarsipkan secara rapi dan runtut. Dengan adanya dashboard ini, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota / Provinsi lebih mudah memantau aktivitas komunitas belajar di satuan pendidikan wilayah mereka baik tentang hasil kegiatan komunitas belajarnya, dokumentasi, serta agenda kegiatan komunitas belajarnya karena sudah otomatis tersipkan melalui sistem.

3. Ruang Ilmu



Ruang ilmu merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada di BPMP agar mampu memberikan advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah secara maksimal. Latarbelakang dari inovasi ini adalah keterbatasan SDM yang ada di BPMP Provinsi Kepulauan Riau sehingga setiap pegawai yang ada saat ini harus mampu saling berkolaborasi dan memiliki kompetensi yang merata khususnya mengenai kebijakan merdeka belajar.

4. Aplikasi Sisca

Perpustakaan BPMP Prov. Kepulauan Riau berinovasi dengan membuat jaringan katalog bersama antar perpustakaan Perguruan Tinggi. Aplikasi tersebut nama akronim SISCA : Single Search Engine Shared Catalog. SISCA ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencari data koleksi perpustakaan yang tergabung dalam jaringan katalog Bersama, yang aksesnya melalui satu mesin pencari. Katalog Bersama yang dibangun ini merupakan sebuah portal pencarian yang menggabungkan katalog dari berbagai perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Kepulauan Riau.

Tautan : <https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/sisca>

Maksud dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menelusur bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam satu akses pencarian. Dan memberikan Aksesibilitas yang lebih baik. Dengan adanya Katalog Bersama, mahasiswa, dosen, dan peneliti memiliki akses lebih mudah dan cepat terhadap sumber informasi yang tersedia di berbagai perpustakaan perguruan tinggi. Ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pencarian informasi, serta Penghematan Waktu dan Tenaga: Sebelum adanya Katalog Bersama, pengguna mungkin harus melakukan pencarian secara terpisah di setiap perpustakaan perguruan tinggi untuk menemukan bahan yang mereka butuhkan. Dengan menggabungkan katalog-katalog ini, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga yang mereka butuhkan untuk mencari informasi.

2. Penghargaan



a. BPMP Provinsi Kepulauan Riau menerima Piagam Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan atas dukungan dan bantuan BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam proses pelaksanaan rekrutmen panitia pemungutan suara (PPS) pada pemilu 2024.

b. Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam dan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batu Ampar Kota Batam menerima penghargaan Anugerah Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek di Prambanan, Yogyakarta.



c. BPMP Provinsi Kepulauan Riau berkontribusi dalam peningkatan persepsi positif terhadap kebijakan Merdeka Belajar pada gelaran Pekan Budaya Melayu 2023 di Tanjungpinang. BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya kampanye sekolah sehat, transisi paud-sd hingga akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Selama empat hari stan berdiri, BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan bagaimana kebijakan Merdeka Belajar dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi dan sekolah sehat dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Penyajian beragam karya tulis dengan pojok baca dan penyampaian informasi yang relevan dan menarik dari pewara stan juga membantu membangun minat dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya literasi. Pada Puncak kegiatan ini, Prestasi luar biasa BPMP Prov. Kepulauan Riau dalam meraih juara terbaik 1 stand literasi pada Pekan Budaya Melayu 2023 di Tanjungpinang yang ditaja oleh BPK Wilayah IV. Dengan kesuksesan ini, BPMP provinsi Kepulauan Riau telah menjadi contoh teladan bagi seluruh komunitas yang turut berperan aktif dalam kegiatan pekan budaya melayu ini.



Kategori ini merupakan bentuk penghargaan kepada UPT yang telah mengoptimalkan upayanya dalam mendorong efektifitas pencapaian tujuan kegiatan (luaran/output), serta capaian target jumlah pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar.

d. BPMP Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Apresiasi Duta Merdeka Belajar di lingkungan Ditjen Paud Dasmien, Kemendikbudristek pada Sabtu, 9 Desember 2023 di Jakarta. BPMP Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Penghargaan dengan Kategori Capaian Tujuan UPT. Kategori ini merupakan bentuk penghargaan kepada UPT yang telah mengoptimalkan upayanya dalam mendorong efektifitas pencapaian tujuan kegiatan (luaran/output), serta capaian target jumlah pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar.

Piagam Penghargaan dari Ditjen PAUD Dasmien kepada BPMP yang telah terlebih dahulu meraih ZIWBK dan WBBM dan Berperan aktif melakukan pendampingan pembangunan ZIWBK WBBM di seluruh satuan kerja Ditjen PAUD Dasmien.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telpom (021) 5725410
Laman <https://paud.dasmien.kemdikbud.go.id>

Nomor : 11872/CP.04.01/2023 10 November 2023
Lampiran :
Hal : Program Daerah Jawa Belajar.id

Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
Di seluruh Indonesia

Selubungan dengan telah berakhirnya program Daerah Jawa belajar.id yang diselenggarakan sejak bulan September 2023, dengan bentuk kami sampaikan di Daerah pemenang yang dikembangkan berdasarkan kategori daerah keseluruhan provinsi, daerah keseluruhan kabupaten/kota, daerah dengan wilayah besar (>5000 siswa) dan wilayah IT. Daerah pemenang merupakan daerah yang telah memenuhi kriteria penilaian dan berhasil mendapatkan sertifikat penghargaan atas keterlibatannya dalam program Daerah Jawa belajar.id. Adapun daftar daerah pemenang program Daerah Jawa belajar.id sebagai berikut:

No	Kategori Daerah Pemenang			
	Provinsi	Kab/Kota	Wilayah Besar (>5000 siswa)	Wilayah IT
1	Prov. Kalimantan	Kab. Banjar	Prov. Jawa Barat	Kab. Nias Selatan
2	Prov. Sumatera Utara	Kab. Sempit	Prov. Jawa Tengah	Kab. Nias Utara
3	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Ciamis	Prov. Jawa Timur	Kab. Nias Selatan
4	Prov. Riau	Kab. Indragiri Tengah	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Lombok
5	Prov. Sumatera Barat	Kota Bengkulu	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sorong Bagian Timur
6	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Lahabahu	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Sumbawa Barat
7	Prov. Bali	Kab. Jembrang	Kab. Bogor	Kab. Sulu Rajah
8	Prov. Lampung	Kab. Sralangon	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Malaka
9	Prov. Kalimantan Timur	Kab. Lahabahu Utara	Prov. Banten	Kab. Donggala
10	Prov. Kepulauan Riau	Kota Bintan	Prov. D.K.I. Jakarta	Kab. Kupang

f. 10 Besar Daerah Jawa Belajar.id

Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 kembali mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Jawa Belajar.id pada Kategori Daerah Pemenang Provinsi. Daerah Jawa Belajar.id merupakan program penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan tim aktif di kabupaten, kota dan provinsi yang terlibat dalam aktivasi akun pembelajaran.



g. Dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kep. Anambas meraih Penghargaan pada Puncak Rangkaian Kegiatan Pekan untuk Sahabat Karakter (Pusaka) tahun 2023 di Plaza Insan Berprestasi Gedung A, Lantai 1 Kemendikbudristek pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menerima Penghargaan dengan Kategori Dinas Pendidikan Inspiratif Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas meraih Penghargaan dengan Kategori Pemda Inspiratif Implementasi Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi untuk pemangku kebijakan terkait implementasi dalam bidang Penguatan Karakter, sehingga terciptanya pendidikan Aman dan Nyaman sebagai proses untuk menciptakan generasi yang berkarakter dan mempunyai Profil Pelajar Pancasila.

h. Si Paling Cepat Publikasi SE Transisi PAUD-SD Yang Menyenangkan

Penghargaan diberikan kepada PIC PDM-09 atas kinerja terbaik dalam diseminasi Surat Edaran Transisi PAUD-SD yang merupakan salah satu target kinerja pada PDM-09. Penghargaan juga diberikan atas keberhasilan advokasi BPMP kepada seluruh pemerintah daerah dalam penerbitan SE Transisi PAUD-SD



i. Akreditasi Perpustakaan dengan Predikat B



Foto bersama dengan tim asesor penilaian akreditasi oleh Perpustakaan Nasional.

Perpustakaan BPMP Prov. Kepulauan Riau mendapatkan akreditasi dengan peringkat B dari Perpustakaan Nasional Indonesia, penilaian dilakukan oleh tim asesor dari Perpustakaan Nasional pada hari Jumat, 15 Desember 2023. Penilaian ini merupakan hasil tindak lanjut dari pendampingan oleh tim Perpustakaan Pusat Kemendikbud pada tanggal 9 November 2023, dari hasil pendampingan Perpustakaan BPMP Prov. Kepri dinilai layak untuk diajukan untuk penilaian akreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Perpustakaan BPMP Prov. Kepri dinilai berdasarkan standar akreditasi perpustakaan khusus yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Adapun untuk sertifikat akreditasi akan diberikan 3 bulan setelah masa penilaian akreditasi.

Lampiran Surat Akreditasi Perpustakaan
Nomor B.834.L/PPM/021/2024
Tanggal 02 Januari 2024
DAFTAR PERPUSTAKAAN TERAKREDITASI
TAHUN 2023

No.	PESERTA AKREDITASI PERPUSTAKAAN	PROVINSI	PREDIKAT
1.	LIPTI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA	BAHAYA	A
2.	PERPUSTAKAAN BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	B
3.	PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	DKI JAKARTA	A
4.	PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI HOBANGKATU	JAWA BARAT	C
5.	LIPTI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PAPUA	PAPUA BARAT	B
6.	PERPUSTAKAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	DKI JAKARTA	B
7.	PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI BATAM	KEPULAUAN RIAU	B
8.	PERPUSTAKAAN BALAI PENANJIAN MUTU FENOMENA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	B
9.	LIPTI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS	SUMATERA BARAT	A
10.	PERPUSTAKAAN BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	B
11.	PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	JAWA TIMUR	A
12.	PERPUSTAKAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI RAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	B

Surat Pengumuman Hasil Akreditasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional

Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2023, BPMPProvinsi Kepulauan Riau melakukan program *crosscutting /collaborative*, antara lain:

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
PDM 01 Merdeka Belajar eps 7 BPMP - melakukan sosialisasi dan mendampingi proses pendaftaran serta mengawal implementasi PSP di provinsi Kepulauan Riau	Ditjen PAUD Dasmen dan Ditjen GTK	Penyelenggaraan PMO Level Pusat	1. Terelesaianny a isu-isu yang tidak dapat dituntaskan di level daerah 2. Terlaksananya sinkronisasi Data Center Program Sekolah Penggerak sebagai dampak dari pergantian sekolah	Data Center Program Sekolah Penggerak
	BGP	1. sebagai koordinator fasilitator PSP 2. melaporkan hasil pendampingan yang sudah diberikan kepada satuan pendidikan melalui PMO Level Daerah	pendampingan konsultatif dan asimetris pada satuan pendidikan	Aplikasi Pendampingan PSP
	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	1. Berkoordinasi dengan BPMP dan BGP dalam perubahan kebijakan mengenai program sekolah penggerak di tingkat pemerintah daerah 2. Mendapatkan pendampingan konsultatif dan	1. Terselenggaranya program sekolah penggerak sesuai dengan ketentuannya; 2. Meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara program sekolah penggerak	3. Laporan PMO Level Daerah 4. Dokumen koordinasi pergantian kepala sekolah

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		<p>asimetris oleh Kemendikbudris terkait program sekolah penggerak</p> <p>3. Terlibat aktif dalam menyelesaikan isu yang tidak terselesaikan pada level satuan pendidikan</p>		
<p>PDM 02 Implementasi Kurikulum Merdeka</p> <p>BPMP</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan mitra dan disdik</p> <p>2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala dengan disdik dan mitra</p> <p>3. Melakukan pendampingan dan penguatan substansi kepada pemerintah daerah dan mitra</p> <p>4. Mendorong pemerintah daerah untuk dapat menghimbau satuan pendidikan agar aktif melakukan peningkatan kompetensi melalui PMM dan komunitas belajar dalam sekolah</p> <p>5. Mengawal</p>	<p>Ditjen PAUD Dasmen/ Dit SMK</p>	<p>1. Membangun kerja sama dengan mitra pembangunan (yang sudah memiliki pendanaan mandiri dan MoU dengan daerah) untuk IKM</p> <p>2. Melakukan sosialisasi IKM utk disdik</p> <p>3. Melakukan bimtek awal komunitas belajar dan mitra pembangunan</p> <p>4. Menyediakan pusat layanan bantuan (helpdesk)</p>	<p>1. MoU dengan mitra pembangunan</p> <p>2. Tersampainya informasi dan strategi IKM jalur mandiri</p> <p>3. Tersedianya pusat layanan bantuan (helpdesk)</p>	<p>1. MoU dengan mitra pembangunan</p> <p>2. nomor pusat layanan bantuan</p>
	<p>BSKAP</p>	<p>1. Menyediakan platform pendaftaran IKM Jalur Mandiri</p> <p>2. Menetapkan sekolah pelaksana IKM Jalur Mandiri</p> <p>3. Melakukan</p>	<p>1. Ditetapkannya 1711 sekolah sasaran IKM Jalur Mandiri di Kepulauan Riau</p> <p>2. Terpantaunya proses transformasi pembelajaran</p>	<p>SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri</p>

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh BSKAP 5. Membangun dasbor pemantauan aktivitas belajar guru melalui komunitas belajar dalam sekolah		monitoring dan evaluasi transformasi pembelajaran		
	Disdik (kab/ kota/ provinsi)	1. Memantau dan mendampingi satuan pendidikan IKM 2. Melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan 3. Mendata, mendorong dan menguatkan komunitas belajar PMM dan dalam sekolah 4. Memastikan adanya kebijakan terkait implementasi kurikulum di daerah 5. Melakukan pengelolaan Narasumber 6. Mendukung implementasi dengan sarana perlengkapan belajar	1. Pemanfaatan PMM sebagai sumber belajar guru meningkat menjadi 99% 2. Terbentuknya 1041 komunitas belajar di PMM dan 612 komunitas belajar dalam sekolah yang merupakan motor penggerak IKM dan PMM 3. Tersedianya dukungan anggaran untuk implementasi Kurikulum Merdeka	1. Peraturan Daerah yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka 2. Dasbor PMM 3. Dasbor or Komunitas Belajar Intra Sekolah 4. Dasbor or Komunitas Belajar PMM
	BGP Provinsi Kepulauan Riau	1. Kolaborasi dalam penanganan isu-isu implementasi kurikulum merdeka 2. menangani pelatihan dan penguatan pemberdayaan	1. Penanganan isu di daerah 2. Peningkatan pemanfaatan PMM 3. Peningkatan jumlah komunitas belajar di Provinsi Kepulauan Riau	1. Platform Merdeka Mengajar 2. Dasbor PMM 3. Dasbor Komunitas Belajar Intra Sekolah 4. Dasbor

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		komunitas belajar, narasumber berbagi praktik baik	4. Transformasi proses pembelajaran melalui pengimbasan narasumber berbagi praktik baik	5. Data aktivitas webinar komunitas belajar
	Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan BPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dan Disdikpora Lingga dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah. Melakukan pelatihan, workshop dan bimbingan teknis pada satuan pendidikan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka Peningkatan pemanfaatan PMM Meningkatnya literasi dan numerasi siswa 	<ol style="list-style-type: none"> Dasbor PMM Dasbor Komunitas Belajar Intra Sekolah Dasbor Komunitas Belajar PMM Rapor pendidikan
	Komunitas Belajar	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi tempat kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk belajar bersama memahami IKM Menjadi tempat berbagi praktik baik dan 	<ol style="list-style-type: none"> Terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada siswa terlaksananya asesmen awal meningkatnya adoption rate pada PMM 	<ol style="list-style-type: none"> Data Pemanfaatan PMM Dasbor Komunitas Belajar Intra Sekolah

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		mengkonfirmasi pemahaman IKM		
<p>PDM 03 Transformasi Digital</p> <p>BPMP - Memastikan satuan pendidikan penerima BOSP memanfaatkan platform sumber daya sekolah dan peralatan TIK serta akun pembelajaran untuk pembelajaran</p>	Setditjen PAUDDasmen	Menyediakan platform digital untuk pengelolaan keuangan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan	Terjadinya transformasi pendidikan melalui transformasi pembelajaran berbasis digital di satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Adoption rate platform SDS - Pemanfaatan peralatan TIK untuk pembelajaran
	Pemerintah Daerah	Mendampingi satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan peralatan TIK	Terimplementasinya transformasi digital di satuan pendidikan	Progres pemanfaatan peralatan TIK
	Satuan Pendidikan	Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan peralatan TIK untuk pembelajaran	Terjadinya transformasi pembelajaran di satuan pendidikan	Progres pemanfaatan peralatan TIK
<p>PDM 04 Merdeka Belajar eps 19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data</p> <p>BPMP - memastikan SPM Bidang Pendidikan terimplementasikan dengan baik di daerah</p>	Setditjen	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bimbingan teknis perencanaan berbasis data kepada UPT - Penyedia layanan helpdesk 	Meningkatnya pemahaman SDM UPT terkait Perencanaan Berbasis Data Kemudahan layanan konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Kegiatan - Tangkap layar tautan layanan helpdesk
	Pemda	pemanfaatan rapor pendidikan	Pemenuhan SPM urusan pendidikan	Berita Acara Pengisian e-

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
BPMP memastikan satuan pendidikan untuk mengakses dan mengunduh rapor pendidikan		dalam penyusunan RKPD	di daerah	rakortek
	Satuan Pendidikan	Satuan pendidikan memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun perencanaan dan penganggarannya	Terciptanya transformasi satuan pendidikan dengan pembiasaan perencanaan berbasis data	Adoptionrate rapor pendidikan
PDM 05 Program Kemitraan BPMP - mengadvokasi Pemda dan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah	Setditjen PAUDDasmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan transformasi UPT PDM di 34 Provinsi dimana UPT PDM menjadi duta Kebijakan Kemendikbudristek b. Memastikan program Merdeka Belajar teradvokasi pada Pemerintah daerah. c. Menggalang sumber daya mitra pembangunan, komunitas pendidikan dan masyarakat. 	UPT PDM mampu menjalankan fungsi advokasi dan pendampingan Kebijakan Merdeka Belajar	Agenda Pertemuan Mingguan Rutin (Setiap Hari Rabu)
	Mitra Pembangunan	Dukungan Program dan Sumber Daya terhadap pemda dan satuan pendidikan dalam mendukung desain,	Terbentuknya kolaborasi/kerjasama dibidang pendidikan antara Pemda/Satuan Pendidikan dengan Mitra Pembangunan yang dapat	Daftar Mitra Pembangunan

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		implementasi, dan monev kebijakan dan program prioritas Merdeka Belajar	diperluas dengan kerja sama dengan Komunitas Pendidikan, Sektor Swasta, dan Masyarakat	
PDM 06 Merdeka Belajar eps 1 (AN) BPMP - melakukan sosialisasi dan mengawal pelaksanaan asesmen nasional	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Menyusun regulasi pelaksanaan Asesmen Nasional	Pelaksanaan Asesmen Nasional dapat berjalan dengan optimal	Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022
	Setditjen PAUDDasmen	Melakukan sosialisasi AN kepada UPT dan Dinas Pendidikan serta melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan UPT	Pelaksanaan AN berjalan sesuai dengan POS AN	Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022
	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	Melakukan sosialisasi, pelatihan tim teknis/proktor, monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN,	Pelaksanaan AN berjalan sesuai dengan POS AN	- SK Tim AN tingkat Kab/Kota dan Provinsi
PDM 07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Membuat konten terkait pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan sekolah	Penyebarluasan praktik baik pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan sekolah	Konten kreatif
	Setditjen PAUDDasmen	Membuat video/film pendek pengalaman BPMP dalam melaksanakan advokasi kepada Pemda	Penyebarluasan informasi upaya advokasi dan persepsi positif pemda terhadap KMB	Video/youtube

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
<p>PDM 09 Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan: Kebijakan Merdeka Belajar Episode 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi surat pemberitahuan ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD-SD 2. Advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB kepada Dinas Pendidikan 3. Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag 4. Penguatan Koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD 5. Tindak lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP untuk penguatan perubahan pembelajaran 6. Penguatan Mitra untuk pemanfaatan Forkom PAUD-SD dan advokasi perubahan pembelajaran di SD/MI & PAUD, utamanya SD 7. Penguatan kapasitas Dinas Pendidikan, Komunitas 	<p>Ditjen PAUD Dasmen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SE Gerakan transisi PAUD-SD 2. Memberikan pembekalan kepada UPT 3. Memberikan pembekalan kepada 514 Dinas Pendidikan kabupaten/kota 4. Melatih narasumber guru PAUD dan SD dari tiap kabupaten/kota 5. Menjalin kemitraan dengan Ornop dan penyelenggara pendidikan. 6. Menyediakan Sumber Belajar di Platform Merdeka Mengajar 	<p>Tercapainya 3 target perubahan dan 3 target kinerja Transisi PAUD SD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE Transisi PAUD SD 2. Bukti Diseminasi SE 3. Dasbor Transisi PAUD ke SD 4. Dasbor Laporan PPDB Transisi PAUD ke SD
<ol style="list-style-type: none"> 5. Tindak lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP untuk penguatan perubahan pembelajaran 6. Penguatan Mitra untuk pemanfaatan Forkom PAUD-SD dan advokasi perubahan pembelajaran di SD/MI & PAUD, utamanya SD 7. Penguatan kapasitas Dinas Pendidikan, Komunitas 	<p>Bunda PAUD se-Provinsi Kepulauan Riau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi surat edaran dan booklet advokasi mengenai kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan 2. Melakukan advokasi kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan narasumber guru yang sudah dilatih oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya 3 target perubahan Transisi PAUD SD 2. Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap gerakan transisi PAUD SD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE Transisi PAUD SD 2. Bukti Diseminasi SE 3. Dasbor Transisi PAUD ke SD 4. Dasbor Laporan PPDB Transisi PAUD ke SD

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
Belajar/Organisasi Guru, serta Mitra		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian. Memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada tahun ajaran baru. 2. Memperkuat peran forum komunikasi PAUD-SD. 3. Memastikan Satuan Pendidikan mengakses ragam Alat Bantu dan melaporkan Aksi Nyata 		
	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotora	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SE Gerakan Transisi PAUD SD 2. Diseminasi surat edaran dan booklet advokasi mengenai kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan 3. Melakukan advokasi kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan narasumber guru yang sudah dilatih oleh Kementerian. 4. Memastikan seluruh 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya 3 target perubahan Transisi PAUD SD 2. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap gerakan transisi PAUD SD 	<ul style="list-style-type: none"> 1. SE Transisi PAUD SD 2. Bukti Diseminasi SE 3. Dasbor Transisi PAUD ke SD 4. Dasbor Laporan PPDB Transisi PAUD ke SD

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		<p>satuan pendidikan menjalankan kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada tahun ajaran baru.</p> <p>5. Menguatkan peran forum komunikasi PAUD-SD.</p> <p>6. Memastikan Satuan Pendidikan mengakses ragam Alat Bantu dan melaporkan Aksi Nyata</p>		
	Pokja Bunda PAUD, Forkom Transisi PAUD, Mitra Transisi PAUD-SD (IGTKI, HIMPAUDI, IGRA)	<p>1. Memberi informasi cara mengakses alat bantu dan pemanfaatannya bagi satuan pendidikan untuk persiapan tahun ajaran baru;</p> <p>2. Mendorong pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD-SD untuk belajar bersama di komunitas belajar dengan menggunakan alat bantu yang disediakan</p>	<p>1. Tercapainya 3 target perubahan gerakan transisi PAUD ke SD</p> <p>2. Meningkatnya kepedulian guru dan masyarakat terhadap gerakan transisi PAUD ke SD</p>	<p>1. Dasbor Transisi PAUD ke SD</p> <p>2. Dasbor Laporan PPDB Transisi PAUD ke SD</p>
PDM 10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan pendampingan SMAN di Kota	Penguatan literasi dan Pengelolaan Perpustakaan	Surat DPK untuk melaksanakan

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
	Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang dalam penguatan literasi dan pemanfaatan perpustakaan sekolah	berbasis Digital	n kegiatan bersama dengan BPMP
	Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga	Pendampingan Bupati di dalam pelaksanaan program pemulian pembelajaran melalui penguatan literasi SD	Pelibatan dan perhatian Kepala Daerah	Dokumentasi Poto
	BGP Provinsi Kepulauan Riau	Melakukan kolaborasi program pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi SD	Pelaksanaan bimtek penguatan literasi dan pendampingan kombel antar sekolah sasaran	SK/ST Fasilitator
	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Melakukan kolaborasi program pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi SD	Pelaksanaan bimtek penguatan literasi dan pendampingan kombel antar sekolah sasaran	SK/ST Fasilitator
	Perguruan Tinggi (UMRAH, STISIPOL,dll)	Melakukan pendampingan mahasiswa program kampus mengajar di sekolah sasaran	Pelaksanaan aksi nyata dan pembentukan budaya literasi di sekolah sasaran	Program kerja dan laporan mahasiswa program KM dalam aksi nyata penguatan literasi dll
PDM 11 Program gerakan sekolah sehat	Kemendikbudri stek	1. Penguatan regulasi (penerbitan	Terlaksananya program gerakan sekolah sehat	Peningkatan status kesehatan

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
BPMP - Melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dan sekolah binaan serta menjalin kemitraan dalam implementasi program gerakan sekolah sehat		SE) 2. Sosialisasi , advokasi dan publikasi 3. Optimalisasi peran Tim Pembina UKS 4. Pembinaan dan pendampingan ke sekolah binaan 5. Integrasi data status imunisasi peserta didik ke dalam Dapodik 6. Kemitraan 7. Monitoring dan evaluasi	untuk mencetak generasi sehat, cerdas dan berkarakter.	
	Pemerintah Daerah	1. Penguatan regulasi (penerbitan SE) 2. Sosialisasi , advokasi dan publikasi 3. Optimalisasi peran Tim Pembina UKS 4. Pembinaan dan pendampingan ke sekolah binaan 5. Integrasi data status imunisasi peserta didik ke dalam Dapodik 6. Kemitraan 7. Monitoring dan evaluasi	Program Gerakan Sekolah Sehat dapat terimplementasi dengan baik di satuan pendidikan	Laporan implementasi program
	Mitra	1. Sosialisasi , advokasi dan	Terbentuknya kolaborasi/kerjasa	Program kerjasama/k

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Publikasi 2. Pembinaan dan pendampingan ke sekolah binaan 3. Kemitraan 4. Monitoring dan evaluasi 	ma untuk penerapan program gerakan sekolah sehat	olaborasi
PDM 12 Program Transformasi Pendidikan Khusus/Inklusif BPMP - Melakukan analisa komitmen pemda dalam regulasi, anggaran dan kelembagaan terkait pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di daerah serta melakukan pendampingan dan advokasi terkait pendidikan inklusif	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan dan dukungan (anggaran dan pendampingan) kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif 2. Melakukan analisa data dan pemetaan data satpen, pendidik dan peserta didik (jumlah dan sebaran, dsn penyelenggaraan PI) 3. Melakukan sosialisasi, advokasi dan evaluasi dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Satpen. 4. Melakukan penguatan kompetensi 	Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program pendidikan inklusif di daerah	Regulasi dan perencanaan program

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		<p>SDM, advokasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta fasilitasi (pendampingan dan penyediaan aksesibilitas).</p> <p>5. Pengembangan SLB sebagai pusat sumber pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. (Pemda Provinsi)</p> <p>6. Melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan khusus dan inklusif</p> <p>7. Mendorong guru/tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM pendidikan khusus dan pendidikan inklusif yang dilakukan di tingkat pusat</p> <p>8. Menyediakan guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan</p>		

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		<p>yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan mendorong guru yang teridentifikasi telah mendapatkan sertifikasi GPK untuk melakukan pemutakhiran data di DAPODIK</p> <p>9. Membentuk Unit Layanan Disabilitas di tingkat pemerintahannya dan bekerjasama dengan ULD dalam melakukan peningkatan kapasitas SDM di satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif</p>		
	Mitra Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan PDM-12; 2. Berkoordinasi dengan UPT dalam melakukan pendampingan; 3. Merencanakan program kemitraan yang ditentukan 	Terbentuknya kolaborasi/kerjasama untuk penerapan program pendidikan inklusif	Program kerjasama/kolaborasi



Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		PDM-12; 4. Melaksanakan program kemitraan yang telah disusun; dan 5. Memberikan laporan secara berkala kepada PDM-12 bila berada di wilayah kerja nasional		



BAB IV

Penutup

Selama tahun 2023, BPMPProvinsi Kepulauan Riau berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Sasaran	Indikator	Target 2023	Capaian 2023	%	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkatkan mutu pembelajarannya	1,96	2,14	109,18	693.469.000	691.007.808	99,65
	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkatkan rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	87,50	291,67	7.528.594.000	7.175.683.194	94,87
Meningkatnya tata kelola BPMPProvinsi Kepulauan Riau	Predikat SAKIP BPMPProvinsi Kepulauan Riau	A	A	100	375.000.000	374.625.814	99,90
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMPProvinsi Kepulauan Riau	84	96,40	115,28	9.675.536.000	9.675.224.889	100
TOTAL					17.579.130.000	17.225.533.897	97,99

Kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 secara keseluruhan dapat dinyatakan berhasil, karena dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah mencapai target dengan capaian rata-ratanya 337,19%. Capaian tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar 17.225.533.897 atau 97,99% dari total pagu sebesar Rp 17.579.130.000.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan Merdeka Belajar kepada stakeholder dan masyarakat,

- 
2. Menumbuhkan kesadaran kepada stakeholder bahwa keberhasilan suatu program harus memperhatikan kualitas dan tidak hanya fokus kepada capaian kuantitas,
 3. Jaringan internet yang belum merata di semua wilayah/blank spot
 4. Hasil profil pendidikan tahun 2022 baru keluar setelah proses perencanaan di pemda berjalan
 5. Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan masih kesulitan dalam mendeteksi tingkat kualitas data dalam dapodik
 6. perubahan SOTK pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berdampak pada perubahan tim PMO dan harus dilaksanakan sosialisasi kembali mengenai kebijakan merdeka belajar.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pemerataan jaringan internet, diantaranya dengan dinas pendidikan, Badan Perencanaan dan pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika.
 2. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan peningkatan mutu pendidikan salah satunya dengan menggunakan Surat Mendikburistek No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 hal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 18 Februari 2023
 3. Optimalisasi aplikasi rapor dapodik Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kualitas Data pokok pendidikan
 4. melakukan pendampingan asimetris secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pemerintah daerah
 5. mengoptimalkan advokasi dengan pemerintah daerah agar memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan merdeka belajar melalui penerbitan peraturan daerah dan pengalokasian anggaran.
- 



Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Warsita, S.S., M.Pd.

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bintan, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau,



Iwan Syahril



Warsita, S.S., M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 10.995.190.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 8.977.695.000
		TOTAL	Rp. 19.972.885.000

Bintan,30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau,



Iwan Syahril



Warsita, S.S., M.Pd.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Warsita, S.S., M.Pd.

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bintan, 18 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau,



Iwan Syahril



Warsita, S.S., M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.528.594.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 10.050.536.000
		TOTAL	Rp. 17.579.130.000

Bintan, 18 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau,



Iwan Syahril



Warsita, S.S., M.Pd.



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30	TW1 : 0	TW1 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	A	TW1 : -	TW1 : -
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	84	TW1 : 0	TW1 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.19.972.885.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 15 Mei 2023 sebesar **Rp. 4.039.777.558** atau **20.23%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 15 Mei 2023 **Rp. 15.933.107.442**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 242.891.368 (2,71%) dari pagu Rp 8.977.695.000. Capaian Kinerja Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dengan target 1,96% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.850) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.682.368 (1,75%) dari pagu anggaran Rp 836.880.000 (termasuk pagu blokir Rp 143.411.000). Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (DI.6397.QDB.850.093) dengan realisasi anggaran 0,66% (Rp 4.230.000 dari pagu Rp 642.190.000 termasuk pagu blokir 129.812.000) sebagai berikut: 1. Subkomponen (ED) Pendampingan Penatausahaan Dana Transfer Daerah dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan realisasi anggaran 60,10% (Rp 14.682.368 dari pagu Rp 24.428.000) yang dilaksanakan melalui Koordinasi Teknis Pelaksanaan BOP PAUD 2023 Regional I, di Astria Hotel Gading Serpong, Tangerang, Banten pada tanggal 31 Januari s.d. 3 Februari 2023. Output dari kegiatan ini adalah Tersampainya informasi kebijakan terbaru dalam pengelolaan BOSP Tahun 2023 jenjang PAUD. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan pemahaman SDM BPMP Kepri terkait Kebijakan pengelolaan BOSP Tahun 2023 untuk mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Kendala / Permasalahan :

Pada pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional terkendala dengan ketidakhadiran beberapa kepala dinas, sehingga dikhawatirkan koordinasi yang terjalin belum optimal.

Strategi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Teknis Pelaksanaan BOP PAUD 2023 Regional I adalah melakukan pendampingan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana BOSP Tahun 2023 melalui PMO bulanan maupun pertemuan lainnya selain itu berkoordinasi dengan pengelola BOSP Kab/Kota dan Provinsi melalui WA Grup.

B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 242.891.368 (2,71%) dari pagu Rp 8.977.695.000. Capaian Kinerja Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan target 30% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.750) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 228.209.000 (2,80%) dari pagu anggaran Rp 8.140.815.000 (termasuk pagu blokir Rp 2.017.426.000). Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (DI.6397.QDB.750.093) dengan realisasi anggaran 0,66% (Rp 4.230.000 dari pagu Rp 642.190.000 termasuk pagu blokir 129.812.000) sebagai berikut: 1. Subkomponen (ED) Pendampingan Penatausahaan Dana Transfer Daerah dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan realisasi anggaran 0,89% (Rp 4.230.000 dari pagu Rp 474.656.000 termasuk pagu blokir 129.812.000) yang dilaksanakan melalui Coaching BOSP pada tanggal 10 Maret 2023. Peserta kegiatan ini berasal dari unsur Kabid/Kasi Dinas Pendidikan dan tim manajemen BOSP Dinas Pendidikan Kab/Kota. Output dari kegiatan ini adalah Tersampainya informasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan dana BOSP Tahun 2023 Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah khususnya tim Pengelola BOSP terkait syarat dan ketentuan penyaluran dana BOSP Tahun 2023

dan mempercepat proses penyaluran dana BOSP Tahap I Tahun 2023. Lebih lanjut diharapkan meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.750.094) dengan realisasi anggaran 5,57% (Rp 168.927.000 dari pagu Rp 3.031.670.000 termasuk pagu blokir 1.448.996.000) sebagai berikut: 1. Subkomponen (BI) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan realisasi anggaran 38,86 % (Rp 30.108.000 dari pagu Rp 77.473.000) yang dilaksanakan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun Terkait Optimalisasi Peran Komunitas Belajar Pada Satuan Pendidikan di Swiss Bell Hotel Borneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 11 s.d. 14 Februari 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Kepala, Kapokja, dan tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Analisis Emphatize Kombel Tahap 1, Rumusan Problem Statement dalam Optimalisasi Kombel dalam sekola, dan Alternatif solusi/program untuk mengatasi permasalahan optimalisasi kombel di Kepri. Lebih lanjut diharapkan adanya Upaya pencapaian target pada project charter optimalisasi komunitas belajar intra sekolah dan tersusunnya model pengembangan kombel intra sekolah yang ramah guru. 2. Subkomponen (BM) Fasilitasi dan Pendampingan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran 6,83% (Rp 6.320.000 dari pagu Rp 92.520.000) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a Koordinasi Dengan Pemerintah Kota Batam dan Kabupaten Natuna pada tanggal 1 s.d. 4 Maret 2023. Direktur SD ikut serta pada kegiatan ini. Output dari kegiatan ini Terlaksananya advokasi kepada Pemda terkait implementasi Kebijakan Merdeka Belajar melalui pertemuan langsung dengan Walikota Batam, H. Muhammad Rudi dan Bupati Natuna, Wan Siswandi beserta Wakil Bupati, Sekdakab Natuna, dan Kadisdik. Lebih lanjut diharapkan Tersedianya Kepala SD dan SMP baru yang diangkat dari Guru Penggerak di Kota Batam

dan Meningkatkan sekolah-sekolah yang melaksanakan IKM Jalur Mandiri di Kab. Natuna. b Kunjungan dan Serah Terima Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023, di SDN 006 dan SDN 013 Belakang Padang, Kota Batam pada tanggal 17 s.d. 19 Februari 2023. Output pada kegiatan ini adalah Terlaksananya Progam Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 dan meningkatnya dukungan dan pemahan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Kampus Mengajar didaerah masing-masing. Lebih lanjut diharapkan adanya pengembangan kompetensi mahasiswa peserta, melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan, kreativitas dan inovasi, serta peningkatan literasi dan numerasi bagi siswa di sekolah sasaran. 3. Subkomponen (BQ) Bimtek dan penguatan pembelajaran dengan paradigma baru ke Pemda dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran 100% (Rp 4.564.000 dari pagu Rp 4.564.000) yang dilaksanakan melalui kegiatan Audiensi Sinkronisasi Hasil Pendampingan Program Organisasi Penggerak Bagi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Bidang Literasi, Numerasi & TIK, di BPMP Provinsi Kepulauan Riau. 4. Subkomponen (BR) Evaluasi dengan 60% pelaksanaan kegiatan (2 dari 3 kegiatan) dan realisasi anggaran 59,59% (Rp 127.935.000 dari pagu Rp 214.702.000) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a LDP Batam tanggal 12 s.d. 14 Januari 2023. Output dari kegiatan ini adalah penentuan sasaran emphatize tahap 2 dan mendesain rumusan masalah berdasarkan hasil emphatize tahap 1. Lebih lanjut diharapkan adanya Upaya pencapaian target pada project charter optimalisasi komunitas belajar intra sekolah dan penyusunan model pengembangan kombel intra sekolah yang ramah guru. b Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Pengadaan Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, di I Hotel Baloi, Kota Batam tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023. Output dari kegiatan ini adalah peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait evaluasi pelaksanaan AN tahun 2021 yang digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan AN tahun 2022 yang sesuai dengan POS AN Tahun 2022. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan AN Tahun 2022 sesuai dengan POS AN Tahun 2022. Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.750.096) dengan realisasi anggaran 3,26% (Rp 55.052.000 dari pagu Rp 1.690.820.000 termasuk pagu blokir 247.780.000) sebagai berikut: 1. Subkomponen (DG) Pertemuan periodik PMO dengan 25% (3 dari 12 kegiatan) dan realisasi anggaran 4,43% (Rp 55.052.000 dari pagu Rp 1.243.200.000) yang dilaksanakan melalui kegiatan PMO Level Daerah Periode Bulan Januari s.d. Maret 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 30 Januari 2023, 26 Februari s.d. 1 Maret 2023, dan 29 Maret s.d. 1 April 2023. Kegiatan ini diikuti oleh tim PMO dari 8 kab/kota/provinsi, Tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau, BGP Provinsi Kepulauan Riau, serta Direktorat Perwalian. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya target kinerja pada Pokja yang terdapat di BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang disinergikan dengan pemda (dinas pendidikan kab/kota/prov) serta penandatanganan komitmen bersama dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar dan capaian/progress yang telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan kab/kota/prov dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar serta Penyelesaian/Usulan Solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan sekolah penggerak di Provinsi Kepulauan Riau.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala pada kegiatan Coaching BOSP adalah tim manajemen BOSP Dinas Pendidikan Provinsi tidak hadir sehingga informasi tidak tersampaikan. 2. Kendala pada kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kota Batam dan Kabupaten Natuna adalah Kota Batam mengalami kekurangan Pengawas Sekolah, sementara mekanisme pengangkatan PS dari GP belum didukung oleh Regulasi pusat sedangkan di Kab. Natuna, Pemkab mengalami kendala dengan IKM dalam menjalankan platform (PMM) karena jaringan dan rentang kendali geografis yang cukup sulit. 3. Kendala pada kegiatan Kunjungan dan Serah Terima Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023, di SDN 006 dan SDN 013 Belakang Padang, Kota Batam adalah transportasi menuju sekolah sasaran kampus mengajar yang berada di pulau. 4. Kendala pada kegiatan PMO level daerah periode Januari s.d. Maret 2023 adalah Belum adanya inisiatif dari Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan rapat PMO level daerah.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut dari kegiatan Coaching BOSP adalah melakukan komunikasi dan koordinasi melalui telpon dan WA dengan dinas pendidikan provinsi. 2. Tindak lanjut dari kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Terkait Optimalisasi Peran Komunitas Belajar Pada

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Satuan Pendidikan di Swiss Bell Hotel Borneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah perlu disesuaikan desain pengembangan model kornel intrasekolah dengan karakteristik yang ada di Kepulauan Riau. 3. Tindak lanjut pada kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kota Batam dan Kabupaten Natuna adalah pendampingan teknis kepada Pemda Kota Batam terkait pengangkatan PS dan GP dan pemenuhan jaringan melalui OPD teknis di Kab. Natuna (Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan). 4. Tindak lanjut pada kegiatan Kunjungan dan Serah Terima Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023, di SDN 006 dan SDN 013 Belakang Padang, Kota Batam adalah akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi dari Program Kampus Mengajar. 5. Tindak lanjut dari kegiatan LDP Batam adalah perlu dilakukan pendalaman dan analisis lebih lanjut dengan melakukan emphasize tahap 2 dengan kriteria yang telah ditentukan. 6. Solusi dari kendala pada kegiatan PMO level daerah periode Januari s.d. Maret 2023 adalah melakukan pemantauan dan update progress secara rutin melalui grup WA dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program sekolah penggerak.

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 1.820.735.805 (16,56%) dari pagu anggaran Rp 10.995.190.000 dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 0% dari pagu anggaran Rp 50.000.000. Capaian kinerja Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja A akan diperoleh hasil pada triwulan IV. Akan tetapi dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung dari RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 73,05% (Rp 273.938.905 dari pagu Rp 375.000.000) dengan rincian sebagai berikut: 1. Subkomponen (A) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 85,60% (Rp 78.044.505 dari pagu anggaran Rp 91.172.000). Dilaksanakan melalui kegiatan: a Studi Adaptasi Tindaklanjut ZI-WBK dan Perencanaan Pembangunan WBBM, tanggal 19 s.d. 23 Januari 2023 di BPMP Provinsi DIY dan diikuti oleh Tim RBI. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan pemahaman tim rbziwbk dalam perencanaan pembangunan WBBM sebagai tindaklanjut meraih ZI-WBK, lebih lanjut diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini kompetensi tim RB ZI/WBK meningkat. b Pendampingan Kapasitas Tata Kelola Organisasi BPMP Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2023. c Koordinasi Kemitraan Peringatan Hari Kanker Dunia dengan Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, di Kota Tanjungpinang tanggal 7 s.d. 8 Februari 2023 dan diikuti oleh anggota DWP BPMP Kepri. Output dari kegiatan ini adalah terjalin koordinasi kemitraan dengan Yayasan Kanker Indonesia dalam rangka kepedulian pegawai terhadap kesehatan khususnya dalam pencegahan kanker dalam bentuk kegiatan dengan tema "Pentingnya mendeteksi kanker sejak dini" berupa seminar awam dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh narasumber di bidang Kesehatan. d Bimbingan Teknis Pendampingan ZI WBK/WBBM di Lingkungan Ditjen PAUD Dasmen, di Hotel Permata, Kota Bogor tanggal 6 s.d. 8 Februari 2023 dan diikuti oleh Tim RBI. Output dari kegiatan ini adalah dan diikuti oleh Tim RBI. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan pemahaman tim rbziwbk dalam perencanaan pembangunan WBBM sebagai tindaklanjut meraih ZI-WBK, lebih lanjut diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini kompetensi tim RB ZI/WBK meningkat. 2. Subkomponen (B) Pengelolaan Kepegawaian dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 82,43% (Rp 57.386.100 dari pagu anggaran Rp 69.615.000). Dilaksanakan melalui kegiatan: a Studi Adaptasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tanggal 19 s.d. 23 Januari 2023 yang dihadiri oleh pegawai BPMP Prov. Kepri. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Peningkatan kompetensi Pegawai dalam Perencanaan Kompetensi. b Workshop Aplikasi SIASN Bagi Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Hotel Savero Style Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 s.d. 17 Februari 2023 yang diikuti oleh pegawai BPMP Prov. Kepri. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan kompetensi bagi admin SIASN BPMP Provinsi Kepulauan Riau sehingga diharapkan adanya Updating data SIASN untuk usulan Kenaikan Pangkat Periode April 2023. c Tim Pendamping Pembangunan ZI WBK di BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 15 s.d. 18 Februari 2023 yang diikuti pegawai BPMP Prov. Kepri. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan kompetensi sebagai pendamping bagi satker calon peraih ziwbk lebih lanjut diharapkan adanya Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi Bagi Satker Calon Peraih ZIWBK, Tindaklanjut pendampingan persiapan penilaian TPI, dan Kegiatan pendampingan persiapan deskevaluasi. 3. Subkomponen (D) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 64,97% (Rp 41.350.000 dari pagu anggaran Rp 63.640.000). Dilaksanakan melalui kegiatan: a Studi Adaptasi Penyusunan LAKIP pada tanggal 19 s.d. 23 Januari 2023 yang dihadiri oleh pegawai BPMP Prov. Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh tim Lakip BPMP Prov. Kepri. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan pemahaman dalam penyusunan lakip tahun 2022 dengan menggunakan sumber data yang seragam dalam mengukur capaian setiap IKK, sehingga diharapkan tersusunnya Laporan Kinerja tahun 2022 yang akuntabel. b Pendamping Calon Satker ZI WBK/WBBM Tahun 2023, di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman pegawai BPMP Provinsi NTT pada delapan area pengungkit dan reform. Lebih lanjut diharapkan BPMP Provinsi NTT lolos untuk mengikuti penilaian ZI WBK di tahun 2023. 4. Subkomponen (E) Perencanaan Program dan Anggaran dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dengan realisasi anggaran 0% (dari pagu anggaran Rp 34.045.000). Dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Program UPT Tahun 2023, di Kemendikbudristek Jakarta pada tanggal 10 s.d. 12 Maret 2023. Output dari kegiatan ini adalah Terkonfirmasi revisi DIPA ke-2 Ditjen PDM c.q BPMP Provinsi Kepulauan Riau Jenis Revisi 306 yaitu Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) sehingga diharapkan terlaksananya program dan anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan baik. 5. Subkomponen (F) Pengelolaan Data dan Informasi dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dengan realisasi anggaran 68,77% (Rp 39.536.100 dari pagu anggaran Rp 57.490.000). Dilaksanakan melalui kegiatan: a Studi Adaptasi Publikasi dan Jurnal pada tanggal 19 s.d. 23 Januari 2023. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman dalam hal penerbitan jurnal sehingga diharapkan dapat menciptakan Komitmen Seluruh SDM untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Lebih lanjut diharapkan terdapat peningkatan kualitas penerbitan jurnal cermin pada tahun 2023 dan jurnal cermin dapat terakreditasi. b Audiensi Penerapan dan Pengembangan SPBE di Universitas Sumatera Utara Kota Medan pada tanggal 1 s.d. 4 Februari 2023. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman Pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.1 sesuai PK 2023 yang nilainya akan diperoleh pada triwulan ke IV, pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Pelaksanaan Kegiatan, dan Rencana Aksi Tahun 2023 menggunakan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

aplikasi Spasikita, 2. Mengupload LAKIP tahun 2022 di aplikasi Spasikita, 3. Publikasi LAKIP tahun 2022, PK Tahun 2023, dan Rencana Aksi 2023 pada laman BPMP Provinsi Kepulauan Riau, 4. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE) tahun 2022 dan menindaklanjuti hasil rekomendasi, 5. Melakukan pemantauan nilai IKPA melalui omspan, 6. Melakukan Revisi anggaran dengan tidak mengubah target kinerja, 7. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2022 dan rencana 2023
8. Update Informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau (<https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/>) dan Medsos BPMP Provinsi Kepulauan Riau (Facebook : Lpmp Kepulauan Riau dan instagram : bpmp_kepulauan_riau)

Kendala / Permasalahan :

Proses revisi yang memakan waktu cukup lama sehingga proses pertanggungjawaban juga terkendala.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan eselon I terkait proses revisi. 2. Merencanakan pelaksanaan Pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP) meliputi : a pengembangan sistem informasi penerbitan SK, ST dan SPPD b pengembangan sistem informasi pembayaran honor kegiatan c pengembangan sistem informasi pengelolaan pegawai d penerapan sistem tanda tangan elektronik

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 1.820.735.805 (16,56%) dari pagu anggaran Rp 10.995.190.000 dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 0% dari pagu anggaran Rp 50.000.000. Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja 84 pada triwulan I ini diperoleh dari perhitungan manual nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) / SMART dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) / OM-SPAM. Pada Bulan Maret 2022, BPMP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai IKPA 78,50 dan Nilai EKA 28,49, sehingga diperoleh NKA 48,49. Dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu: 1. RO Layanan Perkantoran (WA.2005.EBA.994) dengan realisasi sebesar 14,63% (Rp 1.546.769.900 dari pagu Rp 10.570.190.000 termasuk pagu blokir Rp 528.144.000), yang terdiri dari: a Komponen Gaji dan Tunjangan (WA.2005.EBA.994.001) sebesar 13,55% (Rp 663.842.188 dari pagu Rp 4.898.670.000 termasuk pagu blokir Rp 528.144.000). b Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (WA.2005.EBA.994.002) sebesar 15,57% (Rp 882.954.712 dari pagu Rp 5.671.520.000). 2. RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dan subkomponen Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 97,60% (Rp 57.622.200 dari pagu Rp 59.038.000) melalui kegiatan Studi Adaptasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN, tanggal 19 s.d. 23 Januari 2023 di BPMP DIY. Peserta pada kegiatan ini adalah tim perencanaan, keuangan, dan BMN. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kompetensi pegawai melalui mentoring terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan dan BMN di BPMP D.I. Yogyakarta, lebih lanjut diharapkan Tersedianya prototipe integrasi sistem terkait inventarisasi BMN yang dihasilkan oleh pegawai BPMP. Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.2, pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan I ini antara lain: a. Revisi ke-1 DIPA tingkat DJA dengan pengesahan tanggal 29 Desember 2022 terkait Revisi DJA terkait pembukaan blokir anggaran belanja barang untuk pengadaan konsultan, b. Revisi ke-2 DIPA tingkat DJA dengan pengesahan tanggal 10 Maret 2023 terkait Revisi DJA terkait penyesuaian/pergeseran Blokir Anggaran Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2023. 2. Melakukan percepatan belanja, 3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu, 4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Kendala / Permasalahan :

Nilai EKA yang kurang maksimal.

Strategi / Tindak Lanjut :

Meningkatkan capaian rincian output dan nilai efisiensi. Selain itu, dalam rangka penyediaan prototipe integrasi system terkait inventarisasi BMN yang dihasilkan oleh pegawai BPMP diperlukan ujicoba dan pengembangan fitur sistem integrasi.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

a. Menindaklanjuti atas hasil capaian nilai kinerja anggaran maka perlu adanya upaya preventif yang dilakukan agar dapat memperoleh capaian nilai kinerja anggaran yang maksimal dan mencapai target

b. Kegiatan yang sudah dijadwalkan diupayakan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, jika terjadi pergeseran maka segera berkoordinasi dengan bagian perencanaan.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Bintan, 15 Mei 2023

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30	TW2 : 0	TW2 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	A	TW2 : -	TW2 : -
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	84	TW2 : 0	TW2 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.19.972.885.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 18 Juli 2023 sebesar **Rp. 7.457.285.163** atau **37.34%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 18 Juli 2023 **Rp. 12.515.599.837**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp 2.331.337.579 (25,97%) dari pagu Rp 8.977.695.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 2.160.837.000 (24,07% dari pagu anggaran). Capaian Kinerja Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dengan target 1,96% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.850) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 228.468.068 (27,30%) dari pagu anggaran Rp 836.880.000 (termasuk pagu blokir Rp 143.411.000 atau 17,14%).

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.850.094) dengan realisasi anggaran Rp 111.811.000 (30,94%) dari pagu Rp 361.367.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 143.411.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (BE) Sinkronisasi Rencana Kerja UPT pada Transisi PAUD-SD dengan Forum Komunikasi PAUD dan Pemangku Kepentingan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 111.811.000 (30,94%) dari pagu Rp 361.367.000 termasuk pagu blokir Rp 143.411.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Sinkronisasi Rencana Kerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada Transisi PAUD-SD dengan Forum Komunikasi PAUD dan Pemangku Kepentingan, di BPMP Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan tanggal 19 s.d. 21 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Pokja Bunda PAUD, Kabid PAUD, Kabid SD, Himpaudi, Ketua Forum Komunikasi, dan Peserta BPMP. Output dari kegiatan ini adalah selarasnya program BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemangku Kepentingan yang Mendukung Gerakan Transisi PAUD SD yang menyenangkan.

- Rakor Penguatan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan Kepada Dians Pendidikan Kab/Kota, di Harmoni One Hotel & Convention Center, Kota Batam, tanggal 25 s.d. 27 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah Tercapainya target perubahan transisi PAUD SD. Lebih lanjut diharapkan terwujud sinkronisasi Rencana Kerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada Transisi PAUD-SD dengan Forum Komunikasi PAUD dan Pemangku Kepentingan, di BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

- Acara Tahunan Bersama YPKI dan Pelepasan Siswa Learning Centre di Grendpa Land Beach, Kab. Bintan, tanggal 3 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pendidikan anak-anak yang berada di Kabupaten Bintan khususnya yang berada di wilayah Hinterland. Lebih lanjut diharapkan terdapat praktik baik yang ditampilkan saat acara pelepasan dapat dijadikan contoh untuk penerapan P5 di sekolah dan strategi serta kegiatan-kegiatan YPKI dapat dijadikan rujukan untuk menjaring mitra serupa.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.850.096) dengan realisasi anggaran Rp

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

101.419.700 (62,39%) dari pagu Rp 162.569.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (DE) Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran Rp 101.419.700 (62,39%) dari pagu Rp 162.569.000 yang dilaksanakan melalui Monitoring dan Evaluasi Program Kampus Mengajar Angkatan 5 dan Buku Bacaan Bermutu di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 8 s.d. 12 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah Mengetahui progres keterlaksanaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di daerah. (Episode ke 2 tentang Kampus Merdeka, dan Episode ke 23 Buku bacaan bermutu). Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan kualitas literasi dan Numerasi siswa di sekolah sasaran Program Kampus Mengajar dan Buku Bacaan Bermutu.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.850.097) dengan realisasi anggaran 0% dari pagu Rp 101.680.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (GB) Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran 0% dari pagu Rp 600.000 yang dilaksanakan melalui Advokasi Pemerintah Daerah Terkait Transformasi Digital Di Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kota Batam pada tanggal 13 s.d. 14 April 2023. Output dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah (Kota Tanjungpinang dan Batam) mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi SDM Guru terkait Transformasi Digital dari Google for Education Indonesia. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan Level pemahaman digital Guru sehingga dapat membuat bahan pembelajaran yang berkualitas.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala yang terjadi pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Kampus Mengajar Angkatan 5 dan Buku Bacaan Bermutu di Provinsi Kepulauan Riau adalah Rata-rata sekolah yang menjadi sasaran Buku Bacaan bermutu adalah sekolah yang berada di pulau-pulau sehingga petugas tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dengan alasan keterbatasan anggaran mengingat biaya transportasi dari pulau ke pulau sangat tinggi.

2. Kendala yang terjadi pada kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah Terkait Transformasi Digital Di Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kota Batam adalah kesulitan menentukan jadwal pertemuan dengan walikota Batam.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut dari kegiatan Sinkronisasi Rencana Kerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada Transisi PAUD-SD dengan Forum Komunikasi PAUD dan Pemangku Kepentingan, di BPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah Monitoring dan evaluasi Program yang telah disusun.

2. Solusi pada kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah Terkait Transformasi Digital Di Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kota Batam adalah Google for Education Indonesia akan memberikan pelatihan kepada Guru-guru yang ditunjuk oleh dinas pendidikan dan Guru-guru tersebut akan mendapatkan Google Certified.

3. Tindak lanjut untuk Program Kampus Mengajar adalah perlu adanya sosialisasi kepada kepala sekolah sasaran program kampus mengajar sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah. Strategi yang dapat dilakukan yaitu:

a Mengundang dan memastikan kepala sekolah hadir pada saat Kickoff Kampus Mengajar

b Dinas Pendidikan Menginformasikan Program Kampus Mengajar kepada Kepala Sekolah Sasaran.

4. Tindak lanjut untuk Program Buku Bacaan Bermutu adalah perlu adanya pelatihan bagi guru-guru satuan pendidikan yang menjadi sasaran Buku Bacaan Bermutu. Strategi yang dapat dilakukan yaitu:

a Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melatih guru-guru di wilayahnya

b Menginformasikan serta memastikan satuan pendidikan yang menjadi sasaran mengikuti pelatihan online yang diselenggarakan oleh mitra pembangunan melalui PDM 10

c Membuat konten tentang Pengelolaan dan Penataan serta Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu yang kemudian dibagikan melalui media sosial.

B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp 2.331.337.579 (25,97%) dari pagu Rp 8.977.695.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 2.160.837.000 (24,07% dari pagu anggaran). Capaian Kinerja Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan target 30% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.750) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.102.869.511 (25,83%) dari pagu anggaran Rp 8.140.815.000 (termasuk pagu blokir Rp 2.017.426.000 atau 24,78%).

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka (DI.6397.QDB.750.091) dengan realisasi anggaran Rp 167.256.000 (56,28%) dari pagu Rp 297.204.000 termasuk pagu blokir 129.812.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (CA) Bimbingan Teknis penerapan implementasi kurikulum dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 96.846.000 (86,37%) dari pagu Rp 112.126.000 termasuk pagu blokir Rp 850.000 yang dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka, di BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur dari Dinas Pendidikan di 7 Kab/Kota dan Provinsi serta perwakilan dari sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Output dari kegiatan ini adalah Hasil pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana Kurikulum Merdeka meningkat, Angka partisipasi guru dalam mengikuti Seri Webinar meningkat, Aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar peserta didik meningkat, Jumlah dan kualitas narasumber berbagi praktik baik meningkat dan Pusat layanan bantuan/helpdesk terkait Implementasi Kurikulum Merdeka tersosialisasikan. Dampak dari kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka adalah adanya peningkatan pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka dan peningkatan komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar peserta didik.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka (DI.6397.QDB.750.092) dengan realisasi anggaran Rp 33.360.000 (9,57%) dari pagu Rp 348.506.000 termasuk pagu blokir 47.066.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (AB) Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 33.360.000 (71,56%) dari pagu Rp 46.620.000 yang dilaksanakan melalui Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional pada tanggal 22 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 peserta yang terdiri dari Penanggung jawab AN di Disdik, Kepala Bidang SD, SMP, SMA dan SLB, dan Operator. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Pendidikan di seluruh Kepri guna menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan AN yang sesuai dengan POS. Lebih lanjut diharapkan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan POS sehingga mutu pendidikan dapat di peroleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Subkomponen (AE) Posko Pelaksanaan Asesmen Nasional dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran 0% dari pagu Rp 10.630.000 yang dilaksanakan melalui Posko Pelaksanaan AN (Kemenag Bintan, Kemenag Tanjungpinang, dan Kanwil Kemenag Kepri) pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dengan Kemenag Kepri guna menyamakan pemahaman terkait dengan POS pelaksanaan AN tahun 2023 dan alur penyelesaian kendala pelaksanaan AN. Lebih lanjut diharapkan Pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan POS sehingga mutu pendidikan dapat di peroleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (DI.6397.QDB.750.093) dengan realisasi anggaran Rp 4.230.000 (1,17%) dari pagu Rp 360.222.000 termasuk pagu blokir Rp 129.812.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (EA) Advokasi Kebijakan Dana Transfer Daerah dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan realisasi anggaran 0% dari pagu Rp 118.368.000 yang dilaksanakan melalui Advokasi Kebijakan Dana Transfer Daerah Melalui Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 melalui daring pada tanggal 16 Mei 2023. Kegiatan ini diikuti Peserta sebanyak 48 orang yang terdiri dari Tim Pengelola DAK Fisik dan DAK Non Fisik (BOSP) Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. Output dari kegiatan ini adalah Tersampainya informasi kebijakan DAK dan kebijakan BOSP tahun 2023 kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa oleh satuan Pendidikan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan pengelolaan DAK Fisik dan BOSP yang sesuai prosedur.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.750.094) dengan realisasi anggaran Rp 907.005.557 (28,10%) dari pagu Rp 3.227.339.000 termasuk pagu blokir Rp 1.448.996.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (BI) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 77.472.423 (42,05%) dari pagu Rp 184.249.000 yang dilaksanakan melalui Audiensi Kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di Graha Kepri Kota Batam pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah Tersampainya informasi capaian dan hambatan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan dukungan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

2. Subkomponen (BL) Forum Pemangku Kepentingan dalam Keberlanjutan PSP dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 382.335.434 (99,99%) dari pagu Rp 382.386.000 yang dilaksanakan melalui Forum Pemangku Kepentingan Bersama dalam Keberlanjutan PSP pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023. Peserta Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan merupakan terdiri dari unsur Kepala Sekolah dan guru sekolah penggerak Angkatan 1 dan 2, perwakilan pengawas sekolah, dan perwakilan Tim PMO Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Output dari kegiatan ini adalah Diperolehnya hasil refleksi capaian kemajuan Pendidikan pada akhir semester, disusunnya rencana dan komitmen tindak lanjut serta kolaborasi per kabupaten /kota dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Refleksi dan praktik baik dari satuan Pendidikan, Bahan publikasi kegiatan (foto, video, tautan hasil publikasi), dan Spanduk yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah terkait kesinambungan Program Sekolah Penggerak. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna melalui Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2 di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Subkomponen (BM) Fasilitasi dan Pendampingan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 90.401.600 (99,70%) dari pagu Rp 90.670.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a Advokasi Kebijakan PSP, IKM, Rapor Pendidikan PBD, dan Pengangkatan Guru Penggerak Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bintan pada tanggal 3 Mei 2023. Direktur SD ikut serta pada kegiatan ini. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman anggota DPRD Kabupaten Bintan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Lebih lanjut diharapkan Kebijakan merdeka belajar dapat dituangkan dalam APBD kabupaten Bintan.

b Advokasi Pemerintah Daerah Terkait Transformasi Digital Di Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tanggal 13 April 2023. Output pada kegiatan ini adalah Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi SDM Guru terkait Transformasi Digital dari Google for Education Indonesia. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan Level pemahaman digital Guru sehingga dapat membuat bahan pembelajaran yang berkualitas.

c Narasumber Pada Kegiatan Rapat PMO dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tanggal 8 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah terpetakannya kondisi awal dan kondisi terkini sekolah penggerak, Ditindaklanjutnya masalah yang diajukan oleh sekolah melalui aplikasi Sekolah Penggerak, dan Diperolehnya gambaran progress sekolah yang telah melaksanakan program sekolah penggerak. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan pemahaman pemda dan sekolah penggerak terhadap program sekolah penggerak dan Terbangunnya komunikasi dan sistem pelaporan progress implementasi PSP antara Dinas Pendidikan dan sekolah.

4. Subkomponen (BR) Evaluasi dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 dari 3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 204.556.000 (58,73%) dari pagu Rp 348.289.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a Action Learning Team (ALT) 4 LDP "Diskusi Kelompok Terpumpun: Berbagi Pengalaman dalam Piloting Komunitas Belajar Ramah Guru Dalam Sekolah", di Hotel La Prima, Nusa Tenggara Timur tanggal 24 s.d. 29 Mei 2023. Dengan terselenggaranya kegiatan Action Learning Team (ALT) 4 LDP ini diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah melalui komunitas belajar ramah guru dengan Merancang Diferensiasi Strategi Advokasi dan Peningkatan kompetensi sesuai dengan Konteks dan Keunikan Satpen dan Daerah dan bagaimana Sosialisasi pada stakeholder, bentuk Sistem penjaminan mutu partisipatif Kepri dan aksi nyata dalam memberi Apresiasi penggerak kombel ramah guru. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan komunitas belajar ramah guru dalam sekolah tidak hanya pada sasaran piloting juga angka partisipasinya secara keseluruhan.

b Diskusi Kelompok Terpumpun Perumusan Peran dan Fungsi UPT Kemendikbudristek Dalam Mendukung Program Manajemen Talenta Nasional, di Bigland Sentul Hotel & Convention, Bogor, Jawa Barat tanggal 12 s.d. 14 April 2023. Output dari kegiatan ini adalah dirumuskannya rencana Peran dan tugas UPT dalam mendukung program pengembangan prestasi talenta dan MTN. Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

c Monitoring dan Evaluasi Komitmen Pemda terkait Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah BPMP mendapatkan informasi level komitmen sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah, sebagai bahan refleksi bagi BPMP dalam mendampingi Pemda terkait Kebijakan Merdeka Belajar, dan Data dukung komitmen Pemerintah Daerah dapat terdokumentasi dengan baik.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data (DI.6397.QDB.750.095) dengan realisasi anggaran Rp 429.578.321 (43,83%) dari pagu Rp 980.003.000 termasuk pagu blokir Rp 137.572.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (FI) Bimbingan Teknis PBD, profil dan rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan dengan 100% pelaksanaan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

kegiatan (7 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 263.112.200 (95,93%) dari pagu Rp 274.281.000 yang dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis PBD, profil dan rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan di 7 Kab/Kota pada tanggal 24 Mei s.d. 14 Juni 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Pengawas dan Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah peserta mampu menerapkan perencanaan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan berdasarkan capaian yang ada pada rapor pendidikan. Lebih lanjut diharapkan budaya mutu dapat diterapkan di sekolah.

2. Subkomponen (FJ) Pendampingan perencanaan dan penetapan target kinerja/ capaian/ rencana aksi/ APBD dengan 33% pelaksanaan kegiatan (1 dari 3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 166.466.121 (25,67%) dari pagu Rp 648.427.000 termasuk pagu blokir Rp 137.572.000 yang dilaksanakan melalui Pendampingan Perencanaan dan Penetapan Target/Capaian Kinerja dan Rencana Aksi pada tanggal 9 s.d. 12 Mei 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Bagian Perencanaan dan Kepala Dinas Pendidikan serta Bappeda dari 7 Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Perencanaan/program kerja tahun 2024 Dinas Pendidikan, tersinkron dengan capaian Standar Pelayanan Minimal atau indikator kinerja urusan Pendidikan tahun 2023. Lebih lanjut diharapkan APBD mengakomodir indikator standar pelayanan minimal.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.750.096) dengan realisasi anggaran Rp 561.439.633 (28,67%) dari pagu Rp 1.958.117.000 termasuk pagu blokir 247.780.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (DE) Pendampingan penerapan SPM ke pemerintah daerah dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 144.996.040 (64,65%) dari pagu Rp 224.286.000 yang dilaksanakan melalui Advokasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 pada tanggal 11 s.d. 14 Februari 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Kepala, Kapokja, dan tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024 dan adanya mitigasi risiko untuk mengatasi isu-isu PPDB di setiap daerah. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

2. Subkomponen (DG) Pertemuan periodik PMO dengan 50% (6 dari 12 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 416.443.593 (4,43%) dari pagu Rp 1.133.803.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan PMO Level Daerah Periode Bulan April s.d. Juni 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 28 April 2023, 29 s.d. 31 Mei 2023, dan 26 s.d. 27 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh tim PMO dari 8 kab/kota/provinsi, Tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau, BGP Provinsi Kepulauan Riau, serta Direktorat Perwalian. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya target kinerja pada Pokja yang terdapat di BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang disinergikan dengan pemda (dinas pendidikan kab/kota/prov) serta penandatanganan komitmen bersama dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar dan capaian/progress yang telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan kab/kota/prov dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar serta Penyelesaian/Usulan Solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan sekolah penggerak di Provinsi Kepulauan Riau.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala pada kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional adalah Belum semua Dinas Pendidikan membuat SK kepanitiaan pelaksanaan AN dan menentukan pelaksanaan sosialisasi AN serta pelatihan tim teknis/proktor.

2. Kendala pada kegiatan Posko Pelaksanaan AN adalah tidak ada pelatihan tim teknis dan proktor untuk satuan pendidikan di bawah kemenag.

3. Kendala pada Forum Pemangku Kepentingan Bersama dalam Keberlanjutan PSP adalah terdapat beberapa narasumber dari Kepala Dinas Pendidikan yang berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan dan digantikan oleh perwakilan Dinas Pendidikan.

4. Kendala pada kegiatan Narasumber Pada Kegiatan Rapat PMO dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah kegiatan tidak dihadiri oleh BGP sebagai pelaksana pendampingan di tingkat satuan pendidikan.

5. Kendala dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Komitmen Pemda terkait Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Kepulauan Riau adalah Belum bisa bertemu dengan Tim PMO Transformasi Pembelajaran dari Dinas Pendidikan pada waktu kegiatan berlangsung sehingga data dukung terkait Komitmen Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) belum terkumpul dengan optimal.

6. Kendala pada kegiatan Bimbingan Teknis PBD, profil dan rapor pendidikan, dan platform rapor Pendidikan adalah tidak semua sekolah mendapatkan bimtek PBD.

7. Kendala dari kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penetapan Target/Capaian Kinerja dan Rencana Aksi adalah BPMP tidak dapat memantau dalam proses penetapan RKPD sampai dengan APBD.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka adalah peserta membuat rencana tindak lanjut dalam mempercepat implementasi kurikulum merdeka dan melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lainnya.

2. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional adalah Melakukan monev dan pendampingan lebih lanjut dalam pelaksanaan AN.

3. Tindak lanjut pada kegiatan Posko Pelaksanaan AN adalah Melibatkan satuan pendidikan di bawah kemenag dalam kegiatan sosialisasi AN.

4. Tindak lanjut pada kegiatan Advokasi Kebijakan Dana Transfer Daerah Melalui Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 melakukan monitoring dan pendampingan pengelolaan DAK Fisik dan BOSP.

5. Tindak lanjut dari kegiatan Audiensi Kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di Graha Kepri Kota Batam adalah perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan berapa sasaran serta kebutuhan anggaran untuk mendukung program tersebut dan merencanakan pertemuan lebih lanjut dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

6. Solusi dari kendala pada kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Bersama dalam Keberlanjutan PSP adalah Rencana tindak lanjut untuk kesinambungan program Sekolah Penggerak di angkatan 1 dan 2, perumusan fokus perubahan yang perlu terjadi pada tahun ajaran yang akan datang agar sekolah impian dapat terwujud, perumusan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat terwujud melalui implementasi kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan aspek lain yang relevan, serta Pemetaan kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud.

7. Tindak lanjut dari kegiatan Advokasi Kebijakan PSP, IKM, Rapor Pendidikan PBD, dan Pengangkatan Guru Penggerak Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bintan adalah Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan anggota DPRD bersama Dinas Pendidikan.

8. Tindak lanjut dari kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah Terkait Transformasi Digital Di Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah Google for Education Indonesia akan memberikan pelatihan kepada Guru-guru yang ditunjuk oleh dinas pendidikan dan Guru-guru tersebut akan mendapatkan Google Certified.

9. Strategi Narasumber Pada Kegiatan Rapat PMO dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah Menyajikan laporan progress efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, progress penyusunan rencana implementasi kurikulum merdeka, dan progress implementasi kurikulum merdeka di satuan Pendidikan.

10. Tindak lanjut dari kegiatan Action Learning Team (ALT) 4 LDP "Diskusi Kelompok Terpumpun: Berbagi Pengalaman dalam Piloting

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Komunitas Belajar Ramah Guru Dalam Sekolah" adalah Uji Coba Prototipe Strategi Advokasi dan Peningkatan Kompetensi. Pemantauan melalui kanal informasi dan antarmuka untuk komunitas belajar.

11. Tindak lanjut dari kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Perumusan Peran dan Fungsi UPT Kemendikbudristek Dalam Mendukung Program Manajemen Talenta Nasional, di Bigland Sentul Hotel & Convention, Bogor, Jawa Barat adalah melakukan komunikasi awal dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan partisipasi peserta daerah dalam ajang talenta.

12. Tindak lanjut dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Komitmen Pemda terkait Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Kepulauan Riau adalah mengumpulkan data dukung komitmen pemda secara bertahap melalui paparan dari Dinas Pendidikan pada kegiatan PMO Level Daerah.

13. Tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis PBD, profil dan rapor pendidikan, dan platform rapor Pendidikan adalah membuat grup WA untuk setiap Kabupaten/kota untuk memfasilitasi jika ada pertanyaan dari sekolah yang belum memperoleh bimtek.

14. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penetapan Target/Capaian Kinerja dan Rencana Aksi adalah melakukan pendampingan berkelanjutan.

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 4.312.504.856 (39,40%) dari pagu anggaran Rp 10.995.190.000 dengan pagu blokir Rp 528.144.00 (belanja pegawai) dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 0% dari pagu anggaran Rp 50.000.000.

Capaian kinerja Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja A akan diperoleh hasil pada triwulan IV. Akan tetapi dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung dari RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 73,14% (Rp 274.273.905 dari pagu Rp 375.000.000) dengan rincian sebagai berikut:

1. Subkomponen (A) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 93,34% (Rp 78.194.505 dari pagu anggaran Rp 83.777.000). Dilaksanakan melalui kegiatan:

a Identifikasi Nomenklatur Jenis Layanan dan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, di Hotel Mirah Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, tanggal 11 s.d. 13 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah Peserta mendapat informasi terkait nomenklatur standar pelayanan di UPT dan teknis penyusunan Standar pelayanan, lebih lanjut diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini Lembaga memiliki standar pelayanan yang mudah teruji publik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

b Studi Tiru Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ke Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat di BBPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPMPV BMTI), tanggal 18 s.d. 22 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah Petugas mendapatkan Informasi terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Lebih lanjut diharapkan Layanan Informasi kepada masyarakat khususnya Keterbukaan Informasi publik di BPMP Provinsi Kepulauan Riau terselenggara dengan sangat baik atau berpredikat "Terinformasikan"

c Koordinasi dan Konsultasi terkait persuratan dan penggunaan Aplikasi SINDE di Kemendikbudristek, Jakarta, tanggal 7 s.d. 9 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah petugas mendapatkan informasi tentang persuratan, cara penggunaan Tanda Tangan Elektronik menggunakan surat berbentuk PDF, dan tentang kode Hal. Lebih lanjut diharapkan akan Menambahkan informasi tentang persuratan, dan berita update tentang perkembangan SINDE di Lingkungan Seditjen, dan menambah pengetahuan tentang fitur di Aplikasi SINDE.

d Bimbingan Teknis Kehumasan Tahap II Tahun 2023, di Hotel Permata Bogor, Jawa Barat tanggal 6 s.d. 8 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah dan diikuti oleh Tim RBI. Output dari kegiatan ini adalah Petugas mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait strategi dalam meningkatkan citra positif lembaga dan meningkatnya kemampuan wawancara dalam menggali informasi, lebih lanjut diharapkan dapat Meningkatnya peran hubungan masyarakat dalam mendukung program lembaga.

2. Subkomponen (B) Pengelolaan Kepegawaian dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 86,16% (Rp 57.386.100 dari pagu anggaran Rp 66.601.000). Dilaksanakan melalui kegiatan:

a Sosialisasi Aplikasi E-SKP Tahap I, di Hotel Planet Holiday, Kota Batam tanggal 10 s.d. 12 Mei 2023 yang dihadiri oleh pegawai BPMP Prov. Kepri. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Petugas mendapatkan informasi terkait aplikasi e- SKP versi terbaru sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022.

b Koordinasi Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) di Lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, di Hotel The Mirah Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 9 s.d. 12 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah Petugas mendapatkan pemahaman dan informasi terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai, penyusunan HCDP Pegawai, dan Kebijakan Tugas Belajar sehingga dapat disusun Human Capital Development Plan (HCPD) setiap pegawai.

3. Subkomponen (D) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,98% (Rp 41.350.000 dari pagu anggaran Rp 41.360.000). Dilaksanakan melalui kegiatan:

a Pelaporan Hasil Pendampingan sebagai tim Pendamping Pembangunan ZI WBK di Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 12 s.d. 14 Juni 2023. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pengisian LKE ZIWBK BPMP Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian pada aplikasi SIAZIK untuk dinilai oleh Tim Penilai Internal Auditor Itjen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, sehingga terdapat peningkatan hasil Penilaian Mandiri LKE ZI WBK/WBBM BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dari pendampingan pertama sampai kedua nilai LKE naik 2,75.

4. Subkomponen (F) Pengelolaan Data dan Informasi dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dengan realisasi anggaran 71,83% (Rp 39.536.100 dari pagu anggaran Rp 55.040.000). Dilaksanakan melalui kegiatan:

a Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, di BPMP Sumatera Utara pada tanggal 3 s.d. 7 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah petugas mendapatkan pemahaman mengenai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik sehingga diharapkan Lembaga Memiliki Kesiapan untuk dinilai terkait Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023.

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.1 sesuai PK 2023 yang nilainya akan diperoleh pada triwulan ke IV, pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil rekomendasi LHE SAKIP tahun 2022

2. Melakukan pemantauan nilai IKPA melalui omspan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. Melakukan Revisi anggaran dengan tidak mengubah target kinerja
4. Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja triwulanan
5. Mengikuti sosialisasi terkait evaluasi AKIP dan peningkatan nilai Kinerja Anggaran
6. Update Informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau (<https://bpmpepri.kemdikbud.go.id/>) dan Medsos BPMP Provinsi Kepulauan Riau (Facebook : Lpmp Kepulauan Riau dan instagram : bpmpepri_kepulauan_riau).

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala pada pelaksanaan kegiatan Identifikasi Nomenklatur Jenis Layanan dan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah adalah Reviu dan uji publik standar pelayanan belum dapat dilaksanakan karena padatnya agenda lembaga.
2. Kendala dari kegiatan Pelaporan Hasil Pendampingan sebagai tim Pendamping Pembangunan ZI WBK di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Pengelola data dukung pada beberapa area pengungkit masih belum terpolo dan seseragam sehingga perlu melakukan penataan dan pengelolaan data dukung dalam LKE. Kendala cuaca panas ekstrim saat pendampingan kedua sehingga kegiatan survei lingkungan sebatas lingkungan yang dapat dijangkau maka dilanjut fokus pada pemenuhan bukti dokumen dan penataan penyimpanan tautan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Solusi pada kegiatan Reviu dan uji publik standar pelayanan adalah dengan Menjadwalkan tanggal reviu dan uji publik SP bersama Kepala, Kasubag dan Kapokja. dan Meminta tim tatalaksana menyiapkan kegiatan dan menyampaikan kepada tim perencanaan agar mengalokasikan anggaran.
2. Tindak lanjut dari kegiatan Studi Tiru Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ke Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat di BBPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPMPV BMTI) adalah Petugas Studi Tiru menyosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kepada SDM BPMP Prov. Kepri, Membentuk tim atau mengumpulkan tim yang sudah ada untuk membantu PPID dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dan Membedah borang KIP sebagai rujukan untuk memulai/menyusun/memperbaiki Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BPMP Prov. Kepri.
3. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi dan Konsultasi terkait persuratan dan penggunaan Aplikasi SINDE di Kemendikbudristek, Jakarta adalah Mendata Pegawai yang tidak mendapatkan disposisi surat ataupun surat masuk, agar surat dapat didistribusikan secara merata.
4. Tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan Tahap II Tahun 2023, di Hotel Permata Bogor, Jawa Barat adalah Bekerja sama dengan tim media center dalam membangun citra positif lembaga pada setiap media publikasi.
5. Solusi dari kendala kegiatan pendampingan pembangunan ZI/WBK adalah Melakukan pendampingan berkelanjutan untuk dapat saling berkoordinasi dengan tim RBZIWBK yang didampingi lebih intens.
6. Tindak lanjut dari kegiatan Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, di BPMP Sumatera Utara adalah melakukan sosialisasi kepada Lembaga, membentuk tim pengembang KIP, dan memenuhi seluruh Bukti dukung.

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 4.312.504.856 (39,40%) dari pagu anggaran Rp 10.995.190.000 dengan pagu blokir Rp 528.144.000 (belanja pegawai) dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 0% dari pagu anggaran Rp 50.000.000.

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja 84 pada triwulan II ini diperoleh dari perhitungan manual nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) / SMART dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) / OM-SPAM. Pada Bulan Juni 2022, BPMP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai IKPA 90,57 dan Nilai EKA 79,14 (18 Juli 2023) sehingga diperoleh NKA 83,71.

Dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

1. RO Layanan Perkantoran (WA.2005.EBA.994) dengan realisasi sebesar 38,20% (Rp 4.038.230.951 dari pagu Rp 10.570.190.000 termasuk pagu blokir Rp 528.144.000), yang terdiri dari:
 - a Komponen Gaji dan Tunjangan (WA.2005.EBA.994.001) sebesar 38,42% (Rp 1.882.073.747 dari pagu Rp 4.898.670.000 termasuk pagu blokir Rp 528.144.000).
 - b Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (WA.2005.EBA.994.002) sebesar 38,02% (Rp 2.156.157.204 dari pagu Rp 5.671.520.000).
2. RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dan subkomponen Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 99,49 % (Rp 57.807.200 dari pagu Rp 58.103.000) melalui kegiatan Konsultasi PNB dan pemanfaatan BMN di KPKNL Kota Batam, tanggal 15 s.d. 16 Juni 2023. Output dari kegiatan ini Pengusulan tarif PNB disusun dengan baik, dan prosedur permohonan pemanfaatan BMN untuk Koperasi dapat di usulkan ke BPMP dan KPKNL Batam.

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.2, pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan II ini antara lain:
 - a. Revisi ke-3 DIPA tingkat Kanwil DJPb dengan pengesahan tanggal 17 April 2023 terkait revisi halaman III DIPA.
2. Melakukan percepatan belanja,
3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,
4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Kendala / Permasalahan :

Nilai EKA yang kurang maksimal.

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Kegiatan yang sudah dijadwalkan diupayakan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, jika terjadi pergeseran maka segera berkoordinasi dengan bagian perencanaan.
2. Melakukan persiapan dalam penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Menindaklanjuti atas hasil capaian nilai kinerja anggaran maka perlu adanya upaya preventif yang dilakukan agar dapat memperoleh capaian nilai kinerja anggaran yang maksimal dan mencapai target. Melakukan coaching clinic peningkatan Nilai Kinerja Anggaran ke BPMP Provinsi Gorontalo (mendapatkan peringkat 1 NKA).

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Bintan, 18 Juli 2023

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Warsita, S.S., M.Pd.



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW3 : 0	TW3 : 0
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30	TW3 : 0	TW3 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	A	TW3 : -	TW3 : -
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	84	TW3 : 0	TW3 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.17.579.130.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Oktober 2023 sebesar **Rp. 12.643.865.313** atau **71.93%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 31 Oktober 2023 **Rp. 4.935.264.687**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran hingga triwulan III sebesar Rp 4.921.505.988 (54,82%) dari pagu Rp 8.977.695.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 1.494.351.000 (16,65% dari pagu anggaran). Capaian Kinerja Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dengan target 1,96% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.850) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 479.768.868 (57,33%) dari pagu anggaran Rp 836.880.000 (termasuk pagu blokir Rp 143.411.000 atau 17,14%).

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (DI.6397.QDB.850.093) dengan realisasi anggaran Rp 15.237.368 (64,27%) dari pagu Rp 23.710.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (ED) Pendampingan Penatausahaan Dana Transfer Daerah (PDM 03A) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 111.811.000 (30,94%) dari pagu Rp 361.367.000 termasuk pagu blokir Rp 143.411.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pendampingan Percepatan Sinkronisasi Dapodik Untuk Penetapan Penerima dan Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2024, melalui daring, yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya update Dapodik versi 2024, Pemutakhiran Data Pendidikan pada aplikasi Dapodik sesuai kondisi riil, dan teridentifikasinya kendala dan solusi percepatan Dapodik untuk Cut Off Penerima BOS dan BOP Tahun 2024. Lebih lanjut diharapkan dapat meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

- Coaching Clinic Pemanfaatan ARKAS 4 melalui daring, tanggal 13 September 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersosialisasikan kehadiran platform ARKAS 4 sebagai bentuk penyempurnaan platform sebelumnya kepada dinas Pendidikan dan terinformasikannya fitur-fitur unggulan dalam platform ARKAS 4 yang ditujukan untuk membantu daerah dan satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaporkan dana BOS yang lebih praktis, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan administrasi sekolah. Lebih lanjut diharapkan dapat meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.850.094) dengan realisasi anggaran Rp 216.854.800 (58,70%) dari pagu Rp 369.407.000 (termasuk pagu blokir Rp 143.411.000 atau 39,82%) sebagai berikut:

1. Subkomponen (BE) Sinkronisasi Rencana Kerja UPT pada Transisi PAUD-SD dengan Forum Komunikasi PAUD dan Pemangku

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kepentingan (PDM 09) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 dari 2 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran Rp 119.766.000 (98,93%) dari pagu Rp 121.066.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Talkshow Literasi Anak Disejalankan dengan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi terkait Gerakan Nasional Gemar Membaca dan Menulis sebagai upaya pembangunan literasi, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan pemahaman SDM BPMP Kepulauan Riau tentang pentingnya gerakan literasi: Gemar Membaca dan Menulis sebagai perwujudan dalam mendorong peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau.

- Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) bersama dengan kegiatan "The 3rd International Conference Early Childhood Care Education and Parenting (3rd ICECCEP)", di The St. Regis, Jakarta pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya Kebijakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan ke seluruh Peserta Seminar, khususnya Organisasi Mitra PAUD. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang Kebijakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan, yaitu meniadakan tes calistung, mengadakan Masa MPLS 2 minggu, dan pemberian masa belajar ada anak yang menyenangkan melalui kemampuan pondasi.

- Parade Budaya dan "Children Market Day", di Tanjungpinang City Center (TCC) Mall, Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya Kebijakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan ke seluruh Peserta Seminar, khususnya Organisasi Mitra PAUD. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang Kebijakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan, yaitu meniadakan tes calistung, mengadakan Masa MPLS 2 minggu, dan pemberian masa belajar ada anak yang menyenangkan melalui kemampuan pondasi.

2. Subkomponen (BT) Identifikasi Mitra Pembangunan pada Penguatan Transisi PAUD (PDM 09) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran Rp 12.900.000 (96,99%) dari pagu Rp 13.300.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi Pemda Dalam Penjaringan Mitra Transisi PAUD-SD, Pengimbasan PSP, dan Peningkatan Litnum, di 7 Kab/Kota dan Provinsi pada tanggal 25 Agustus s.d. 3 September 2023 yang diikuti oleh Pokja Bunda PAUD, Forkom Transisi PAUD-SS, IGTKI, Himpaudi, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Output dari kegiatan ini adalah Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Transisi PAUD-SD, Pemetaan Pengimbasan PSP oleh pemda yang dibuktikan dengan SK Pengimbasan PSP, Peningkatan Adoption Rate PMM pada topik Transisi PAUD-SD, dan Hasil konfirmasi sekolah yang melaksanakan tes calistung 5. Tersampainya informasi mengenai alat bantu transisi PAUD-SD. Lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemda dalam program Transisi PAUD-SD

Meningkatnya adoption rate PMM pada topik Transisi PAUD-SD, Dimanfaatkannya alat bantu transisi PAUD-SD dan panduan Pembelajaran Litnum, serta terdatanya proses pengimbasan PSP.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.850.096) dengan realisasi anggaran 158.629.700 (98,33%) dari pagu Rp 161.320.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (DA) Kick Off Kampus Mengajar Angkatan 6 (PDM 10) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran 100% dari pagu Rp 6.235.000 yang dilaksanakan melalui Kickoff Program Kampus Mengajar Angkatan 6 pada tanggal 10 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah Terjalinnnya komunikasi awal antara Mahasiswa, DPL, Kepala Sekolah, Guru Pamong dan Dinas Pendidikan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan Peningkatan hasil literasi dan Numerasi siswa di sekolah sasaran program kampus mengajar angkatan 6.

2. Subkomponen (DE) Pendampingan penerapan SPM ke pemerintah daerah (PDM 10) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran 152.394.700 (98,27%) dari pagu Rp 155.085.000 yang dilaksanakan melalui Pendampingan Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 6 di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Agustus s.d. 3 September 2023. Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Program Kerja Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 6. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan Peningkatan hasil literasi dan Numerasi siswa di sekolah sasaran program kampus mengajar angkatan 6.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala yang terjadi pada pelaksanaan Pendampingan Percepatan Sinkronisasi Dapodik Untuk Penetapan Penerima dan Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2024, melalui daring adalah terdapat sekolah yang tidak aktif tetapi masih terdata di dapodik, Beberapa sekolah tidak memiliki siswa di tahun ini sehingga tidak bisa melakukan sinkronisasi DAPODIK, dan Keterbatasan kompetensi SDM khususnya di Bidang PAUD.

2. Kendala yang terjadi pada kegiatan Kickoff Program Kampus Mengajar Angkatan 6 adalah Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa untuk bergabung secara luring pada kegiatan kickoff Kampus Mengajar angkatan 6.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut dari pelaksanaan Pendampingan Percepatan Sinkronisasi Dapodik Untuk Penetapan Penerima dan Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2024, melalui daring adalah melakukan advokasi dan pendampingan kepada dinas pendidikan untuk mendata sekolah yang tidak aktif untuk dilakukan penutupan dan pelatihan kepada operator PAUD terkait pendataan melalui Dapodik.

2. Tindak lanjut dari pelaksanaan Talkshow Literasi Anak Disejalankan dengan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan advokasi dan pendampingan kepada dinas pendidikan terkait Gerakan Literasi (Gemar Membaca dan Menulis) di Satuan Pendidikan.

3. Tindak lanjut dari pelaksanaan Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) bersama dengan kegiatan "The 3rd International Conference Early Childhood Care Education and Parenting (3rd ICECCEP)", di The St. Regis, Jakarta adalah mendorong transisi PAUD ke SD yang berjalan dengan mulus dan proses belajar mengajar di PAUD dan SD kelas awal menjadi selaras dan berkesinambungan.

4. Tindak lanjut pada kegiatan Parade Budaya dan "Children Market Day", di Tanjungpinang City Center (TCC) Mall, Kota Tanjungpinang dan Pembukaan Kegiatan Gebyar PAUD dan Jambore PAUD Tahun 2023, di Lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang adalah Kordinasi dan pendampingan melalui WA Grup Transisi PAUD SD Kepri.

B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran hingga triwulan III sebesar Rp 4.921.505.988 (54,82%) dari pagu Rp 8.977.695.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 1.494.351.000 (16,65% dari pagu anggaran). Capaian Kinerja Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan target 30% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

pendukung dari RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.750) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.441.737.120 (54,56%) dari pagu anggaran Rp 8.140.815.000 (termasuk pagu blokir Rp 1.350.940.000 atau 16,59%).

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka (DI.6397.QDB.750.091) dengan realisasi anggaran Rp 173.816.000 (50,75 %) dari pagu Rp 342.502.000 termasuk pagu blokir 129.812.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (CA) Bimbingan Teknis penerapan implementasi kurikulum dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 103.406.000 (86,37%) dari pagu Rp 113.231.000 yang dilaksanakan melalui Kegiatan AKT-7 Pendampingan Kelompok (Lokakarya 7 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7/Panen Hasil Belajar) di TCC Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur dari Dinas Pendidikan di 7 Kab/Kota dan Provinsi serta perwakilan dari sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Output dari kegiatan ini adalah Tersosialisasikannya program Guru Penggerak kepada Kepala Daerah Kota Tanjungpinang. Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka (DI.6397.QDB.750.092) dengan realisasi anggaran Rp 195.126.100 (62,64%) dari pagu Rp 311.500.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (AB) Sosialisasi Kebijakan Asesmen Nasional (PDM 06) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 300.000 (3,09%) dari pagu Rp 9.700.000 yang dilaksanakan melalui Sosialisasi Kebijakan Asesmen Nasional melalui daring pada tanggal 18 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim teknis AN dinas pendidikan dan Kemenag, serta proktor AN mulai jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA seluruh Provinsi yang berjumlah 153 peserta. Output dari kegiatan ini adalah Tersampainya POS AN tahun 2023 kepada Dinas Pendidikan, Kemenag dan Sekolah. Lebih lanjut diharapkan Pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan POS sehingga mutu pendidikan dapat di peroleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Subkomponen (AC) Verifikasi, Validasi Kesiapan Infrastruktur Satuan Pendidikan (PDM 06) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan Rp 300.000 (20%) dari pagu Rp 1.500.000 yang dilaksanakan melalui Verifikasi Validasi Kesiapan Infrastruktur Satuan Pendidikan melalui daring pada tanggal 20 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Penanggung jawab AN dan Operator AN Dinas Pendidikan berjumlah 24 peserta. Output dari kegiatan ini adalah Data yang terverifikasi terkait dengan kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di satuan pendidikan. Lebih lanjut diharapkan Pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan POS sehingga mutu pendidikan dapat di peroleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Subkomponen (AD) Sosialisasi Kebijakan Asesmen Nasional (PDM 06) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 150.366.100 (63,43%) dari pagu Rp 237.060.000 yang dilaksanakan melalui Sosialisasi Kebijakan Asesmen Nasional melalui daring pada tanggal 18 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim teknis AN dinas pendidikan dan Kemenag, serta proktor AN mulai jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA seluruh Provinsi yang berjumlah 153 peserta. Output dari kegiatan ini adalah Tersampainya POS AN tahun 2023 kepada Dinas Pendidikan, Kemenag dan Sekolah. Lebih lanjut diharapkan Pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan POS sehingga mutu pendidikan dapat di peroleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

4. Subkomponen (AE) Posko Pelaksanaan Asesmen Nasional dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 7.440.000 (44,77 %) dari pagu Rp 16.620.000 yang dilaksanakan melalui Pelatihan Proktor ANBK SD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023, di Golden View Hotel, Kota Batam pada tanggal 23 s.d. 26 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman proktor dalam pelaksanaan ANBK. Lebih lanjut diharapkan Pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan POS sehingga mutu pendidikan dapat di peroleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.750.094) dengan realisasi anggaran Rp 1.298.249.881 (40,39%) dari pagu Rp 3.214.207.000 termasuk pagu blokir Rp 1.350.940.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (BI) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 162.044.885 (87,80%) dari pagu Rp 184.249.000 yang dilaksanakan melalui Koordinasi dan Kolaborasi Optimalisasi Komunitas Belajar Ramah Guru Dalam Sekolah Pada Sekolah Piloting Leadership Development Program Kelompok Gurita, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 10 s.d. 13 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah Progress report capaian piloting Kombel Ramah Guru dalam Sekolah pada Sekolah Piloting yang terakumulasi menjadi laporan LDP Kelompok Gurita. Lebih lanjut diharapkan adanya 1. Meningkatnya hasil belajar siswa pada sekolah piloting project Kombel Ramah Guru dalam Sekolah 2. Meningkatnya pemahaman guru terhadap siklus inkuiri dalam melaksanakan aktivitas kombel dalam sekolah.

2. Subkomponen (BR) Evaluasi dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 358.219.312 (83,25%) dari pagu Rp 430.307.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Tata Kelola Pendidikan, di Sahid Batam Center Hotel & Convention Batam Centre, Kota Batam tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah Diperolehnya informasi terkait isu-isu terkait tata kelola pendidikan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan melalui tata kelola pendidikan yang lebih baik.

b Refleksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, di Grand Mercure Jakarta tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya Laporan kepada Eselon I (Ditjen PAUDDasmen) terkait pelaksanaan Program Kegiatan pada masing-masing PDM (Project Turunan). Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dalam setiap PDM.

c Monitoring dan Evaluasi Komitmen Pemda terkait Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023. Output dari kegiatan ini adalah BPMP mendapatkan informasi level komitmen sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah, sebagai bahan refleksi bagi BPMP dalam mendampingi Pemda terkait Kebijakan Merdeka Belajar, dan Data dukung komitmen Pemerintah Daerah dapat terdokumentasi dengan baik.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data (DI.6397.QDB.750.095) dengan realisasi anggaran Rp 646.938.321 (43,83%) dari pagu Rp 1.421.041.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (FA) Analisis Profil Pendidikan (PDM 04C) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 49.395.000 (100%) dari pagu Rp 49.395.000 yang dilaksanakan melalui Analisis Profil Pendidikan di BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Bagian perencanaan Dinas Pendidikan dan Bappeda di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Pemda dapat memahami akar masalah dari kondisi pendidikan yang ada berdasarkan rapor pendidikan. Lebih lanjut diharapkan adanya Peningkatan Mutu pendidikan khususnya SPM.

2. Subkomponen (FJ) Pendampingan perencanaan dan penetapan target kinerja/ capaian/ rencana aksi/ APBD dengan 67% pelaksanaan kegiatan (2 dari 3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 325.996.121 (87,39%) dari pagu Rp 373.031.000 yang dilaksanakan melalui:

- Pendampingan Perencanaan dan Penetapan Target/Capaian Kinerja dan Rencana Aksi, di Davienna Hotel, pada tanggal 26 s.d. 27 September 2023 yang melibatkan bagian perencanaan Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD dengan jumlah keseluruhan 24 peserta. Output dari kegiatan ini adalah Perencanaan/program kerja tahun 2024 Dinas Pendidikan, tersinkron dengan capaian Standar Pelayanan Minimal atau indikator kinerja urusan Pendidikan tahun 2023. Lebih lanjut diharapkan APBD mengakomodir indikator standar pelayanan minimal.

- Pendampingan Pada Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data dan Rapor Pendidikan Tahun 2023 Kepada Pemerintah Daerah di

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi dapat memahami rencana pendampingan PBD dan Rapor Pendidikan Tahun 2023 yang akan dilakukan oleh BBPPMPV Pertanian dan Peta kluster pelatihan PBD dan Rapor Pendidikan 2023 jenjang SMK. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan pemanfaatan PBD dalam perencanaan sekolah khususnya tingkat SMK.

- Bimbingan Teknis ANBK Tahun 2023, Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Jenjang SD dan SMP, di Kota Batam pada tanggal 7 s.d. 21 Agustus 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Bagian Perencanaan dan Kepala Dinas Pendidikan serta Bappeda dari 7 Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Operator/proktor dapat memahami teknis AN dan memanfaatkan hasil AN berupa rapor pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan berdasarkan rapor pendidikan.

3. Subkomponen (QS) Bimtek Pemulihan Pembelajaran melalui Penguatan Literasi dengan 33% pelaksanaan kegiatan (1 dari 3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 8.435.000 (25,67%) dari pagu Rp 364.510.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Pemda dalam Pemulihan Pembelajaran di Aston Batam Hotel & Residence Kota Batam tanggal 31 Juli s.d. 1 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah UPT kemendikbudristek di daerah dan pemda (dinas pendidikan) memahami dan dapat mengoptimalkan pelaksanaan 5 program dukungan PDM-10, yaitu Kampus Mengajar, Guru Penggerak, Buku Bacaan Bermutu, Tindaklanjut Perencanaan Berbasis Data untuk Benahi Literasi, dan Mitra Pembangunan. Lebih lanjut diharapkan Terbangunnya kolaborasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam upaya pemulihan dan transformasi pembelajaran.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.750.096) dengan realisasi anggaran Rp 1.290.377.918 (67,96%) dari pagu Rp 1.898.667.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (DA) Pendampingan Program GSS (PDM 05 dan PDM 11) dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 7.405.000 (7,22%) dari pagu Rp 102.567.000 yang dilaksanakan melalui:

- Advokasi dan Optimalisasi Peran Tim Pembina UKS dalam Implementasi Kampanye Sekolah Sehat di Kabupaten Lingga pada tanggal 11 s.d. 31 Agustus 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Kepala, Kapokja, dan tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya program kampanye sekolah sehat kepada Tim Pembina UKS Kabupaten Lingga, terbentuknya Tim Pembina UKS Kabupaten Lingga, dan teroptimalkannya peran TP UKS Lingga dalam implementasi program KSS. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

- Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, di Kings Hotel, Kota Batam, pada tanggal 26 s.d. 28 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah Terjalin koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat untuk optimalisasi TP UKS Provinsi dan Kabupaten/Kota (unsur Setda, Disdik, Dinkes, dan Kemenag) serta tersampainya konsep Kampanye Sekolah Sehat. Lebih lanjut diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerjasama dengan TP UKS/M Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Koordinasi Kemitraan Sinkronisasi Program Kampanye Sekolah Sehat dengan Tim Pembina UKS/M Provinsi/Kabupaten/Kota, di Biro Kesra, Sekda Provinsi Kepri, tanggal 24 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah Kesepakatan untuk melakukan pengaktifan kembali TPUPKS baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, dan diawali dari Kabupaten Lingga yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2023, dengan administrasi berasal dari BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut diharapkan Kerjasama yang terjalin dengan tim TPUKS Kab/Kota/Provinsi dalam rangka implementasi KSS dapat meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

2. Subkomponen (DC) Pendampingan Implementasi Pendidikan Khusus (PDM 05 dan PDM 12) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 80.040.000 (86,10%) dari pagu Rp 92.960.000 yang dilaksanakan melalui Advokasi dan Pendampingan Implementasi Pendidikan Khusus/Inklusif di 7 Kab/Kota dan Provinsi pada tanggal 1 s.d. 16 September 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya kebijakan Implementasi Pendidikan Khusus dan tersedianya Rencana Tindak Lanjut dalam Implementasi Pendidikan Khusus.

3. Subkomponen (DE) Pendampingan penerapan SPM ke pemerintah daerah dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 169.052.040 (98,99%) dari pagu Rp 170.782.000 yang dilaksanakan melalui:

- Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023, di Hotel Le Meridien Jakarta pada tanggal 13 s.d. 15 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini sebagai Penguatan pera BPMP dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

- Kolaborasi Dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau pada Kegiatan Literasi Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Siswa di SMAN 4 Tanjungpinang pada tanggal 25 Agustus 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Kepala, Kapokja, dan tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Kerjasama dalam peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau dan Pembahasan MoU antara BPMP Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, dan Kerjasama konten pengelolaan dan perpustakaan untuk satuan pendidikan.

4. Subkomponen (DG) Pertemuan periodik PMO dengan 90% (8 dari 9 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 643.352.090 (58%) dari pagu Rp 1.109.233.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Rapat PMO Level Daerah Periode Juli 2023 di Beverly Hotel dan Periode September 2023 di Aston Inn Gideon yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 28 Juli 2023 dan 26 s.d. 27 September 2023. Kegiatan ini diikuti oleh tim PMO dari 8 kab/kota/provinsi, Tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau, BGP Provinsi Kepulauan Riau, serta Direktorat Perwalian. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya target kinerja pada Pokja yang terdapat di BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang disinergikan dengan pemda (dinas pendidikan kab/kota/prov) serta penandatanganan komitmen bersama dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar dan capaian/progress yang telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan kab/kota/prov dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar serta Penyelesaian/Usulan Solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan sekolah penggerak di Provinsi Kepulauan Riau dari terlaksananya program-program Kemendikbudristek di masing-masing daerah sesuai kewenangannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Bootcamp Kepada Komunitas Belajar Dalam Sekolah Ramah Guru Prototipe Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, di Bintan Pearl Beach Resort Kab. Bintan tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah menjadi acuan bagi PTK dalam merancang, melaksanakan dan merefleksikan komunitas belajar, dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait seperti yayasan, dinas pendidikan prov/kab.kota, pemda, BBGP/BGP, BBPMPV/BPMP, dan mitra pembangunan dalam mendukung tercapainya tujuan komunitas belajar. Lebih lanjut diharapkan Peran pemangku kepentingan dalam membantu kornel berproses dan bertumbuh untuk meningkatkan hasil belajar murid.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah (DI.6397.QDB.750.097) dengan realisasi anggaran Rp 832.998.900 (87,81%) dari pagu Rp 948.668.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (GA) TOT Pengelolaan dan Pemanfaatan peralatan TIK (PDM 03A dan PDM 03B) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 199.770.900 (99,72%) dari pagu Rp 200.336.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Platform Sumber Daya Sekolah, Chromebook, dan belajar.id) di Harris Batam Resort tanggal 20 s.d. 22 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan platform sumber daya sekolah, Chromebook, akun pembelajaran pada satuan pendidikan, dan fasilitas dari Google Workspace for Education dan tersedianya fasilitator di setiap daerah untuk memberikan penguatan tentang pemanfaatan platform sumber daya sekolah, Chromebook, akun pembelajaran pada satuan pendidikan, dan fasilitas dari Google Workspace for Education kepada satuan Pendidikan.

2. Subkomponen (GB) Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan peralatan TIK (PDM 03A dan PDM 03B) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 633.228.000 (86,40%) dari pagu Rp 732.932.000 yang dilaksanakan melalui:

- Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook dan Akun Belajar.id) di 7 Kab/Kota pada tanggal 10 s.d. 15 Agustus 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh Kepala, Kapokja, dan tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan chromebook, akun pembelajaran pada satuan pendidikan, dan fasilitas dari Google Workspace for Education (GWfE) dan meningkatnya aktivasi akun belajar.id.

- Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Platform Sumber Daya Sekolah), pada tanggal 20 s.d. 21 September 2023. Output dari kegiatan ini adalah rencana tindak lanjut pengimbasan pemanfaatan platform sumber daya sekolah kepada satuan pendidikan disekitar satuan pendidikannya. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala pada kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Optimalisasi Komunitas Belajar Ramah Guru Dalam Sekolah Pada Sekolah Piloting Leadership Development Program Kelompok Gurita, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jawa Timur adalah Data yang diperoleh melalui instrumen sulit untuk diolah, karena bersifat pertanyaan terbuka dan jawaban yang diberikan teridentifikasi bias.

2. Kendala pada kegiatan Refleksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, di Grand Mercure Jakarta adalah Update progres pelaksanaan/capaian masing-masing PDM yang masih belum dapat dikoordinir dengan baik dikarenakan jadwal dari masing-masing Pokja yang sangat padat.

3. Kendala pada Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook dan Akun Belajar.id) di 7 Kab/Kota adalah Tidak sinkronnya data pada dashboard pemantauan aktivasi belajar.id dengan data dilapangan.

4. Kendala pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Platform Sumber Daya Sekolah) adalah dalam pemanfaatan SIPLah sekolah di daerah pulau terkendala terkait keterbatasan penyedia.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Asesmen Nasional melalui daring dan Pelatihan Proktor ANBK SD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023, di Golden View Hotel, Kota Batam adalah Perlu melakukan monitoring guna memastikan pelaksanaan AN sesuai dengan POS.

2. Tindak lanjut dari kegiatan Verifikasi Validasi Kesiapan Infrastruktur Satuan Pendidikan melalui daring adalah Koordinasi dengan Dinas Pendidikan guna memastikan satuan pendidikan telah mengisi web ANBK.

3. Solusi pada kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Optimalisasi Komunitas Belajar Ramah Guru Dalam Sekolah Pada Sekolah Piloting Leadership Development Program Kelompok Gurita, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jawa Timur adalah Memperbaiki instrumen sesuai hasil masukan dan penjarangan data kembali menggunakan instrumen yang baru.

4. Tindak lanjut dari kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Tata Kelola Pendidikan, di Sahid Batam Center Hotel & Convention Batam Centre, Kota Batam adalah melakukan pendampingan kepada daerah untuk meningkatkan tata kelola pendidikan yang lebih baik melalui program kegiatan yang telah direncanakan di BPMP Provinsi kepulauan riau.

5. Solusi dari kegiatan Refleksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, di Grand Mercure Jakarta adalah perlu dilakukan rapat reguler (seminggu/2 minggu sekali) untuk menghimpun informasi progress pelaksanaan kegiatan.

6. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Program GSS (PDM 05 dan PDM 11) adalah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan TPUKS Provinsi/Kab/Kota.

7. Tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook dan Akun Belajar.id) di 7 Kab/Kota adalah dengan berkoordinasi dengan tim PDM 03B Pusat.

8. Tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Peralatan TIK (Platform Sumber Daya Sekolah) adalah dengan melakukan pendampingan ke dinas pendidikan agar mendorong UMKM setempat mendaftar sebagai penyedia di SIPLah.

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 6.353.756.803 (63,53%) dari pagu anggaran Rp 10.000.536.000 dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari pagu anggaran Rp 50.000.000.

Capaian kinerja Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja A akan diperoleh hasil pada triwulan IV. Akan tetapi dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan III BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung dari RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 92,28% (Rp 346.040.814 dari pagu Rp 375.000.000) dengan rincian sebagai berikut:

1. Subkomponen (A) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,96% (Rp 83.741.625 dari pagu anggaran Rp 83.777.000). Dilaksanakan melalui kegiatan:

a Workshop Persiapan Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM Tahun 2023, di Hotel Salak Heritage Bogor, Jawa Barat, tanggal 11 s.d. 14 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pemahaman satker yang lulus administrasi untuk persiapan desk evaluasi Kemenpan RB oleh Tim Pendamping desk evaluasi Kemenpan RB terkait pelaksanaan desk evaluasi dimuali dari bahan paparan, persiapan dan simulasi persiapan semi deskevaluasi sampai wawancara oleh Tim Pendampiang. Lebih lanjut diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini Lembaga dapat mengidentifikasi indikator sebagai bahan persiapan desk evaluasi bagi satkeryang lulus administrasi untuk persiapan desk evaluasi KemenpanRB, antara lain: Tampilan dan Penguasaan Materi/Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas, Kesesuaian Warna, Intonasi, Materi, Profil Satuan Kerja, Visi Misi, Tugas & Fungsi, Sasaran Kerja/Beban Kerja, Sumber Daya

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Manusia, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Informasi mengenai pembangunan ZI Satker oleh masyarakat, stakeholder dan lingkungan, Program Unggulan dan Inovasi, Program Unggulan, Produk Unggulan, Informasi Inovasi Perubahan, Dampak/ Manfaat Inovasi terhadap Masyarakat Monev Inovasi Unggulan, Testimoni, Tindak Lanjut Hasil Monev, Mitigasi Resiko Dalam Pencapaian Kinerja, Identifikasi Resiko, Mitigasi Resiko, Pencapaian Kinerja Utama, Capaian fokus pada area perubahan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Layanan Publik, serta Catatan Penilaian Pembangunan ZI WBK Tahun Sebelumnya, Rekomendasi KemenpanRB dan tindak lanjut, Data dukung, penghargaan.

b Reviu Road Map Reformasi Birokrasi Ditjen PAUD Dasmen Tahun 2020-2024, di Hotel Mirah Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, tanggal 4 s.d. 7 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah Bahan presentasi untuk Direktur PDM dalam rangka kegiatan pemaparan RB kepada seluruh jajaran Direktur dan Kepala UPT di lingkungan Ditjen PDM Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kondisi Ditjen Paud Dasmen Saat Ini Peran Pimpinan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi. Lebih lanjut diharapkan dapat tersedianya konten dan materi paparan hasil review topik

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kondisi Ditjen Paud Dasmen Saat Ini Peran Pimpinan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi PermenPAN RB nomor 3 Tahun 2023 tentang Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024, fokus penajaman diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta keteringgalan dengan birokrasi negara lain sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator RB agar lebih relevan dan berdampak. Fokus penyelesaian Isu Hulu dan Fokus penyelesaian Isu Hilir"

2. Subkomponen (B) Pengelolaan Kepegawaian dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,99% (Rp 66.598.939 dari pagu anggaran Rp 66.601.000). Dilaksanakan melalui kegiatan Workshop Pembekalan Teknis Admin SPAD dalam Rangka Pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Tahun 2023 di The Veranda Hotel, di Jakarta tanggal 12 s.d. 14 Juli 2023 yang dihadiri oleh pegawai BPMP Prov. Kepri. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pemahaman Teknis Admin SPAD terkait pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai sehingga prediksi kompetensi pegawai dapat dipetakan dengan baik

3. Subkomponen (C) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,49% (Rp 57.807.200 dari pagu anggaran Rp 58.103.000). Dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Percepatan Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2023, di Kota Batam tanggal 1 s.d. 2 September 2023 yang dihadiri oleh pegawai BPMP Prov. Kepri. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Peningkatan Percepatan Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2023.

4. Subkomponen (D) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,98% (Rp 41.350.000 dari pagu anggaran Rp 41.360.000). Dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Implementasi Strategi Anti Fraud, yaitu Penyusunan Peta Resiko Fraud Bagi Satuan Kerja, di Hotel Best Western Premier Panbil, Kota Batam pada tanggal 22 s.d. 25 Agustus 2023. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pemahaman Tentang Strategi Anti Fraud dengan Penyusunan Peta Resiko Fraud Bagi Satuan Kerja.

5. Subkomponen (F) Pengelolaan Data dan Informasi dengan 50% pelaksanaan kegiatan (1 dari 2 kegiatan) dengan realisasi anggaran 77,98% (Rp 42.919.700 dari pagu anggaran Rp 55.040.000). Dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pembuatan Konten Pengelolaan Perpustakaan Untuk Pemulihan Pembelajaran, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Juli 2023. Output dari kegiatan ini adalah Kerjasama dalam peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau, Pembahasan MoU antara BPMP Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, dan Kerjasama konten pengelolaan dan perpustakaan untuk satuan Pendidikan. Lebih lanjut diharapkan dapat menginisiasi terjalannya komunikasi antara stakeholder dalam hal peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.1 sesuai PK 2023 yang nilainya akan diperoleh pada triwulan ke IV, pada triwulan III BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan nilai IKPA melalui omspan
2. Melakukan Revisi anggaran dengan tidak mengubah target kinerja
3. Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja triwulanan
4. Melakukan evaluasi mandiri SAKIP Tahun 2023
5. Update Informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau (<https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/>) dan Medsos BPMP Provinsi Kepulauan Riau (Facebook : Lpmp Kepulauan Riau dan instagram : bpmp_kepulauan_riau).

Kendala / Permasalahan :

1. Pencapaian nilai IKPA yang kurang maksimal yang disebabkan terlambatnya pelaksanaan realisasi belanja modal. Hal tersebut terjadi karena terdapat error pada aplikasi SAKTI sehingga akun PPK tidak dapat melanjutkan proses pertanggungjawaban keuangan, kemudian pada bulan Juni terjadi pergantian PPK sehingga memerlukan waktu untuk proses pergantian PPK di KPPN Tanjungpinang.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut dari kegiatan Workshop Persiapan Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM Tahun 2023, di Hotel Salak Heritage Bogor, Jawa Barat dan Reviu Road Map Reformasi Birokrasi Ditjen PAUD Dasmen Tahun 2020-2024, di Hotel Mirah Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat adalah Pelaksanaan Desk Evaluasi KemenpanRB bagi satker yang lulus administrasi (BPMP Provinsi Kaltim, BPMP Provinsi Sulteng, Ditjen PAUD, BPMP Provinsi Kalteng, BPMP Provinsi Sulsel) dan Capaian kinerja berbasis pembangunan ZIWBK/WBBM di satker pusat dan UPT
2. Tindak lanjut dari kegiatan Workshop Pembekalan Teknis Admin SPAD dalam Rangka Pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Tahun 2023 di The Veranda Hotel, di Jakarta adalah melaksanakan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai.
3. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Pembuatan Konten Pengelolaan Perpustakaan Untuk Pemulihan Pembelajaran, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah Pembuatan konten video pengelolaan dan penataan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dan Glorifikasi konten video ke sosial media dan satuan pendidikan,
4. Solusi untuk kendala realisasi belanja modal adalah berkoordinasi dengan KPPN Tanjungpinang untuk kelancaran proses pertanggungjawaban dan pergantian pejabat perbendaharaan.

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 6.353.756.803 (63,53%) dari pagu anggaran Rp 10.000.536.000 dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi

anggaran sebanyak 100% dari pagu anggaran Rp 50.000.000.

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja 84 pada triwulan III ini diperoleh dari perhitungan manual nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) / SMART dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) / OM-SPAM. Pada Bulan September 2023, BPMP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai IKPA 92,87 dan Nilai EKA 85,28 (15 Oktober 2023) sehingga diperoleh NKA 88,32.

Dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

1. RO Layanan Perkantoran (WA.2005.EBA.994) dengan realisasi sebesar 62,41% (Rp 6.007.715.989 dari pagu Rp 9.625.536.000, yang terdiri dari:

a Komponen Gaji dan Tunjangan (WA.2005.EBA.994.001) sebesar 69,42% (Rp 2.744.919.880 dari pagu Rp 3.954.016.000.

b Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (WA.2005.EBA.994.002) sebesar 57,53% (Rp 3.262.796.109 dari pagu Rp 5.671.520.000).

2. RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dan subkomponen Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 99,49 % (Rp 57.807.200 dari pagu Rp 58.103.000) melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada semester I.

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.2, pada triwulan III BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan III ini antara lain:

a. Revisi ke-4 DIPA tingkat Kanwil DJPb dengan pengesahan tanggal 13 Juli 2023 terkait revisi halaman III DIPA,

b. Revisi ke-5 DIPA tingkat DJA dengan pengesahan tanggal 18 Juli 2023 terkait perubahan pagu anggaran belanja pegawai terkait Surat Menteri Keuangan No S-557/MK.02/2023 tentang Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023 tanggal 7 Juli 2023,

c. Revisi ke-6 DIPA tingkat DJA dengan pengesahan tanggal 18 Agustus 2023 terkait Tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S254/MK.2/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Relaksasi Blokir untuk Kegiatan Prioritas (Pemulihan Pembelajaran),

d. Revisi ke-7 DIPA tingkat DJA dengan pengesahan tanggal 26 September 2023 terkait perubahan pagu anggaran belanja pegawai untuk pemenuhan Belanja Operasional ke Ditjen Kebudayaan).

2. Melakukan percepatan belanja,

3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,

4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Kendala / Permasalahan :

Kendala pada pelaksanaan realisasi belanja modal yaitu terdapat error pada aplikasi SAKTI sehingga akun PPK tidak dapat melanjutkan proses pertanggungjawaban keuangan, kemudian pada bulan Juni terjadi pergantian PPK sehingga memerlukan waktu untuk proses pergantian PPK di KPPN Tanjungpinang.

Strategi / Tindak Lanjut :

Berkoordinasi dengan KPPN Tanjungpinang untuk kelancaran proses pertanggungjawaban dan pergantian pejabat perbendaharaan

3. REKOMENDASI PIMPINAN

a. Menindaklanjuti atas hasil capaian nilai kinerja anggaran maka perlu adanya upaya preventif yang dilakukan agar dapat memperoleh capaian nilai kinerja anggaran yang maksimal dan mencapai target, yaitu 95% pada bulan November 2023

b. Kegiatan yang sudah dijadwalkan diupayakan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, jika terjadi pergeseran maka segera berkoordinasi dengan bagian perencanaan

c. Segera menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pemulihan pembelajaran (hasil relaksasi blokir AA).

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Bintan, 31 Oktober 2023

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Warsita, S.S., M.Pd.



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW4 : 1,96	TW4 : 2,14
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30	TW4 : 30	TW4 : 87,5
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	84	TW4 : 84	TW4 : 96.40

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.17.579.130.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 17.225.533.897** atau **97,99%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 353.596.103**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp 7.175.683.194 (95,31%) dari pagu Rp 7.528.594.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 45.250.000 (0,60% dari pagu anggaran). Capaian Kinerja Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dengan target 1,96% telah tercapai sebesar 2,14%. Kegiatan pendukung pencapaian berasal dari RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.850) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 691.007.808 (99,65%) dari pagu anggaran Rp 693.469.000.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.850.094) dengan realisasi anggaran Rp 223.804.800 (99,66%) dari pagu Rp 224.569.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (BE) Sinkronisasi Rencana Kerja UPT pada Transisi PAUD-SD dengan Forum Komunikasi PAUD dan Pemangku Kepentingan (PDM 09) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 126.716.000 (99,90%) dari pagu Rp 126.839.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan pada Kegiatan Workshop Transisi PAUD-SD, di Kabupaten Bintan, yang dilaksanakan tanggal 9 s.d.10 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pendampingan Workshop Transisi PAUD-SD di Kabupaten Bintan. Lebih lanjut diharapkan dapat membangun komitmen bunda PAUD se-Kabupaten Bintan dalam menyukseskan program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data (DI.6397.QDB.850.095) dengan realisasi anggaran Rp 83.339.000 (99,74%) dari pagu Rp 83.557.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (FC) Pemantauan Pengumpulan Data dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 dari 2 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran Rp 119.766.000 (98,93%) dari pagu Rp 121.066.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan Pengumpulan Data Rapor Pendidikan Jenjang PAUD melalui daring pada tanggal 14 November 2023. Peserta pada kegiatan ini adalah Kepala sekolah PAUD yang belum mengakses rapor pendidikan dan mengunduh lembar PBD. Output dari kegiatan ini adalah peserta diharapkan dapat mengakses rapor pendidikan serta mampu menerapkan perencanaan peningkatan mutu pendidikan di satuan PAUD berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah. Lebih lanjut diharapkan adanya transformasi satuan pendidikan dengan pembiasaan menerapkan perencanaan berbasis data.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah (DI.6397.QDB.850.097) dengan realisasi anggaran Rp 108.154.000 (100%) dari pagu Rp 108.154.000 sebagai berikut:

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Subkomponen (GB) Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan peralatan TIK (PDM 03A) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan dengan realisasi anggaran 100% dari pagu Rp 108.154.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Chromebook untuk Pembelajaran pada tanggal 17 November 2023 yang diikuti oleh satuan pendidikan penerima bantuan peralatan TIK (Chromebook) di Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Peserta memahami cara penggunaan chromebook dan mampu memanfaatkan chromebook untuk pembelajaran di satuan pendidikan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Percepatan Verval Data dan Pemanfaatan Chromebook Bantuan DAK Fisik melalui daring pada tanggal 13 November 2023 dan 13 Desember 2023 yang diikuti oleh satuan pendidikan penerima bantuan peralatan TIK (Chromebook) dari DAK Fisik di Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah peningkatan progres verval Verval Data dan Pemanfaatan Chromebook Bantuan DAK Fisik. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang terjadi pada pelaksanaan Kegiatan Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Chromebook untuk Pembelajaran dan Percepatan Verval Data dan Pemanfaatan Chromebook Bantuan DAK Fisik melalui daring adalah terdapat beberapa Serial number yang sudah diregistrasikan diklain oleh sekolah lain sehingga status vervalnya menjadi tidak lengkap.

Strategi / Tindak Lanjut :

Solusi dari kendala yang terjadi pada pelaksanaan Kegiatan Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Chromebook untuk Pembelajaran dan Percepatan Verval Data dan Pemanfaatan Chromebook Bantuan DAK Fisik melalui daring adalah berkoordinasi dengan pusat untuk mengunci data SN yang sudah valid.

B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (DI.6397.QDB) dengan realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp 7.175.683.194 (95,31%) dari pagu Rp 7.528.594.000 termasuk pagu blokir sebanyak Rp 45.250.000 (0,60% dari pagu anggaran). Capaian Kinerja Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan target 30% telah tercapai sebesar 87,50%. Kegiatan pendukung pencapaian berasal dari RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.6397.QDB.750) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.484.675.386 (94,87%) dari pagu anggaran Rp 6.835.125.000 (termasuk pagu blokir Rp 45.250.000 atau 1,02%).

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka (DI.6397.QDB.750.091) dengan realisasi anggaran Rp 392.102.000 (99,96 %) dari pagu Rp 392.267.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (CB) Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penguatan Literasi Numerasi (PDM 02) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 73.370.000 (99,81%) dari pagu Rp 73.510.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pendampingan Studi Tiru Praktik Baik PSP, IKM, dan PBD dari BPMP Provinsi Bali di Kota Tanjungpinang pada tanggal 6 s.d. 7 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur dari Dinas Pendidikan di 7 Kab/Kota dan Provinsi serta perwakilan dari sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Output dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman guru dan tenaga kependidikan SLBN 1 Tanjungpinang tentang PSP, IKM, dan PBD. Lebih lanjut diharapkan ada Peningkatan mutu pembelajaran yang akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lulusan, peningkatan daya saing, dan kemajuan sekolah.

- Kegiatan Festival Literasi dan Numerasi x P5", di SMK Pembangunan Kota Tanjungpinang pada tanggal 9 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman Literasi dan Numerasi siswa SMK Pembangunan Kota Tanjungpinang fokus pada dimensi pada P5. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan karakter bergotongroyong di SMK Pembangunan Kota Tanjungpinang yang akan menciptakan lulusan profil pelajar pancasila yang dapat bersaing di dunia kerja

2. Subkomponen (CC) Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (PDM 02) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 150.104.000 (100%) dari pagu Rp 150.104.000 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Refleksi dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak, di ASTON Tanjungpinang Hotel and Conference Center pada tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2023 yang diikuti oleh Kabid SMA, Kabid SLB, Kabid PAUD, Kabid SD, Kabid SMP, di 7 Kab/Kota serta perwakilan kepala sekolah penggerak di Kepulauan Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur dari Dinas Pendidikan di 7 Kab/Kota dan Provinsi serta perwakilan dari sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Output dari kegiatan ini adalah Aktivitas komunitas belajar dalam berdasarkan permasalahan belajar peserta didik meningkat, tersampainya progress report aktivitas guru melalui PMM, Hasil pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana Kurikulum Merdeka dan Sekolah Penggerak meningkat, tersampainya perencanaan berbasis data dan tata Kelola satuan Pendidikan melalui ARKAS, dan Rencana Tindak Lanjut untuk berbagi praktik baik untuk sekolah pelaksana dan non pelaksana IKM lainnya. Lebih lanjut diharapkan dapat memperkuat sinergi melalui kolaborasi dan komunikasi antara BPMP dan Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam rangka optimalisasi implementasi kurikulum merdeka dan program Sekolah Penggerak.

3. Subkomponen (CE) Pendampingan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 38.622.000 (100%) dari pagu Rp 38.622.000 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Petugas Pendampingan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 22 s.d. 26 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan pendampingan implementasi dilakukan dengan beberapa aktivitas berikut ini: Monitoring dan Evaluasi pada sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka sekaligus sebagai pelaksana program kewirausahaan, Audiensi Advokasi Program Guru Penggerak dan Progress Report Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar bersama Bupati Kepulauan Anambas dan jajaran, Pelaksanaan Upacara Hari Guru Nasional Tahun 2023, dan Menghadiri Malam Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas.. Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan pemahaman dan komitmen pemda dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak (DI.6397.QDB.750.094) dengan realisasi anggaran Rp 1.694.320.756 (83,42%) dari pagu Rp 2.031.027.000 termasuk pagu blokir Rp 45.250.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (BE) Pendampingan Pemda dalam Pengimbasan PSP dan Peningkatan Literasi Numerasi (PDM 01) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 76.920.000 (100%) dari pagu Rp 76.920.000 yang dilaksanakan melalui Assesmen dan Evaluasi pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka dan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan untuk Pendidikan PAUD dan Guru TK di Aston Nagoya City Hotel, Kota Batam pada tanggal 5 s.d. 6 Oktober 2023.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Output dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman guru non PSP dan non Penggerak dalam implementasi kebijakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan terfasilitasinya informasi capaian progress jenjang PAUD pada seluruh kebijakan Merdeka Belajar. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan adoption rate PMM pada topik Transisi PAUD-SD di Kepulauan Riau.

2. Subkomponen (BI) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 272.208.353 (100%) dari pagu Rp 272.209.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a Narasumber Kegiatan Serentak Bersinergi dan Berbagi Praktik Baik Platform Teknologi, di SMA N 4 Tanjungpinang tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengimbasan praktik baik pemanfaatan Teknologi untuk pembelajaran. Lebih lanjut diharapkan terjadinya transformasi pembelajaran melalui transformasi digital.

b Rakor Evaluasi Optimalisasi Peran Komunitas Belajar Ramah Guru Dalam Sekolah pada Sekolah Piloting LDP Kelompok Gurita, di Novotel Makassar Grand Shayla, Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 7 s.d. 10 September 2023. Output dari kegiatan ini adalah Finalisasi program advokasi Komunitas Belajar Ramah Guru dalam Sekolah dan Model pendampingan implementasi Komunitas Belajar Ramah Guru dalam Sekolah. Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan project charter PDM 02 Implementasi Kurikulum Merdeka khususnya pada objektif yang berkaitan dengan Komunitas Belajar dalam Sekolah.

c Seminar dan Penganugrahan Penghargaan Apresiasi GTK Tahun 2023, di Hotel Pasific Palace, Kota Batam, tanggal 13 s.d. 14 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah memberikan apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah berkreasi melakukan inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

d Pendamping Pemantauan Transformasi dan Advokasi UPT Tahap 2, di Kota Batam, tanggal 10 s.d. 12 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah Komitmen Pemerintah Daerah Kota Batam terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar yang telah diluncurkan. 3. Subkomponen (BK) Advokasi Penerbitan Regulasi dan Anggaran Keberlanjutan PSP di Pemda serta Optimalisasi Peran Konsultan (PDM 01) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 21.108.000 (100%) dari pagu Rp 21.108.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Advokasi Penerbitan Regulasi dan Anggaran Kesenambungan Program Sekolah Penggerak di Pemda di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pendidikan Kota Batam tanggal 8 s.d. 11 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah mengetahui kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten/Kota/Provinsi, potret dan capaian dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sehingga Pemerintah Daerah mempunyai strategi dan upaya untuk mendukung kesinambungan Program Sekolah Penggerak di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan komitmen pemda dalam kesinambungan PSP Angkatan 1.

4. Subkomponen (BM) Fasilitasi dan Pendampingan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 105.379.740 (99,93%) dari pagu Rp 105.450.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan, Pemantauan Sekaligus Observasi Terkait Kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP Tingkat Nasional Tahun 2023 Pada Perwakilan Tim GSI Provinsi Kepulauan Riau, di LORIN Sentul, Bogor, Jawa Barat tanggal 16 s.d. 21 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah mengembangkan minat dan bakat peserta didik terhadap olahraga sepakbola, Menumbuhkan jiwa sportivitas, kerja keras, disiplin, komunikatif, bersahabat, menghargai prestasi, dan tanggung jawab, Meningkatkan semangat peserta didik menjaga kesehatan jasmani, dan Meningkatkan kecintaan dan apresiasi peserta didik terhadap cabang olahraga sepakbola.. Lebih lanjut diharapkan adanya penjangkaran talenta pemain sepakbola yang berasal dari peserta didik di satuan pendidikan jenjang SMP yang telah diseleksi dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia.

5. Subkomponen (BV) Konsultan BB/BPMP dengan 50% pelaksanaan kegiatan (7 bulan kegiatan dari 9 bulan kontrak) dan realisasi anggaran Rp 367.691.750 (52,22%) dari pagu Rp 704.135.000 termasuk pagu blokir Rp 45.520.000 (6,43% dari pagu anggaran) yang dilaksanakan melalui kegiatan Jasa konsultansi Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data (DI.6397.QDB.750.095) dengan realisasi anggaran Rp 1.395.460.412 (99,89%) dari pagu Rp 1.397.017.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (FJ) Pendampingan perencanaan dan penetapan target kinerja/ capaian/ rencana aksi/ APBD (PDM 04C) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 274.071.371 (99,92%) dari pagu Rp 274.281.000 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pendampingan Perencanaan Dan Penetapan Target/Capaian Kinerja Dan Rencana Aksi melalui daring tanggal 29 s.d. 30 November 2023 yang diikuti oleh Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD dari Kabupaten/kota dan Provinsi. Output dari kegiatan ini adalah peserta diharapkan mampu menerapkan perencanaan peningkatan mutu pendidikan di daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Pendidikan berbasis data Indikator Kinerja Urusan Pendidikan. Lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan SPM pendidikan di daerah.

2. Subkomponen (QR) ToT Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui Penguatan Literasi dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 5.690.000 (92,97%) dari pagu Rp 6.120.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Kolaborasi Kegiatan Literasi Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Siswa, di SMA N 6 Tanjungpinang tanggal 6 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah Kerjasama dalam peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau dan kerjasama konten pengelolaan dan perpustakaan untuk satuan pendidikan. Lebih lanjut diharapkan Pengelolaan buku bacaan bermutu disatukan penerima Hibah Buku Bacaan Bermutu dikelola dengan baik.

6. Subkomponen (QS) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 523.722.000 (99,98%) dari pagu Rp 523.821.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a Koordinasi Pelaksanaan Advokasi Pemulihan Pembelajaran, di Kab. Linggatanggal 11 s.d. 13 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah penentuan lokasi kegiatan yang representatif sehingga memudahkan peserta yang berada dipulau terjauh dengan akses transportasi terbatas dapat mengikuti kegiatan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran di Kota Batam dan Kabupaten Lingga.

b Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Angkatan 1: 14 SD Batam, tanggal 18-21 Okt 2023

Angkatan 2: 17 SD Lingga, tanggal 25-28 Okt 2023

Angkatan 3: 16 SD Lingga, tanggal 1-4 Nov 2023. Peserta terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 guru dari masing-masing sekolah. Output dari kegiatan ini adalah Peserta memahami dan mampu melaksanakan strategi benahi literasi melalui pembelajaran dan asesmen, serta komunitas antar sekolah. Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan kemampuan literasi siswa melalui transformasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah.

3. Subkomponen (QU) Pendampingan Komunitas Belajar dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 113.767.920 (99,71%) dari pagu Rp 114.104.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Komunitas Belajar Antar Sekolah untuk Penguatan Literasi I di Batam, II di Dabo, tanggal 15-16 Nov 2023 dan Pendampingan III dan IV Daik, tanggal 21-22 Nov 2023. Sasaran dari kegiatan ini adalah 20 SD, terdiri dari 5 SD Batam, dan 15 SD Lingga yang mengikuti bimtek. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya komunitas belajar antar sekolah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Lebih lanjut diharapkan Meningkatnya kemampuan literasi siswa melalui transformasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dalam komunitas belajar.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4. Subkomponen (QV) Refleksi Intervensi Penguatan Literasi dengan 100% pelaksanaan kegiatan (3 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 73.150.000 (100%) dari pagu Rp 73.150.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Refleksi Intervensi Penguatan Literasi Kota Batam dan Kabupaten Lingga, tanggal Angkatan 1 Batam, tanggal 21-22 Des 2023

Angkatan 2 Dabo, tanggal 28-29 Des 2023. Sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Batam dan Lingga masing-masing 2 orang, serta sekolah sasaran program: bimtek dan pendampingan. Output dari kegiatan ini adalah Tersedia hasil refleksi pemulihan dan transformasi pembelajaran serta rencana tindak lanjut. Lebih lanjut diharapkan ada peningkatan kemampuan literasi siswa melalui transformasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah dan Pemda.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.6397.QDB.750.096) dengan realisasi anggaran Rp 1.831.630.218 (99,64%) dari pagu Rp 1.838.278.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (DA) Pendampingan Program GSS (PDM 05 dan PDM 11) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 108.176.000 (100%) dari pagu Rp 108.176.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Pelaksanaan TKSI dan Asesmen Akhir Sekolah Binaan KSS melalui daring yang diikuti oleh Sekolah Binaan Program Kampanye Sekolah Sehat Tahun 2023 tanggal 14 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah Teridentifikasinya permasalahan sekolah binaan dalam melaksanakan TKSI dan Asesmen akhir dan terlaksananya TKSI dan Asesmen akhir oleh seluruh sekolah binaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lebih lanjut diharapkan dapat terpetakannya status kesehatan dan status kebugaran siswa pada sekolah binaan.

2. Subkomponen (DC) Pendampingan Implementasi Pendidikan Khusus (PDM 05 dan PDM 12) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 92.490.000 (100%) dari pagu Rp 92.490.000 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembuatan Video Transformasi UPT BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, di Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan, Kab. Lingga, dan Kota Batam pada tanggal 21 Oktober s.d. 1 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Video Duta Merdeka Belajar yang menampilkan praktik baik advokasi kebijakan merdeka belajar UPT Kemendikbudristek Provinsi Kepulauan Riau. Video ini berdurasi 3-5 menit dan dapat diakses melalui berbagai platform media sosial. Lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran stakeholder yang terlibat tentang kebijakan Merdeka Belajar dan praktik-praktik baik yang dapat diadopsi, ada Perubahan persepsi positif terhadap kebijakan Merdeka Belajar, ada peningkatan partisipasi dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, dan ada dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk mendukung dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar.

3. Subkomponen (DE) Pendampingan penerapan SPM ke pemerintah daerah dengan 100% pelaksanaan kegiatan (2 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 217.312.040 (99,90%) dari pagu Rp 217.537.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Menghadiri Pelantikan Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah Terdapat peningkatan persentasi Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah. Lebih lanjut diharapkan Ada perubahan persepsi positif terhadap kebijakan Merdeka Belajar khususnya guru penggerak.

4. Subkomponen (DG) Pertemuan periodik PMO dengan 100% (9 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 874.667.290 (99,94%) dari pagu Rp 875.153.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan Rapat PMO Level Daerah Periode November 2023 melalui daring pada tanggal 28 s.d. 29 November 2023. Kegiatan ini diikuti oleh tim PMO dari 8 kab/kota/provinsi, Tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau, BGP Provinsi Kepulauan Riau, serta Direktorat Perwalian. Output dari kegiatan ini adalah tersampainya target kinerja pada Pokja yang terdapat di BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang disinergikan dengan pemda (dinas pendidikan kab/kota/prov) serta penandatanganan komitmen bersama dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar dan capaian/progress yang telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan kab/kota/prov dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar serta Penyelesaian/Usulan Solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan sekolah penggerak di Provinsi Kepulauan Riau dari terlaksananya program-program Kemendikbudristek di masing-masing daerah sesuai kewenangannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan rincian kegiatan dari komponen Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah (DI.6397.QDB.750.097) dengan realisasi anggaran Rp 832.998.900 (87,81%) dari pagu Rp 948.668.000 sebagai berikut:

1. Subkomponen (GC) Webinar Implementasi Teknologi melalui digitalisasi sekolah (PDM 03B) dengan 100% pelaksanaan kegiatan (4 kegiatan) dan realisasi anggaran Rp 3.400.000 (100%) dari pagu Rp 3.400.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Percepatan Verifikasi dan Validasi Data serta Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook) melalui daring pada tanggal 14 Oktober 2023 yang diikuti oleh satuan pendidikan penerima bantuan peralatan TIK (Chromebook) dari APBN di Provinsi Kepulauan Riau dan Coaching Clinic Percepatan Verval Data Chromebook melalui daring, pada tanggal 20 Oktober 2023 yang diikuti oleh satuan pendidikan penerima bantuan peralatan TIK (Chromebook) dari APBN di Provinsi Kepulauan Riau. Pada kegiatan ini diikuti oleh Kepala, Kapokja, dan tim PMO BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah terpetakannya data serial number dan pemanfaatan bantuan peralatan TIK (Chromebook). Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

- Percepatan Aktivasi Akun Pembelajaran belajar.id melalui daring, pada tanggal 25 Oktober 2023 yang diikuti oleh Pejabat Dinas Pendidikan yang menangani akun pembelajaran, Kapten dan Co Kapten belajar.id Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya progres aktivasi akun pembelajaran sehingga dapat diraihinya apresiasi daerah jawara belajar.id.

- Webinar Penggunaan ARKAS 4 untuk Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan yang Praktis, Aman, dan Nyaman melalui daring, pada tanggal 4 Desember 2023 yang diikuti oleh pengelola atau operator BOP satuan pendidikan jenjang PAUD dan Kesetaraan di Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Peserta mendapatkan informasi terkait ARKAS 4 untuk BOP dalam penggunaannya dan segera melakukan registrasi ARKAS 4 dan menyusun perencanaan 2024. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan tata kelola BOP Paud dan kesetaraan.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala pada Kegiatan Pendampingan Perencanaan Dan Penetapan Target/Capaian Kinerja Dan Rencana Aksi melalui daring adalah Tidak semua peserta dapat hadir karena pemerintah daerah sedang fokus dalam penyusunan akhir anggaran pada APBD.

2. Kendala pada kegiatan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran adalah Tidak semua kab/kota di provinsi kepri yang memperoleh layanan program pemulihan dan transformasi pembelajaran, disebabkan keterbatasan anggaran yang bersumber dari relaksasi AA.

3. Kendala pada Kegiatan Pendampingan Komunitas Belajar Antar Sekolah untuk Penguatan Literasi adalah Tidak semua SD yang memperoleh layanan pendampingan kombel antar sekolah, disebabkan keterbatasan anggaran yang bersumber dari relaksasi AA.

4. Kendala pada kegiatan Refleksi Intervensi Penguatan Literasi Kota Batam dan Kabupaten Lingga adalah Belum semua sekolah yang menerima bantuan buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek, yang menjadi bahan dalam melaksanakan strategi benahi literasi.

5. Kendala pada kegiatan Pembuatan Video Transformasi UPT BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, di Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan, Kab. Lingga, dan Kota Batam adalah Keterbatasan perangkat dan SDM dan Keterbatasan waktu yang harus menyesuaikan dengan storyboard dan deadline.

6. Kendala dari kegiatan Menghadiri Pelantikan Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun adalah Pemerintah Daerah masih kesulitan menemukan calon kepala sekolah tepat yang memenuhi semua

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



kualifikasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan penempatan di kontur daerah Kepulauan Riau yang terpisah-pisah oleh laut.

7. Kendala pada kegiatan Percepatan Verifikasi dan Validasi Data serta Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook) melalui daring dan Coaching Clinic Percepatan Verval Data Chromebook melalui daring adalah masih ada akun alias yang terdata di sistem sehingga capaian tidak bisa 100%.

8. Kendala pada kegiatan Percepatan Aktivasi Akun Pembelajaran belajar.id melalui daring adalah masih ada akun alias yang terdata di sistem sehingga capaian tidak bisa 100%.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Solusi dari Kendala pada Kegiatan Pendampingan Perencanaan Dan Penetapan Target/Capaian Kinerja Dan Rencana Aksi melalui daring adalah menindaklanjuti dengan berkoordinasi lebih lanjut bersama BPKAD provinsi untuk proses akhir evaluasi penganggaran di daerah.

2. Tindak lanjut dari kegiatan Kolaborasi Kegiatan Literasi Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Siswa, di SMA N 6 Tanjungpinang adalah berkoordinasi dengan tim media center, Mengolah video yang sudah diambil di perpustakaan Prov. Kepri.

3. Tindak lanjut dari kegiatan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran adalah Menjalin kerjasama dengan BGP dan Pemda untuk melaksanakan program di tahun depan.

4. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Komunitas Belajar Antar Sekolah untuk Penguatan Literasi adalah Menjalin kerjasama dengan BGP dan Pemda untuk melaksanakan program di tahun depan, serta mendorong sekolah yang didampingi untuk pengimbasan.

5. Solusi dari kegiatan Refleksi Intervensi Penguatan Literasi Kota Batam dan Kabupaten Lingga adalah Melakukan pemetaan sekolah dan berkoordinasi dengan PDM-10.

6. Solusi dari kegiatan Pembuatan Video Transformasi UPT BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, di Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan, Kab. Lingga, dan Kota Batam adalah BPMP Kepri Bekerjasama dengan Tim Teknis PDM 05 Kemendikbudristek terkait alat dan SDM dan membagi SDM menjadi beberapa Tim Kerja untuk menghemat durasi masa kerja dengan menggunakan alokasi lembur.

7. Solusi dari kegiatan Menghadiri Pelantikan Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun adalah Menetapkan kriteria yang realistis dan tepat sasaran, seperti memberikan pelatihan pada guru di pulau-pulau jika diperlukan.

8. Solusi dari kendala kegiatan Percepatan Verifikasi dan Validasi Data serta Pemanfaatan Peralatan TIK (Chromebook) melalui daring dan Coaching Clinic Percepatan Verval Data Chromebook melalui daring adalah berkoordinasi dengan pusat untuk mengunci data SN yg sudah valid.

9. Solusi dari Kendala pada kegiatan Percepatan Aktivasi Akun Pembelajaran belajar.id melalui daring adalah berkoordinasi dengan TIM PDM 3B Pusat.

C . SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 9.999.850.703 (99,99%) dari pagu anggaran Rp 10.000.536.000 dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari pagu anggaran Rp 50.000.000.

Capaian kinerja Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja A telah tercapai pada triwulan IV. Dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan IV BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung dari RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 99,90% (Rp 374.625.814 dari pagu Rp 375.000.000) dengan rincian sebagai berikut:

1. Subkomponen (B) Pengelolaan Kepegawaian dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 100% (Rp 66.598.939 dari pagu anggaran Rp 66.601.000). Dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan pembinaan penegakan disiplin terhadap PNS yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022. Lebih lanjut diharapkan akan ada mekanisme penjatuhan hukum disiplin pegawai, proses pemanggilan ASN yang melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai, dan adanya pemeriksaan BAP yang yang didugakan melakukan Disiplin Pegawai.

2. Subkomponen (C) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,49% (Rp 57.807.200 dari pagu anggaran Rp 58.103.000). Dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pendampingan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) Perubahan Untuk RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Ditjen PAUD Dasmien, di Hotel Arosa, Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2023. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunya RKBMN 2024 Perubahan RKA-K/L TA 2024. Lebih lanjut diharapkan Satker mempunyai perencanaan yang baik berupa RK-BMN Perubahan 2024.

- Sosialisasi Peraturan dan Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di Gedung Technopreneur Center Politeknik Negeri Batam, tanggal 1 s.d. 2 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan terkait implementasi TKDN dan tersusunnya draft SK Tim TKDN.

- Peningkatan Pemahaman Advokasi Hukum dan Inventarisasi Permasalahan Hukum pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di Aston Inn Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman advokasi hukum dan permasalahan hukum di lingkungan Kemendikbudristek. Lebih lanjut diharapkan dari kegiatan ini terjalin koordinasi yang baik sehingga pendampingan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum kepada UPT khususnya BPMP Provinsi Kepulauan Riau lebih tepat.

- Pendampingan Pemaketan dan Penginputan ke SIRENBAJA di Lingkungan Ditjen PAUD Dasmien, di Hotel Aston Bellevue Radio Dalam, di Jakarta, tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah terinputnya Sirenbaja 2024. Lebih lanjut diharapkan satuan kerja mempunyai perencanaan yang terintegrasi baik berbagai platform keuangan dan pengadaan.

- Koordinasi Standar Harga Satuan (SSH) TA 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di Dompok, tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen SSH 2023 Provinsi.

3. Subkomponen (D) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dengan 100% pelaksanaan kegiatan (1 kegiatan) dengan realisasi anggaran 99,98% (Rp 41.350.000 dari pagu anggaran Rp 41.360.000). Dilaksanakan melalui kegiatan: • Penyusunan Prosedur

Operasional Standar (POS) BBPMP/BPMP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, di Hotel Mercure Yogyakarta pada tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2023. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Penyesuaian turunan POS sesuai dengan PDM yang disusun oleh Direktorat PAUD Dikdasmen.

• Pendamping Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Di Tingkat Daerah yang Diadakan Oleh Biro Hukum Kemendikbudristek, di Kota Batam, tanggal 3 s.d. 5 November 2023. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan terkait dengan penyusunan peraturan di lingkungan pemerintah daerah utamanya yang berkaitan dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.1 sesuai PK 2023, pada triwulan IV BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan nilai IKPA melalui omspan
2. Melakukan Revisi anggaran dengan tidak mengubah target kinerja
3. Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja triwulanan
4. Melakukan evaluasi SAKIP Tahun 2023 bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.
5. Update Informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau (<https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/>) dan Medsos BPMP Provinsi Kepulauan Riau (Facebook : Lpmp Kepulauan Riau dan instagram : bpmp_kepulauan_riau).

Kendala / Permasalahan :

Permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta adalah bahwa di BPMP Provinsi Kepulauan Riau masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai.

Strategi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta adalah mendiseminasikan hasil Bimtek Disiplin Pegawai kepada Tim Kepagawaian dan menindaklanjuti Pelanggaran Disiplin Pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Progress / Kegiatan :

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.2005.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 9.999.850.703 (99,99%) dari pagu anggaran Rp 10.000.536.000 dan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (WA.2005.EBB) dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari pagu anggaran Rp 50.000.000.

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja 84 pada triwulan IV ini diperoleh dari perhitungan manual nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) / SMART dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) / OM-SPAM. Pada Bulan Desember 2023, BPMP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai IKPA 94,17 dan Nilai EKA 98,62 sehingga diperoleh NKA 96,84.

Dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan IV BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

1. RO Layanan Perkantoran (WA.2005.EBA.994) dengan realisasi sebesar 62,41% (Rp 6.007.715.989 dari pagu Rp 9.625.536.000, yang terdiri dari:

a Komponen Gaji dan Tunjangan (WA.2005.EBA.994.001) sebesar 69,42% (Rp 2.744.919.880 dari pagu Rp 3.954.016.000.

b Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (WA.2005.EBA.994.002) sebesar 57,53% (Rp 3.262.796.109 dari pagu Rp 5.671.520.000).

2. RO Layanan Umum (WA.2005.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.2005.EBA.962.062) dan subkomponen Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (WA.2005.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran 99,49 % (Rp 57.807.200 dari pagu Rp 58.103.000) melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada semester I.

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.2, pada triwulan IV BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan IV ini antara lain:

a. Revisi ke-8 DIPA tanggal 10 Oktober 2023 tingkat DJA perubahan pagu anggaran belanja barang (realokasi anggaran blokir Automatic Adjustment (AA) ke BA BUN),

b. Revisi ke-9 DIPA tanggal 17 Oktober 2023 tingkat Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA,

c. Revisi ke-10 DIPA tanggal 23 November 2023 tingkat Kanwil dengan pagu anggaran tetap, akan tetapi ada pergeseran pagu anggaran belanja pegawai ke belanja barang sebesar Rp 209.272.000,

d. Revisi ke-11 DIPA tanggal 27 Desember 2023 tingkat Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.

2. Melakukan percepatan belanja,

3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,

4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Kendala / Permasalahan :

Anggaran konsultan tidak dapat terealisasi dengan maksimal dikarenakan BU tidak profesional di dalam menjalankan kewajiban sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya nilai EKA dan IKPA.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, akan tetapi terhadap sisa anggaran kontrak konsultan tidak dapat dialihkan untuk belanja lainnya karena addendum kontrak terakhir tidak tersedia.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Pencapaian kinerja Tahun 2023 sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan diharapkan untuk dapat meningkatkan target di tahun 2024, sebagai upaya perbaikan dari tahun 2023
2. Pencapaian kinerja yang dinilai turun dari pencapaian tahun lalu, untuk tahun berikutnya agar dapat ditingkatkan kembali.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Bintan, 17 Januari 2024

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Warsita, S.S., M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan Tata Bumi Km 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29153
Telepon (0771) 4442196, Laman <https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 007 /C7.9/KP.04.00/2024

TENTANG
TIM REVIU LAPORAN KINERJA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja yang telah disusun;
- b. bahwa dalam melakukan reviu atas laporan kinerja perlu dibentuk tim reviu internal di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 674);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321);

- 7
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- KESATU : Tim reviu laporan kinerja melakukan reviu setelah menerima laporan kinerja dari ketua tim penyusun laporan kinerja.
- KEDUA : Tim reviu laporan kinerja terdiri dari unsur pengawas internal, penanggungjawab kegiatan, bagian perencanaan, dan bagian keuangan.
- KETIGA : Hasil reviu atas laporan kinerja selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua tim reviu internal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 2 Januari 2024



WARSIKA
NIP1975 2042002121003

Lampiran SK Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Nomor : 007 /C7.9/PR.04.03/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Warsita, S.S., M.Pd NIP 197512042002121003	Kepala BPMP Prov Kepri	Pengarah
2	Hendri Putra, S.Pd. NIP 197502132002121002	Kepala Subbagian Umum	Penanggungjawab
3	Helvira Rosalia, M.Psi. NIP 198806302015042001	Ketua Satuan Pengawasan Internal	Ketua
4	Andi Faizal, S.T NIP 199112082019021005	Anggota Tim Kerja Inovasi dan Transformasi	Anggota
5	Daris Chaniago, S.Pd NIP198805222019021004	Anggota Tim Kerja Publikasi dan Komunikasi	Anggota
6	Vera Merisha, S.Pd., M.Pd. NIP 198905102015042003	Anggota Tim Kemitraan dan Advokasi	Anggota
7	Devi Gusnaensi Tinambunan, S.Tr.T. NIP 199608082019022009	Anggota Tim Data dan Penjaminan Mutu	Anggota
8	Ferdian Syah, A.M.d. NIP199206052020121017	Anggota Tim Regulasi dan Tata Kelola	Anggota
9	Roni Indra, S.Sos., M.Pd. NIP 197911072005011003	Bagian Perencanaan	Anggota
10	Mariza Noer Fauzya, S.Pd. NIP 199103072015042002	Bagian Keuangan	Anggota



KEPALA,

WARSITA

NIP197512042002121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan Tata Bumi Km 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29153
Telepon (0771) 4442196, Laman <https://bmpkpepri.kemdikbud.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintan, 31 Januari 2024

Ketua Tim Reviu,

Helvira Rosalia

198806302015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor POS	: 006/C7.9/OT.01.00/2023
Tgl. Pembuatan	: 5 Agustus 2022
Tgl. Revisi	: 27 Juni 2023
Tgl. Efektif	: 27 Juli 2023
Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau Warsita, S.S., M.Pd. NIP197512042002121003
Nama POS	: POS Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 9.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Memiliki pemahaman mengenai alur pelaporan data capaian akuntabilitas kinerja
3. Memiliki pemahaman proses bisnis BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

KETERKAITAN :

1. POS Penyusunan Laki

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. PC/Laptop
2. Lembar disposisi
3. Lembar format data pendukung
4. Dokumen pendukung

PERINGATAN :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan dan jika pelaksana dalam keadaan berhalangan maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual

POS Pengumpulan Data Kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau

NO	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kepala	Kasubbag Umum	Tim LAKIP	Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubbag Umum untuk melaporkan data capaian kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau					Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi	
2	Menerima disposisi selanjutnya menugaskan Tim Lakip untuk memproses pelaporan data capaian kinerja					Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan dan menyampaikan format pengumpulan data dan informasi capaian kinerja masing-masing koordinator					Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja	1 Jam	Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja masing-masing koordinator	Perbulan atau Per 3 bulan
4	Mengisi format pengumpulan data dan informasi capaian kinerja lalu menyerahkan kembali kepada Tim Lakip					Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja masing-masing tim per koordinator	7 Hari	Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah terisi dari masing-masing koordinator	Instrumen yang telah diisi diserahkan kembali kepada Tim Lakip pada hari ke 7
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi capaian kinerja yang telah terkumpul					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja	3 Hari	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah diolah	
6	Memeriksa data capaian kinerja					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah diolah	1 Hari	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah dikoreksi oleh Kasubbag TU	
7	Menyetujui laporan data capaian kinerja					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah dikoreksi oleh Kasubbag TU	3 Jam	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah disetujui	
8	Dokumentasi data capaian kinerja					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah disetujui	2 Jam	Dokumen capaian kinerja	Capaian kinerja juga diinput melalui aplikasi spasikita